KILASAN KINERJA 2016
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
KILASAN KINERJA 2016
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
KILASAN KINERJA 2016
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Penanggung Jawab
Pelindung
Pengarah Materi
Penulis
Editor
Editor Foto
Desain Sampul dan Tata Letak
Sekretariat
Keuangan
Diterbitkan Oleh
Takrif
Assalamu’alaikum Wr. Wb.


Semoga buku ini bermanfaat, dapat menghadirkan nuansa baru dalam penyediaan informasi, sekaligus menjadi bahan refleksi atas perjalanan kebijakan pendidikan dan kebudayaan di Indonesia tercinta. Banyak sudah yang dilaksanakan, tetapi lebih banyak lagi pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk meningkatkan mutu dan akses pendidikan yang berkeadilan bagi seluruh anak bangsa.

Akhir kata, selamat membaca.
Wassalam,
Jakarta, Oktober 2016

Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
KILASAN KINERJA 2016

Sebuah Kilasan v
Daftar Isi vi
Pendahuluan 2

Daftar Isi

REVOLUSI MENTAL

Penguatan Pendidikan Karakter 6
Menuju Generasi Emas Beretika

Implementasi Kurikulum 2013 21

Ujian Nasional: 24
Kejujuran Akarnya, Kualita Buahnya

Revitalisasi 10
Pendidikan Kejuruan

Lewat INAP, Indonesia Kejar Standar 27
Kualitas Pendidikan Internasional

Wajib Belajar 12 Tahun 15
Persiapan Generasi Masa Depan

Guru Pembelajar, Guru Berprestasi 32

Sepuluh Hari Bersama Maestro 37

Guru Mulia Karena Karya 35
Membangun Kebudayaan, Menguatkan Karakter Bangsa 40

Menggapai Mimpi Bersama Mentor 53

Pengenalan Lingkungan Sekolah 45

Gerakan Literasi Nasional Menuju Masyarakat Sadar Literasi 57

Semarak Gerakan Hari Pertama Sekolah 47

Pendidikan Keluarga Sebagai Gerakan Bersama 62

Gerakan Seniman Masuk Sekolah: Gempita Siswa Mempelajari Seni 50

Mengukir Prestasi, Membangun Karakter, dan Merekatkan NKIR 65

Reformasi Birokrasi Internal (RBI): Menciptakan Birokrasi Efektif dan Terpercaya 69

Penguatan PAUD: Titik Awal Membangun Generasi Emas 79

Pengembangan Tata Kelola Kemendikbud Menjawab Tantangan Zaman 71

Tunas Integritas sebagai Gerakan Revolusi Mental 82

Serunya Rembuk Pendidikan dan Kebudayaan 2016 75

Transaksi Nontunai dan Belanja Daring: Transparan, Aman, dan Nyaman 85
MEMBANGUN DARI PINGGIRAN

Percepatan Kemajuan Pendidikan di Papua dan Papua Barat 90

Membangun Asa Lewat Sekolah Garis Depan 98

Revitalisasi LPMP: Tangan Kanan Kemendikbud di Daerah 103

Guru Garis Depan untuk Pendidikan di Daerah Khusus 106

Merawat Hubungan Pusat dan Daerah melalui Dialog dan Kerja Nyata 109

NEGARA HADIR

Neraca Pendidikan Daerah: Mencari Solusi atas Permasalahan Pendidikan di Daerah 114

Neraca Guru dan Tenaga Kependidikan: Potret Guru dan Tenaga Kependidikan Daerah 118

Memenuhi Amanat Konstitusi Lewat Program Indonesia Pintar 124

Pengayaan Lema Bahasa Indonesia 120
## Daftar Isi

<table>
<thead>
<tr>
<th>Bab</th>
<th>Halaman</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Pembangunan Infrastruktur untuk Pendidikan yang Lebih Baik</td>
<td>127</td>
</tr>
<tr>
<td>Golden Record: Dasar Penguatan Tata Kelola Rehab Infrastruktur Sekolah</td>
<td>131</td>
</tr>
<tr>
<td>Inovasi Teknologi dalam Pendidikan</td>
<td>134</td>
</tr>
<tr>
<td>Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia melalui Program Beasiswa</td>
<td>139</td>
</tr>
<tr>
<td>Revitalisasi Museum: Edukatif, Rekreatif, dan Komunikatif</td>
<td>142</td>
</tr>
<tr>
<td>Galeri Nasional Indonesia, “Rumah Besar” Perupa Indonesia</td>
<td>148</td>
</tr>
<tr>
<td>Promosi dan Diplomasi Budaya dan Bahasa Indonesia</td>
<td>152</td>
</tr>
<tr>
<td>Rumah Peradaban: Mengungkap, Memaknai, Mencintai</td>
<td>154</td>
</tr>
<tr>
<td>Kemendikbud Dukung Perfilman Indonesia</td>
<td>157</td>
</tr>
<tr>
<td>World Culture Forum 2016 sebagai Gerakan Kemanusiaan</td>
<td>160</td>
</tr>
<tr>
<td>Merayakan Bulan Pendidikan dan Kebudayaan 2016</td>
<td>166</td>
</tr>
<tr>
<td>DAPODIK: Satu Nusa Satu Data</td>
<td>170</td>
</tr>
<tr>
<td>Regulasi untuk Pendidikan yang Lebih Baik</td>
<td>174</td>
</tr>
<tr>
<td>Unit Layanan Terpadu: Melayani Sepenuh Hati</td>
<td>178</td>
</tr>
<tr>
<td>Daftar Akronim</td>
<td>182</td>
</tr>
<tr>
<td>Kredit Foto</td>
<td>184</td>
</tr>
<tr>
<td>Terima Kasih</td>
<td>186</td>
</tr>
<tr>
<td>Di balik layar</td>
<td>188</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Pendahuluan

Pada periode ini, tepatnya pada 27 Juli 2016, terjadi pergantian pucuk pimpinan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari Anies Rasyid Baswedan, Ph.D kepada Prof. Dr. Muhadjir Effendy, MAP. Pada saat serah terima, Mendikbud Muhadjir berkomitmen untuk meneruskan praktik baik yang sudah dimulai pada masa Mendikbud Anies Baswedan dan akan melakukan percepatan pelaksanaan program, terutama program-program prioritas kementerian.


Setidaknya ada empat program prioritas yang diamanahkan Presiden Joko Widodo untuk ditindaklanjuti Mendikbud, yaitu penguatan pendidikan karakter, revitalisasi pendidikan kejuruan, Program Indonesia Pintar (PIP), dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, terutama di daerah khusus 3T (terdepan, tertinggal, dan terpencil).

Penguatan pendidikan karakter (PPK) merupakan wujud dari program aksi revolusi mental yang terus digiatkan pada ekosistem pendidikan. PPK tidak hanya melibatkan guru dan kepala sekolah, tetapi juga menguatkan peran orang tua dan masyarakat dalam membantu sekolah menjadi rumah kedua dan tempat belajar yang menyenangkan bagi peserta didik.

Revolusi mental yang terus digiatkan pada ekosistem pendidikan.

REVOLUSI MENTAL 

Membangun dari Pinggiran direalisasikan ke dalam program-program aksi yang menarik pusat gravitasi pembangunan dari kota ke daerah-daerah garis depan. Negara Hadir merupakan wujud tanggung jawab negara dalam menyediakan layanan bagi masyarakat dan mendorong terciptanya ekosistem pendidikan yang padu.

Setidaknya ada empat program prioritas yang diamanahkan Presiden Joko Widodo untuk ditindaklanjuti Mendikbud, yaitu penguatan pendidikan karakter, revitalisasi pendidikan kejuruan, Program Indonesia Pintar (PIP), dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, terutama di daerah khusus 3T (terdepan, tertinggal, dan terpencil).

Penguatan pendidikan karakter (PPK) merupakan wujud dari program aksi revolusi mental yang terus digiatkan pada ekosistem pendidikan. PPK tidak hanya melibatkan guru dan kepala sekolah, tetapi juga menguatkan peran orang tua dan masyarakat dalam membantu sekolah menjadi rumah kedua dan tempat belajar yang menyenangkan bagi peserta didik.

Revolusi mental yang terus digiatkan pada ekosistem pendidikan.
Revolusi Mental

Salah satu jalan mewujudkan revolusi mental adalah melalui penanaman nilai-nilai di lingkungan sekolah yang menyenangkan untuk para siswa.
Penguatan Pendidikan Karakter Menuju Generasi Emas Beretika


Penguatan karakter melalui kegiatan Pramuka

Penguatan karakter melalui kegiatan Pramuka
pembentukan karakter ditanamkan melalui empat aspek: olah pikir, olah hati, olah rasa/karsa, dan olah raga. Berlandaskan keempat aspek pembentukan karakter tersebut, serta diintegrasikan dengan nilai-nilai yang tertuang dalam GNRM, Kemendikbud fokus pada penguatan lima nilai utama dalam implementasi PPK, yaitu religius, nasionalis, gotong royong, mandiri dan integritas.

PPK sejatinya bukanlah kebijakan baru melainkan keberlanjutan dan revitalisasi dari Gerakan Nasional Pendidikan Karakter yang telah dimulai sejak tahun 2010. Program ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai pembentukan karakter bangsa secara masif dan efektif melalui lembaga/satuan pendidikan dengan prioritas nilai-nilai tertentu yang akan menjadi fokus pembelajaran, pemahaman, pengertian, maupun praktik. Targetnya, pendidikan karakter dapat mengubah perilaku, cara berpikir, dan cara bertindak seluruh komponen bangsa menjadi lebih baik.

PPK juga diharapkan dapat menjadi solusi untuk meminimalisasi berbagai persoalan yang muncul karena kekurangan keahlian dalam lingkungan pendidikan, kejahatan seksual, tawuran pelajar, pengaulan bebas, dan narkoba.

Selain persoalan yang muncul di lingkungan pendidikan, Indonesia juga menghadapi berbagai persoalan besar seperti maraknya kelompok radikalisme-terorisme di seluruh bangsa, gerakan separatis, sampai pada perilaku kekerasan dalam lingkungan pendidikan, kehadiran seksual, tawuran pelajar, dan kekerasan dalam lingkungan pendidikan. Kegiatan PPK bersama orang tua: Interaksi dengan orang tua dan lingkungan/ sesama

<table>
<thead>
<tr>
<th>Hari</th>
<th>Senin</th>
<th>Selasa</th>
<th>Rabu</th>
<th>Kamis</th>
<th>Jumat</th>
<th>Sabtu</th>
<th>Minggu</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Waktu Belajar*</td>
<td>Nepu</td>
<td>Religius, Nasionalis, Mandiri, Gotong Royong, Integritas</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Kegiatan Pembaruan:

- Memulai hari dengan Upacara Bendera (Senin), Apel, menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu-lagu nasional, dan berdoa bersama.
- Membaca buku non-pelajaran tentang PBP, cerita rakyat, 15 menit sebelum memulai pembelajaran.

Kegiatan Intra-kurikuler: Kegiatan Belajar-Mengajar

Kegiatan Ko-kurikuler dan Ekstrakurikuler sesuai minat dan bakat siswa yang dilakukan di bawah bimbingan guru/ pelatih melibatkan orang tua dan masyarakat:

Kegiatan Keagamaan, Pramuka, PMR, Paskibra, Kesenian, Bahasa dan Sastra, KIR, Jurnalistik, Olahraga, dsb.

Kegiatan Pembiasaan:

- Sebelum menutup hari Siswa melakukan refleksi, menyanyikan lagu daerah dan berdoa bersama

* Durasi waktu tidak mengikat dan disesuaikan dengan kondisi sekolah
** Nilai-nilai karakter disesuaikan dengan GNRM, kreativitas sekolah, dan kearifan lokal
berjalan berkesinambungan. Pendidikan karakter membutuhkan kebijakan yang lebih komprehensif dan bertumpu pada kearifan lokal untuk menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks. Kebijakan ini akan menjadi dasar bagi perumusan langkah-langkah yang lebih konkret agar penyemaian dan pembudayaan nilai-nilai utama bangsa dapat dilakukan secara efektif dan menyeluruh.


Persiapan matang

Dalam rangka mengaji persiapan serta pelaksanaan PPK di sekolah, Mendikbud membentuk Tim PPK yang diketuai Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan Karakter Arie Budiman. Keanggotaan Tim PPK merupakan kolaborasi antara staf internal Kemendikbud dengan para pakar dan pegiat pendidikan. Sejauh ini, Tim PPK telah bekerja sama menyajikan empat dokumen yang disusun sesederhana mungkin agar mudah dipahami sekolah, sehingga dapat menjadi panduan dalam menyelenggarakan program PPK. Dokumen tersebut berupa Naskah Konsep PPK, Panduan Penyelenggaraan PPK, Pedoman Monitoring dan Evaluasi, serta Modul Pelatihan Pengembangan SDM. Tim PPK juga berkibar di dalam penyelenggaraan kegiatan diskusi kelompok terpumpun yang dilakukan secara berkala guna mendukung proses penyusunan dan penyempurnaan dokumen PPK.

Kemendikbud mengharapkan pelibatan publik dalam proses penyusunan konsep akan membuat PPK menjadi program yang relevan dan dapat diimplementasikan di seluruh Indonesia. Untuk memperkuat hal tersebut, Kemendikbud juga melakukan berbagai tahap kajian pengembangan konsep PPK. Antara lain, dengan menggelar pertemuan bersama dua puluh sekolah di wilayah Jabodetabek yang telah mengimplementasikan PPK. Kemendikbud berharap kegiatan belajar mengajar akan memberi warna baru dalam proses pendidikan.

Program PPK terintegrasi dalam kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler. Jam pelajaran tambahan dalam rangka pengucuran pendidikan karakter juga terintegrasi dalam kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler. Kegiatan dapat dilakukan di dalam dan/atau di luar sekolah selama kegiatan tersebut masih menjadi tanggung jawab sekolah, serta telah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan siswa. Pada prinsipnya, tidak ada perubahan kurikulum dengan berjalannya program PPK. Implementasi PPK justru diharapkan dapat lebih mengefektifkan kurikulum yang saat ini berlaku.

Dalam implementasi PPK, sarana dan prasarana yang digunakan berbasis pada apa yang dimiliki sekolah. Sekolah juga dapat bekerjasama dengan masyarakat, komunitas, maupun dunia usaha industri setempat terkait kebutuhan sarana dan prasarana tersebut. Ketentuan jam mengajar pun akan disesuaikan, terutama yang berkaitan dengan ekuivalensi jam mengajar bagi guru yang aktif pada kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler dalam penyelenggaraan PPK.

Kemendikbud telah merintis persiapan guru untuk dapat mengajar dengan muatan pendidikan karakter dan mengupayakan pelaksanaannya secara berkesinambungan. Kemendikbud berharap pengembangan guru melalui program PPK dapat meningkatkan kreativitas dan kemampuan improvisasi guru dalam mengajar. Seyogyanya guru mencintai...
profesinya, sehingga ia dapat menjadi pengajar dan pendidik sekaligus yang memahami kebutuhan siswanya.

**Implementasi Bertahap**


Bangsa besar adalah bangsa yang memiliki karakter kuat. Karakter kuat hanya dapat tumbuh dan berkembang lewat proses pendidikan yang menyenangkan, serta lingkungan keluarga dan masyarakat yang teguh memegang nilai-nilai dalam seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Anak-anak Indonesia harus memiliki karakter kokoh agar dapat menjawab berbagai tantangan abad ke-21 ini. Lewat kerja sama seluruh pihak, program PPK diharapkan dapat mewujudkan generasi emas beretika.
Revitalisasi Pendidikan Kejuruan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan program revitalisasi pendidikan kejuruan dan menjadikannya sebagai salah satu program prioritas di tahun 2016.

Berbagai persiapan baik infrastruktur, kurikulum, maupun tenaga pengajar telah disiapkan oleh Kemendikbud pada tahun ini.


Dalam jangka waktu 15 tahun ke depan, akan terjadi lonjakan kebutuhan tenaga kerja terampil dari 55 juta pada saat ini menjadi 113 juta pada tahun 2030. Berbeda dengan negara lain yang mayoritas penduduknya berusia lanjut (aging society), Indonesia saat ini hingga 2040 justru dihuni penduduk berusia produktif (15-64 tahun) yang jumlahnya mencapai 67% dari total jumlah penduduk. Momentum adanya jumlah penduduk usia muda yang besar ini merupakan potensi kekayaan (asset) sekaligus tantangan. Harus ada upaya menyeluruh untuk menyiapkan kebutuhan 113 juta tenaga kerja terdidik yang kompetitif pada tahun 2030 agar benar-benar menjadi “bonus demografi”. Belum lagi pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang mengharuskan warga negara Indonesia siap bersaing dengan warga negara lain.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Presiden Joko Widodo dengan Nawacita kelima (meningkatkan kualitas hidup...
manusia Indonesia) dan keenam (meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional), memastikan bahwa sumber daya manusia Indonesia siap menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja pada tahun 2030.


Sejalan Inpres tersebut, Kemendikbud telah membuat beberapa terobosan di tahun 2016. Kemendikbud memberikan bantuan infrastruktur dan pengembangan kelembagaan terhadap 142 SMK yang bergerak di bidang pertanian (agrobisnis dan agroteknologi), maritim/kelautan, dan pariwisata. Kemendikbud juga menargetkan mengirim 45 guru ke Jerman untuk mengikuti pelatihan pada Dunia Usaha dan Dunia Industri (DU/DI) yang ada di Jerman dan mendatangkan 30 tenaga ahli (senior expert) Jerman ke SMK. Agar sejalan konsep


Empat SMK prioritas Presiden Joko Widodo: kelautan, pertanian, pariwisata dan industri kreatif

Dalam rangka membekali lulusan SMK dengan sertifikat kompetensi yang diakui dunia usaha/dunia industri, sejak tahun 2015 Direktorat Pembinaan SMK, Kemendikbud dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi
Rencana Integrasi Pendidikan Kejuruan di Kemendikbud

(BSNP) telah melaksanakan kegiatan pengembangan SMK sebagai Lembaga Sertifikasi Pihak Pertama (LSP-P1). Adapun lingkup kegiatan pengembangan SMK menjadi LSP-P1 terdiri dari: (i) fasilitasi persiapan dan pelatihan asesor kompetensi; (ii) penyelenggaraan Tempat Uji Kompetensi (TUK); (iii) penyelenggaraan materi uji kompetensi; serta (iv) pelatihan penyusunan dan penerapan dokumen mutu. Nantinya setiap calon lulusan SMK akan mengikuti uji kompetensi/sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan di LSP-P1 di sekolah masing-masing atau pada LSP-P1 SMK terdekat. Sampai dengan September 2016, sudah terbentuk 291 SMK yang sudah menjadi LSP-P1.


Proses Link and match dengan Kementerian/Lembaga dan DUDI, juga semakin erat pada tahun 2016. Sudah ada enam kementerian/lembaga dan DU/DI yang menandatangani nota kesepakaman dengan Kemendikbud pada tahun ini. Salah satu DU/DI yang menandatangani MoU adalah PT. Trans Retail Indonesia. MoU ini berisikan komitmen keterlibatan PT. Trans Retail dalam mengembangkan SMK terkait dengan lingkup kerja sama untuk pengembangan kurikulum, penguatan proses pembelajaran, penyediaan tempat PKL, penyedian instruktur, pengembangan peserta didik, dan pemetaan kebutuhan tenaga kerja.

Lulusan pendidikan kejuruan diharapkan dapat menjadi “penggerak dan pelaku” bagi Indonesia dalam mewujudkan kemandirian dan meraih kekuatan ekonomi dunia.

**SMK Rujukan**
Dalam rangka meningkatkan SMK berkualitas, Kemendikbud telah mengembangkan 350 SMK Rujukan pada tahun 2016. SMK Rujukan ini merupakan SMK unggulan di daerahnya dan memiliki siswa berjumlah lebih dari 1000 siswa. SMK Rujukan ini bertujuan sebagai model dan membina SMK Reguler (jumlah siswanya sebanyak 600-1000 siswa), SMK Aliansi (jumlah siswanya sebanyak 200-600 orang) dan SMK Konsorsium (jumlah siswanya kurang dari 200 siswa) yang berada di sekitarnya.


Selain itu, Direktorat LKP juga sedang mengupayakan beberapa program jurusan yang relevan bagi peserta didiknya. Tidak kalah dengan Direktorat LKP, Direktorat PKLK juga makin menyiapkan peserta didiknya untuk mandiri di tengah segala kekhususan yang mereka alami. Direktorat PKLK sendiri telah bekerja sama dengan PT Carrefour Indonesia dalam menerima anak magang dari SLB untuk beberapa pekerjaan tertentu.


Diharapkan proses revitalisasi pendidikan kejuruan mampu menyiapkan lulusan SMK, Kursus dan Pelatihan, serta SLB yang siap menghadapi persaingan dan menjawab kebutuhan dunia kerja. Lulusan pendidikan kejuruan diharapkan dapat menjadi “penggerak dan pelaku” bagi Indonesia dalam mewujudkan kemandirian dan meraih kekuatan ekonomi dunia.
Wajib Belajar 12 Tahun Persiapan Generasi Masa Depan

Mereka diharapkan mampu mengembangkan potensi individualnya, berkontribusi bagi masyarakat, sekaligus siap menghadapi persaingan global.

Wajib Belajar 12 Tahun berbeda dengan program Wajib Belajar Enam dan Sembilan Tahun yang fokus pada peningkatan akses pendidikan. Wajib Belajar 12 Tahun juga menyasar peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dalam semesta pendidikan nasional.

penerbitan Inpres No. 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.


Sebagai kelanjutan dari program sebelumnya, Pemerintah mendorong pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun sejak Juni 2015 untuk memastikan ketuntasan pendidikan dasar diikuti dengan ketuntasan pendidikan menengah.

**Kondisi yang ingin dicapai**

Wajib Belajar (Wajar) 12 tahun akan berdampak pada meningkatnya partisipasi pendidikan. Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya adalah menjaga keberlanjutan agar peserta didik dapat menyelesaikan Wajar sampai 12 tahun. Pelaksanaannya diharapkan juga merata sampai pada tingkat provinsi dan kabupaten. Dengan kriteria tersebut, diharapkan Wajar 12 tahun bisa meningkatkan APK Sekolah Dasar sebesar 114,09%, jenjang SMP mencapai 106,94%, dan jenjang sekolah menengah sampai dengan 91,63% (lihat grafik di bawah).


Komponen pendidikan lain juga harus dipenuhi dalam meningkatkan partisipasi anak ke sekolah. Komponen yang pertama adalah guru. Untuk bisa meraih APK pendidikan menengah sebesar 91,63% pada tahun 2019, diperkirakan membutuhkan guru sebanyak 3.748.153 orang dengan rincian per jenjang pendidikan seperti bagan di bawah.

Komponen kedua adalah sarana pembelajaran seperti pembangunan unit sekolah baru, ruang kelas baru, dan sarana prasarana lainnya. Untuk melayani target jumlah siswa pada tahun 2019, dibutuhkan sebanyak 268.192 sekolah. Rincian, sebanyak 174.732 sekolah untuk jenjang SD/MI, 57.419 sekolah untuk jenjang SMP/MTs, dan 36.761 sekolah untuk jenjang SMA/SMK/MA.

Selain sekolah, kebutuhan ruang kelas juga menjadi penting untuk bisa memenuhi anak-anak. Pada 2019, kebutuhan ruang kelas sebanyak 1.978.041 ruang dengan detail 1.162.153 ruang kelas untuk jenjang SD/MI, 442.163 ruang kelas untuk jenjang SMP/MTs, dan 373.725 ruang kelas pada jenjang SMA/SMK/MA.

Untuk menyuskesan pelaksanaan Wajar 12 Tahun, Kemendikbud harus mempersiapkan program aksi berikut.

1. **Peningkatan Daya Tampung Sekolah**

   Berdasarkan data pokok pendidikan tahun 2014, terdapat 274 Kecamatan yang belum memiliki SMP. Provinsi dengan jumlah kecamatan yang belum memiliki SMP terbesar adalah Papua dengan 237 kecamatan atau 44,89% dari total kecamatan yang ada di Papua. Namun demikian, Pembangunan USB di provinsi Papua ini perlu dilakukan dengan memperhatikan jumlah peserta didik dan guru, serta ketersediaan sumber daya lainnya. Untuk itu, langkah yang dapat ditempuh adalah pembangunan SD-SMP Satu Atap.

   Untuk jenjang Sekolah Menengah (SM), terdapat 815 Kecamatan yang belum memiliki SM. Sesuai dengan Permendikbud Nomor 80 Tahun 2013, prioritas pembangunan SM dilaksanakan pada kecamatan-kecamatan pada provinsi yang terbanyak belum memiliki SM. Papua adalah provinsi dengan kecamatan terbanyak belum memiliki SM di tingkat kecamatan. Seperti halnya SMP, Papua merupakan provinsi dengan jumlah kecamatan terbesar yang belum memiliki SM, yaitu sebanyak 388 kecamatan atau 73,48%. Selanjutnya Papua Barat dengan 103 kecamatan atau 58,86%
Proyeksi APK per Jenjang Pendidikan 2015-2019 (dalam %)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2015</th>
<th>2016</th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>APK SD/MI/Paket A</td>
<td>82.42</td>
<td>85.51</td>
<td>88.14</td>
<td>89.74</td>
<td>91.63</td>
</tr>
<tr>
<td>APK SMP/MTs/Paket B</td>
<td>102.80</td>
<td>104.47</td>
<td>105.29</td>
<td>106.70</td>
<td>106.94</td>
</tr>
<tr>
<td>APK SMA/SMK/MA/Paket C</td>
<td>110.77</td>
<td>111.14</td>
<td>111.43</td>
<td>113.41</td>
<td>114.09</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Proyeksi APK per Jenjang Pendidikan 2015-2019 (Sumber: PDSPK, 2015)

dari total kecamatan yang ada. Hanya tiga provinsi yang seluruh kecamatanya telah memiliki SM yaitu Riau, DKI Jakarta, dan Kalimantan Timur.


(2) Program Indonesia Pintar (PIP)

Kemendikbud sesuai dengan tugas dan kewenangannya melaksanakan Program Indonesia Pintar (PIP) dengan tujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun. Mereka harus mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah, dan terhindar dari kemungkinan putus sekolah (drop out).

PIP bukan hanya bagi peserta didik di sekolah, namun juga berlaku bagi peserta didik di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), Balai Latihan Kerja (BLK), atau satuan pendidikan nonformal lainnya, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

(3) Sekolah Garis Depan


(4) Pendidikan Layanan Khusus

Wilayah Indonesia yang sangat luas dengan keragaman budaya membuat pola penyediaan pendidikan menjadi berbeda, terutama untuk daerah yang mempunyai akses sulit atau masih terbelakang dari segi infrastruktur dan kondisi sosial ekonomi. Untuk mengakomodasi kebutuhan ini, Kemendikbud mempunyai program-program unggulan yang berusaha menyediakan layanan pendidikan sesuai kondisi lingkungan dan masyarakat, yaitu sebagai berikut:

1. Sekolah Menengah Atas Terbuka (SMA Terbuka). SMA
Terbuka merupakan salah satu bentuk pendidikan formal yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari sekolah induk yang penyelenggaraan pendidikannya menggunakan metode belajar mandiri (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 72 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus).


Guru Garis Depan


Revitalisasi Paket Kesetaraan

Kemendikbud juga memperluas akses pendidikan kesetaraan sebagai upaya pemerataan dan keadilan pendidikan bagi warga yang terkendala tidak dapat masuk ke dalam pendidikan formal. Hak-hak mereka harus tetap dipenuhi dalam mendapatkan pendidikan dasar dan menengah melalui program pendidikan kesetaraan. Salah satu program unggulan pendidikan kesetaraan adalah program khusus memasuki dunia kerja. Sasarannya, pendidikan kesetaraan mampu mengaktualisasikan potensi terpendam peserta didik menjadi potensi aktual, untuk mengisi ruang publik secara produktif sebagai persiapan memasuki dunia kerja.

Pelibatan Publik

Program Wajar 12 Tahun perlu dukungan dari semua pihak, terutama yang berada di dalam ekosistem pendidikan. Dalam Wajar...
Keterlibatan publik penting untuk memastikan Wajar 12 Tahun tidak melulu dibayangkan sebagai peran pemerintah pusat semata

12 Tahun, ekosistem pendidikan merupakan pengejawantahan dari ruang interaksi dari seluruh pihak, baik orang tua, kepala sekolah, guru, siswa, masyarakat, media, pemerintah pusat dan daerah, industri, serta lingkungan yang lebih luas. Dalam ruang interaksi tersebut, pemerintah menjadi pendorong munculnya inovasi serta dukungan dari ekosistem pendidikan.

Ketuntasan anak dalam menyelesaikan pendidikan, sedikit banyak dipengaruhi oleh interaksi yang terjadi antara sekolah dengan lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat yang proaktif akan mendorong ketuntasan pendidikan siswa. Sebaliknya, lingkungan masyarakat yang terpisah dari entitas sekolah dan tidak proaktif cenderung membiarkan atau tidak memedulikan masalah penyelesaian pendidikan siswa di lingkungannya.

Oleh karena itu, Kemendikbud menginisiasi keterlibatan publik dengan sekolah melalui program Pendidikan Keluarga, Pengenalan Lingkungan Sekolah, dan Hari Pertama Sekolah. Program-program tersebut merupakan pintu masuk partisipasi masyarakat yang dimulai dari partisipasi keluarga. Keterlibatan publik penting untuk memastikan Wajar 12 Tahun tidak melulu dibayangkan sebagai peran pemerintah pusat semata.
Implementasi Kurikulum 2013


Untuk memastikan implementasi berjalan baik, Kemendikbud juga melakukan pendampingan implementasi yang melibatkan unsur sekolah, guru, dan masyarakat. Kemendikbud juga merencanakan sosialisasi secara luas di kalangan orang tua murid atas pelaksanaan Kurikulum 2013, agar tak terulang lagi keresahan dan kebingungan seperti terjadi sebelumnya.


Perbaikan kurikulum juga dilakukan pada level substansi materi agar semangat pengembangan Kurikulum 2013 dapat terwujud. Perbaikan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Perumusan dan penataan kembali kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi spiritual dan sikap secara eksplosit hanya diperuntukkan untuk mata pelajaran Agama & Budi Pekerti dan mata pelajaran Kewarganegaraan. Sedangkan pada mata pelajaran lain,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Implementasi Kurikulum 2013

kompetensi spiritual dan sikap terkandung sebagai hidden curriculum (kurikulum tersembunyi). Melalui penataan ini, tidak lagi terdapat kompetensi dasar untuk penjabaran kompetensi inti spiritual dan sikap.

b. Kompetensi tidak dibatasi oleh pemenggalan taksonomi berdasarkan jenjang pendidikan. Kemampuan berpikir tingkat tinggi (high order thinking skills) tidak hanya diperuntukan kepada jenjang pendidikan menengah, tetapi juga jenjang pendidikan dasar. Perbedaan untuk setiap jenjang hanya terjadi pada tingkat kompleksitas objek, bukan tingkatan jenjang berpikir.

c. Adanya ruang kreatif kepada guru dalam mengimplementasikan kurikulum (pada silabus dan buku teks pelajaran).

Pemberian ruang kreatif bagi guru meliputi:

i. Silabus yang disiapkan pemerintah merupakan salah satu model untuk memberi inspirasi. Guru dapat mengembangkannya sesuai dengan konteks yang relevan;

ii. dalam pembelajaran tematik (khusus jenjang SD), guru dapat mengembangkan tema dan subtema sesuai dengan konteks yang relevan;

iii. memberikan penguatan pada pembelajaran aktif, siswa perlu dilatih dan dirangsang untuk berpikir sientifik (5M);

iv. 5M bukanlah prosedur atau langkah-langkah dalam proses pembelajaran yang bersifat kaku;

v. pendekatan sientifik bukanlah satu-satunya pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran.

d. Penyesuaian Kompetensi Inti-Kompetensi Dasar (KI/KD) dengan silabus & buku.

Keselarasan KI/KD dengan silabus dan buku untuk memastikan bahwa revisi Kurikulum 2013 tidak hanya pada level dokumen, tetapi juga wahana pembelajaran yang secara langsung bersinggungan di ruang-ruang kelas

Keselarasan KI/KD dengan silabus dan buku untuk memastikan bahwa revisi Kurikulum 2013 tidak hanya pada level dokumen, tetapi juga wahana pembelajaran yang secara langsung bersinggungan di ruang-ruang kelas sehingga nafas dari semangat revisi Kurikulum 2013 bisa benar-benar hadir di ruang kelas.


Siswa menjadi pusat kegiatan pembelajaran

Siswa menjadi pusat kegiatan pembelajaran
Ujian Nasional: Kejujuran Akarnya, Kualitas Buahnya

Kemendikbud tidak menutup mata terhadap fakta munculnya beragam kontroversi dan polemik berkaitan dengan pelaksanaan Ujian Nasional (UN).

Selama sepuluh tahun pelaksanaan UN (2006-2015), berbagai persoalan baru bermunculan. Mulai dari kecurangan yang dapat digolongkan sistimatis dan melibatkan berbagai pihak, sampai kecenderungan proses pembelajaran dalam ruang-ruang sekolah yang mengalami perubahan secara sistematis.

Jarang lagi terdapat pembicaraan soal capaian ketuntasan belajar, utamanya untuk kelas akhir. Target capaian angka-angka hasil UN menjadi pengganti topik utama dalam ruang-ruang kelas, karena hal itulah yang menjadi tolak ukur keberhasilan proses belajar-mengajar. “Persiapan UN sudah dimulai dua tahun sebelumnya,” begitu ungkapan salah satu kepala sekolah negeri di Provinsi Yogyakarta, untuk menggambarkan besarnya tekanan yang dihadapi pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan UN.

Nama Kurikulum Pembelajaran pun perlahan diplestikan menjadi “Kurikulum UN,” karena terlalu berfokus pada persiapan capaian target kelulusan. Baik siswa, guru, dan orang tua siswa menjadi sibuk dan tertekan atas target kelulusan UN. Alih-alih menjadi bagian solusi untuk peningkatan mutu pendidikan, UN dipandang menjadi beban dan momok tahunan bagi para pemangku kepentingan (stakeholder) pendidikan.


Setidaknya terdapat dua tujuan strategis yang ingin dicapai lewat kebijakan pencabutan UN sebagai syarat kelulusan. Pertama, menggeser paradigma pembelajaran dari exam oriented menjadi berorientasi pada ketuntasan kompetensi. Kedua, pengejawantahan perilaku kejujuran dalam dunia pendidikan.

Dengan UN bukan lagi sebagai penentu kelulusan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Ujian Nasional: Kejujuran Akarnya, Kualitas Buahnya

Diharapkan para pengelola dan pemangku kepentingan pada satuan pendidikan tidak lagi hanya terpacu untuk mengejar nilai UN. Namun, lebih jauh lagi berusaha mencapai ketuntasan kompetensi pembelajaran. Hal ini sejalan dengan amanat pendidikan nasional untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya, bukan hanya manusia dengan fokus capaian pada lembaran-lembaran kertas nilai ujian. Lebih jauh, UN dikembalikan kepada khittahnya sebagai salah satu cara memetakan kualitas pembelajaran di suatu daerah, sehingga bisa digunakan sebagai dasar untuk peningkatan pendidikan di Indonesia.

Kebijakan pencabutan UN sebagai syarat kelulusan merupakan salah satu upaya desakratisasi atas UN sehingga tidak lagi dilihat sebagai high stake test. Anggapan UN sebagai high stake test, dianggap sebagai salah satu pemicu bagi sebagian pemangku kepentingan di bidang pendidikan untuk bersikap permissif terhadap kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan UN. Karena resikonya sangat tinggi, segala cara pun dilakukan agar lulus. Bukan hanya oleh siswa, tetapi juga guru, kepala sekolah, dinas pendidikan, dan pihak-pihak lain yang merasa akan dihakimi berdasarkan pencapaian nilai UN.

Tidak berhenti sampai di situ. Kemendikbud juga mendorong tingkat kejujuran di sekolah melalui kampanye positif pemberlakuan Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) serta Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

IIUN 2016: Integritas sebagai fondasi

Kombinasi kebijakan pencabutan UN sebagai syarat kelulusan dan kampanye pentingnya kejujuran di sekolah, terbukti meletakkan dasar yang kuat untuk memperbaiki tingkat kejujuran selama pelaksanaan UN. Hal ini terlihat dari peningkatan signifikan IIUN 2016, baik untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).


UN 2016 untuk jenjang SMP/MTs diikuti 4,4 juta siswa dari 60 ribu satuan pendidikan. Sekitar 72% satuan pendidikan mengalami peningkatan IIUN, dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah sekolah dengan nilai IIUN lebih dari 70 sebanyak 74% dari total sekolah pelaksana UN SMP 2016.

Peningkatan IIUN pada pelaksanaan UN 2016 patut diapresiasi. Hal ini menunjukkan menguatnya kesadaran sikap untuk mengakhiri praktik kecurangan dalam UN. Untuk mendukung tren positif ini, Kemendikbud terus mendorong peningkatan integritas sekolah, dengan memberikan apresiasi atas komitmen sekolah menegakkan kejujuran.

Tren positif lain adalah peningkatan signifikan sekolah pelaksana UNBK yang berjumlah sekitar 4.400 satuan pendidikan pada UN 2016, sementara tahun 2015 hanya 500 satuan pendidikan. Pelaksanaan UNBK bermakna penting karena dua hal utama: komitmen atas integritas sekolah, serta efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan UN. Rencananya, pelaksanaan UNBK akan diperluas untuk UN 2017. Saat ini sedang dilakukan proses pembahasan atas pelaksanaan UN 2017 pada internal Kemendikbud, bekerja sama dengan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Koreksi nilai UN 2016

Terjadi koreksi atas rata-rata nilai UN 2016, baik untuk jenjang SMP dan SMA. Koreksi rata-rata nilai UN 2016 terjadi sebesar 1,5 sampai dengan 4,0 poin untuk jenjang SMP dan sederajat. Rata-rata nilai UN SMP 2016 adalah 58,87, turun dari 62,18 pada tahun 2015. Untuk MTs (setara SMP), turun menjadi 59,06 pada tahun 2016 dari 60,97 pada tahun 2015. Koreksi lebih besar terjadi pada jenjang SMA/MA dan sederajat,
yaitu 6,9 poin, dari 61,93 pada tahun 2015 menjadi 55,30 pada tahun 2016.

Koreksi atas nilai UN 2016 bersamaan dengan terjadinya peningkatan signifikan atas IIUN, merupakan indikasi: hasil UN 2016 semakin memberi gambaran atas realitas capaian mutu pendidikan nasional. Gambaran realitas mutu pendidikan menjadi penting agar bisa dijadikan dasar pijakan dalam perumusan kebijakan peningkatan mutu. Hal ini sejalan dengan fungsi dasar UN sebagai peta dan timbangan kompetensi lulusan. Pada akhirnya, hal ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas proses pembelajaran dalam ruang-ruang kelas di pelosok negeri.

Sejalan dengan tujuan tersebut, Kemendikbud secara bertahap meningkatkan bobot soal UN. Pada UN 2016, proporsi soal adalah 40% pemahaman, 40% penerapan, dan 20% penalaran, dengan persentase soal kemampuan berpikir tingkat tinggi (high order thinking skill) mencapai sekita 10% (tahun 2015: ~1%). Selain itu, kisi-kisi soal UN 2016 juga diperlebar, tidak secara eksplicit menyebutkan indikator capaian. UN 2016 dirancang bukan untuk mendorong siswa menghafal jenis-jenis soal yang akan dikeluarkan, tetapi melatih kemampuan kognitif siswa untuk mengetahui suatu informasi, aplikasi, dan menalar. Berbeda dengan kisi-kisi UN 2015, tidak ada indikator soal yang spesifik. Hal ini akan mendorong siswa ke level menguasai materi bukan hanya hafalan. UN diharapkan juga bisa menjadi timbangan pendidikan siswa karena menunjukkan penguasaan dan pemahaman, serta kemudian memprosesnya menjadi sebuah informasi baru.

Setidaknya terdapat dua tujuan strategis yang ingin dicapai lewat kebijakan pencabutan UN sebagai syarat kelulusan.

Pertama, menggeser paradigma pembelajaran dari exam oriented menjadi berorientasi pada ketuntasan kompetensi. Kedua, pengejawantahan perilaku kejujuran dalam dunia pendidikan.

Kedua kebijakan tersebut diharapkan akan mendorong para pemangku kepentingan di sekolah agar mendukung siswa untuk tidak hanya menjalani proses pembelajaran guna menghadapi ujian. Lebih dari itu, sekolah juga berorientasi pada ketuntasan kompetensi pembelajaran. UN secara bertahap juga diarahkan untuk merangsang pencapaian kecakapan abad ke-21. Pada akhirnya, pelaksanaan kebijakan ini secara konsisten diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan nasional secara sistematis.

Penutup

Arah kebijakan terkait UN telah memberikan dasar yang kuat dalam peningkatan mutu pendidikan. Meskipun demikian, perlu diperhatikan efektivitas UN untuk mendukung peningkatan kualitas pembelajaran. Setidaknya terdapat dua catatan penting:


b. Peningkatan kualitas soal dalam UN perlu disesuaikan dengan perbaikan mutu proses pembelajaran. Tanpa perbaikan mutu proses pembelajaran, dikhawatirkan capaian mutu pendidikan yang diharapkan akan sulit terwujud. Lebih jauh lagi, peningkatan kualitas soal tanpa perbaikan mutu proses pembelajaran akan meningkatkan frustrasi pada peserta didik yang pada akhirnya akan kontraproduktif.
Lewat INAP, Indonesia Kejar Standar Kualitas Pendidikan Internasional

“Kerja belum selesai/ belum apa-apa/.”
Kutipan larik puisi Chairil Anwar ini ibarat metafora yang menggambarkan besarnya tantangan Kemendikbud dari waktu ke waktu.
Pembangunan dunia pendidikan di Indonesia menjelma menjadi “pekerjaan rumah” (PR) raksasa. Akan selalu ada masalah pendidikan yang menyita perhatian dan harus ditangani sungguh-sungguh.


Namun, Kemendikbud juga menyadari, keberanian untuk mengakui kelemahan justru bisa menjadi modal memperbaiki diri. Kita menerima kenyataan bahwa pencapaian hasil pendidikan nasional belum optimal, utamanya dalam bidang matematika, sains, dan bahasa. Itu artinya kita perlu merumuskan pendekatan lebih komprehensif dalam pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan upaya peningkatan kompetensi siswa.

Akan tetapi, muncul pertanyaan mendasar: Apa dasar pengambilan kebijakan tersebut? Bagaimana peta kompetensi siswa? Dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kompetensi siswa tersebut?

INAP

Atas dasar pertanyaan tersebut, Kemendikbud menginisiasi Indonesia National Assessment Program (INAP) untuk menyediakan peta kompetensi siswa dan faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan. INAP bisa menjadi dasar pijakan bagi pengambil kebijakan. INAP bisa menjadi dasar pijakan bagi pengambil keputusan untuk meningkatkan kompetensi siswa. Secara ringkas, INAP merupakan salah satu sistem pemantau mutu pendidikan secara sistematis dan masa periodik. INAP tidak hanya menyediakan peta mutu pendidikan, tetapi juga beberapa insight (wawasan, pengetahuan, pandangan) yang nantinya berguna dalam pengambilan kebijakan. Pada dasarnya INAP merupakan sistem yang digunakan untuk melakukan pemantauan atas capaian mutu pendidikan, dalam hal ini tingkat kompetensi siswa.

INAP kompetensi siswa bisa menjadi dasar bagi pengambil kebijakan dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan. INAP memungkinkan pengambil kebijakan dapat menggunakan data yang diperoleh dari INAP untuk melakukan diagnosis atas kekurangan dan kelebihan sistem pendidikan dan menyusun rencana untuk peningkatan kompetensi siswa.

Pelaksanaan INAP tidak hanya bermanfaat bagi pengambil kebijakan, tetapi juga semua pemangku kepentingan...
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Lewat INAP, Indonesia Kejar Standar Kualitas Pendidikan Internasional

(stakeholder) pendidikan, sebagaimana berikut:

a. Orang tua dapat mengetahui ketercapaian prestasi anaknya selaku peserta didik serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

b. Guru bisa memanfaatkan informasi untuk perbaikan proses pembelajaran.

c. Kepala sekolah dapat memanfaatkan informasi untuk merencanakan dan memperbaiki program manajemen sekolah, termasuk kegiatan pembelajaran.

d. Pemerintah (pusat, provinsi dan kabupaten/kota), Kemendikbud (Dikdasmen, PMPTK, LPMP), Kementerian Agama, Bappenas, Kementerian Keuangan, dinas pendidikan kabupaten/kota, parlemen, perguruan tinggi, pengembang kurikulum, dan lain-lain akan dapat memanfaatkan informasi dari INAP yang tersedia secara berkala, sistematis, dan ilmiah.

e. Masyarakat secara luas dapat memperoleh informasi secara berkala dan terbuka mengenai perkembangan mutu pendidikan baik di tingkat nasional maupun provinsi, atau kabupaten/kota, terlebih lagi dalam hubungannya dengan kebijakan yang sudah diambil (transparansi dan akuntabilitas).

Objek yang menjadi target pengukuran adalah pengetahuan dan keterampilan yang terdapat dalam kurikulum (curriculum focused) dan materi yang bersifat lintas kurikulum (cross-curricular element), dengan penekanan pada pemahaman konsep dan kemampuan aplikasi dalam kasus kehidupan yang dinamis. Pengetahuan dan keterampilan yang menjadi objek pengukuran adalah sebagai berikut:

a. Literasi membaca (reading literacy), meliputi: (i) kemampuan membaca (performative); (ii) kemampuan menggunakan bahasa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (functional); (iii) kemampuan mengakses pengetahuan dengan bahasanya (informational); dan (iv) kemampuan mentransformasi pengetahuan serta mengevaluasi (epistemic).

b. Literasi matematika (mathematical literacy), meliputi: (i) kemampuan mengetahui fakta dan prosedur matematika (knowing); (ii) kemampuan menggunakan konsep matematika untuk menjawab permasalahan matematis sederhana (using); dan (iii) kemampuan bernalar yang membutuhkan pemikiran matematis (reasoning).

c. Literasi sains (scientific literacy), mencakup kemampuan: (i) menggunakan pengetahuan atau konsep-konsep sains secara bermakna; (ii) mengidentifikasi masalah; (iii) menganalisis dan mengevaluasi data atau peristiwa; (iv) merancang penyelidikan; (v) menggunakan dan memanipulasi alat, bahan, atau prosedur; dan (vi) memecahkan masalah dalam rangka memahami fakta-fakta tentang alam dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan.

Selain pengukuran pada level pengetahuan dan keterampilan, INAP juga dilengkapi dengan penelitian atas latar belakang dari siswa pelaksana program INAP, guru, dan sekolah. Penelitian atas kajian ini nanti yang selanjutnya digunakan sebagai reasoning atas hasil pengukuran, sehingga dapat ditarik benang merah atas praktik dan/atau keadaan yang secara ilmiah berpengaruh pada skor INAP.

Hasil INAP 2012 dan pelaksanaan INAP 2016

Pelaksanaan INAP pada tahun 2012 dilakukan di Provinsi DI Yogyakarta dan Kalimantan Timur, dengan menggunakan metode sampling Stratified multistage sampling dengan Probability Proportional to Size di setiap Strata. Hasil skor adalah sebagai berikut:

Kita menerima kenyataan bahwa pencapaian hasil pendidikan nasional belum optimal, utamanya dalam bidang matematika, sains, dan bahasa. Itu artinya kita memerlukan pendekatan lebih komprehensif dalam pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan upaya peningkatan kompetensi siswa.
1. **Skor Matematika (INAP 2012)**

Skor kompetensi matematika memperlihatkan bahwa DI Yogyakarta dan Kalimantan Timur, masih berada di bawah rata-rata kemampuan internasional, hanya relatif lebih tinggi dari Thailand dan Republik Iran.

![Bar Chart: Skor Matematika (INAP 2012)]

2. **Skor Membaca (INAP 2012)**


![Bar Chart: Skor Membaca (INAP 2012)]
3. **Skor Sains (INAP 2012)**


![INAP 2012 Skor Sains Chart](chart.png)

**Penutup**

INAP merupakan salah satu model penilaian yang diinisiasi Kemendikbud untuk melengkapi model penilaian yang sudah tersedia saat ini. INAP tidak ditujukan untuk menganti sistem penilaian karena memiliki tujuan dan objek yang berbeda. Sistem penilaian pembelajaran (termasuk UN dan penilaian kelas) lebih mengukur ketuntasan pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku.

Pada sisi lain, INAP tidak tergantung pada jenis kurikulum, tetapi lebih pada tingkat kompetensi siswa. INAP lebih diarahkan untuk pemetaan dan diagnostik, sehingga bisa tertuju langsung pada masalah mutu pendidikan pada level kota/provinsi/nasional. Dengan begitu, diharapkan mutu pendidikan nasional dapat sejajar dengan tolok ukur (*benchmarking*) standar internasional.
KILASAN KINERJA 2016

Guru Pembelajar, Guru Berprestasi

Rendahnya kualitas guru selama ini menjadi salah satu hal yang sering dikeluhkan masyarakat.

Penyebabnya: ketidakhadiran guru di kelas, rendahnya kompetensi guru, sampai ketidakmampuan guru untuk mendidik dan menjadi teladan serta sumber inspirasi bagi murid-muridnya.


Selanjutnya, Kemendikbud menindaklanjuti hasil UKG dengan melakukan analisis untuk mendapatkan gambaran besar tentang sebaran kualitas guru di Indonesia. Analisis hasil UKG ini akan digunakan untuk menentukan intervensi pemerintah yang akan diterima guru melalui program Guru Pembelajar.

Pada 2016, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, Kemendikbud...

Dengan demikian, materi pelatihan tidak lagi seragam untuk semua guru, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan setiap guru sesuai mata pelajaran yang diampu. Perolehan skor UKG juga akan menjadi dasar pemilihan guru yang layak menjadi instruktur atau mentor. Hal ini sesuai dengan semangat “Guru Mulia Karena Karya”: guru dihargai karena prestasi dan kemampuannya.

Kemendikbud juga mulai meluncurkan situs dan aplikasi Guru Pembelajar Dalam Jaringan (on-line) untuk meningkatkan partisipasi guru. Pelatihan guru tidak lagi diikuti guru yang itu-itu saja dengan moda tatap muka, melainkan semua guru yang
mau belajar dan meningkatkan kemampuannya. Guru yang hanya memperoleh tiga hingga lima modul UKG dengan nilai di bawah kriteria capaian minimal (skor 55) boleh mengikuti moda daring ini. Adapun guru dengan enam hingga tujuh modul di bawah Kriteria Capaian Minimal (KCM) dapat mengikuti moda kombinasi (daring dan tatap muka), dan guru dengan delapan hingga sepuluh modul di bawah KCM diarahkan untuk mengikuti pelatihan dengan moda tatap muka.


Guna meningkatkan kesejahteraan guru, Kemendikbud juga menyediakan anggaran untuk tunjangan profesi guru. Tunjangan profesi disediakan bagi guru yang telah tersertifikasi dan menunjukkan profesionalisme dalam bekerja. Guru PNS yang belum memiliki sertifikat pendidik namun menunjukkan kinerja baik, juga dapat memperoleh tambahan penghasilan.


Lewat beberapa program ini, Kemendikbud optimis peningkatan kualitas pendidikan akan dapat diraih.
Menjadi seorang guru adalah tugas mulia mengingat peran guru selaku pelaku pendidikan. Tanpa guru berkualitas, sulit membayangkan mutu pendidikan nasional akan meningkat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, pendidikan formal, dan pendidikan menengah. Tidak heran dalam menjalankan tugasnya, guru dituntut untuk memiliki kompetensi yang memadai dan juga semangat untuk berkarya di bidangnya.


Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, khususnya pasal 36, 37, dan 38, dijelaskan bahwa mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja merupakan hak seorang guru. Dalam rangka memberikan apresiasi terhadap kinerja para guru dan tenaga kependidikan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) mengadakan pemilihan Guru dan Tenaga Kependidikan yang berprestasi dan berdedikasi dalam melaksanakan perannya.


Ada dua kategori yang termasuk dalam rangkaian pemilihan, yaitu kategori guru berprestasi dan guru berdedikasi. Guru berprestasi merupakan guru yang memiliki prestasi di bidang belajar mengajar, salah satunya dalam membuat karya berupa metode pembelajaran yang inovatif. Kriteria guru berprestasi berikutnya adalah guru yang memiliki kinerja melampaui standar yang telah ditetapkan oleh satuan pendidikan, mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional; menghasilkan karya kreatif atau inovatif yang diakui baik pada tingkat daerah, nasional dan atau internasional; dan secara langsung membimbing peserta didik hingga mencapai prestasi di bidang intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler.

Sementara guru berdedikasi merupakan guru yang berjuang mengajar di daerah terpencil. Mereka direkomendasikan oleh provinsi masing-masing berdasarkan dedikasi yang telah dilakukan selama mengajar di daerah tersebut. Terdapat total 34 guru berdedikasi yang masing-masing mewakili satu provinsi.

Kemudian para guru terpilih akan dikerjakan untuk melakukan praktek kerja lapangan di beberapa negara seperti Jepang, Finlandia, dan Australia untuk mendapatkan pengalaman di sekolah terbaik di negara-negara tersebut. Diharapkan, ketika kembali bertugas, mereka dapat menerapkan praktik baik saat kembali ke tempat tugas mengajarinya.

Pemilihan guru berprestasi ini bersifat kompetitif mencari yang terbaik. Masing-masing guru yang memenuhi persyaratan berhak mengikuti proses pemilihan tersebut. Pemilihan guru berprestasi juga dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel yang mengacu pada proses penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pemangku kepentingan pendidikan, baik secara akademik maupun administratif. Bentuk apresiasi terhadap karya guru seperti ini berdampak positif terhadap berbagai aspek tenaga pendidik, antara lain meningkatkan motivasi kerja guru dan mempengaruhi prestasi belajar mengajar.


Selain melaksanakan tugasnya sebagai pengajar dan pendidik, guru juga harus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Negeri ini tentu butuh sosok guru yang profesional, berdedikasi, dan mampu menjadi teladan bagi siswa-siswanya. Kemajuan sebuah bangsa ditentukan oleh kemampuan para pendidiknya untuk mengubah karakter generasi penerus yang menjadi anak didiknya.

Lewat bentuk-bentuk apresiasi terhadap kinerja seorang guru, diharapkan para guru akan selalu memiliki semangat dan motivasi memberikan karya terbaiknya untuk memajukan pendidikan Indonesia.
Bagaimana rasanya belajar seni langsung pada maestro yang telah puluhan tahun mengukuhkan dirinya pada salah satu bidang seni?
Kesempatan berharga itu sepertinya hanya bisa dirasakan oleh seniman yang telah berkarir bertahun-tahun. Namun, sejak tiga tahun lalu, Kemendikbud membuat terobosan program “Belajar Bersama Maestro (BBM)”.


Setiap maestro mengasuh 15 anak dari berbagai daerah dan latar belakang berbeda. Mereka mendapat kesempatan tinggal dan beraktivitas bersama di rumah serta sanggar para maestro.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Sepuluh Hari Bersama Maestro

dan beraktivitas bersama di rumah serta sanggar para maestro. Kemendikbud menggunakan strategi ini untuk memperkuat jati diri dan karakter bangsa dengan pendekatan seni budaya.


Membangun Kebudayaan, Memperkuat Karakter Bangsa

Pengaruh utama kebudayaan dalam pembangunan sangat terang terbaca dalam agenda prioritas Presiden-Wakil Presiden (Nawacita).

Secara berurutan, melalui pokok kedelapan dan kesembilan Nawacita, Presiden-Wakil Presiden berjanji untuk melakukan revolusi karakter bangsa, memperteguh kebhinekaan, dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Upaya mengembalikan pertimbangan kultural sebagai metode atau hulu pembangunan merupakan hal yang menggembirakan dan perlu mendapatkan dukungan banyak pihak. Upaya ini juga untuk meluruskan dan menghindari penafsiran keliru bahwa masalah budaya hanyalah masalah artefak-artefak tradisi dan buku-buku tentang peristiwa masa lampau.


Penguatan Pendidikan Karakter dan Modal Sosial Bangsa

Gerakan Seniman Masuk Sekolah (SMS) merupakan salah satu terobosan Ditjen Kebudayaan pada tahun 2016, guna memperkuat pendidikan karakter dan modal sosial bangsa. Gerakan ini mengintegrasikan pusat-pusat kesenian dan kebudayaan dengan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler di sekolah.
Lewat gerakan ini, para seniman daerah terlibat dalam kegiatan pembelajaran seni untuk pelajar di sekolah (tingkat SD-SMP) yang dilakukan di luar jam pelajaran. Para pelajar dapat memilih untuk mengikuti pelatihan seni rupa (lukis), seni tari, seni teater, dan seni musik. Pada tahun ini, tercatat 1.400 pelajar telah difasilitasi kegiatan berkeseniannya melalui gerakan SMS.


Selain SMS dan Belajar Bersama Maestro, Kemendikbud juga menyelenggarakan lokakarya guru sejarah. Tanpa pemahaman sejarah, pendidikan karakter akan pincang. Namun, metode pembelajaran sejarah yang menarik dan menstimulasi proses berpikir kritis para pelajar, merupakan tantangan khas bagi para guru sejarah. Atas dasar pemikiran itu, rangkaian lokakarya untuk guru sejarah tingkat SMA/SMK di seluruh Indonesia terus dilakukan Ditjen Kebudayaan. Pada tahun ini, sebanyak 1.150 guru sejarah telah
Perluasan Akses Masyarakat


Tidak hanya sebagai penikmat, para pelajar juga didorong untuk belajar membuat film. Melalui program bantuan Laboratorium Seni Budaya dan Film, Kemendikbud berkolaborasi dengan pihak swasta dalam pengadaan bangunan fisik dan sarana pendukung laboratorium seni budaya dan film pada jenjang SMA/SMK. Laboratorium ini dapat dimanfaatkan sebagai bioskop mini, tempat pertunjukan, serta studio untuk rekaman dan produksi musik dan film.


Bantuan fasilitas sarana kesenian tradisional, baik berupa alat musik maupun pakaian tari, juga terus diberikan kepada sekolah-sekolah di tingkat SD hingga SMA/SMK. Dalam kurun waktu 2015-2016, Kemendikbud telah memfasilitasi tidak kurang dari 695 sekolah penerima bantuan. Selain bertujuan untuk melestarikan seni tradisional, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan penghargaan terhadap kemajemukan seni budaya di Indonesia.

Penguatan Kebijakan yang Inklusif

Di desa-desa adat, masyarakat memelihara, mewariskan, dan mengembangkan tiga sistem yang saling berkaitan erat satu dengan yang lain. Ketiga sistem ini adalah sistem pengetahuan arsitektur bangunan melalui bangunan adat, sistem kepercayaan dan upacara tradisional melalui nilai-nilai budaya, serta sistem ekonomi berbasis budaya dan lingkungan melalui nilai-nilai sosial.

Namun, saat ini banyak bangunan adat yang mengalami kerusakan—baik karena faktor iklim, bencana alam, kondisi bahan...
Peran negara dalam upaya melestarikan eksistensi desa adat, terlebih dalam arus modernisasi, mutlak harus dilakukan

bangunan yang telah termakan usia, maupun karena perhatian yang luntur akan akar budaya karena tergerus arus modernisasi. Hal ini menyebabkan bangunan adat tidak dapat memenuhi fungsinya. Padahal, segala hal yang terjadi pada satu sistem dapat berdampak pada sistem lainnya. Maka, peran negara dalam upaya melestarikan eksistensi desa adat, terlebih dalam arus modernisasi, mutlak harus dilakukan. Hal ini disadari penuh oleh Kemendikbud yang terus bergerak cepat dalam merevitalisasi desa adat suku minoritas di Nusantara melalui dana bantuan Revitalisasi Desa Adat (RDA).


Kemendikbud juga terus mengintensifkan pemberdayaan dan peningkatan kualitas komunitas budaya yang mengalami degradasi dan keterbatasan dalam memenuhi hak dasar eksistensi dan ekspresi budayanya. Upaya ini melalui program Fasilitas Komunitas Budaya di Masyarakat (FKBM). Komunitas budaya yang dimaksud merupakan kesatuan sosial yang masih memegang tradisi, memiliki kesadaran wilayah sebagai kesatuan daerah teritorial, dan identitas sosial dalam berinteraksi berdasarkan nilai, norma dan aturan, serta memiliki berbagai aktivitas budaya menurut pola tertentu. Sasaran dari FKBM adalah keraton, komunitas adat, lembaga adat, sanggar, organisasi penghayat kepercayaan, lembaga

Desa adat Ayapo di Sentani Timur, Jayapura

Pada tahun 2017, kebijakan kebudayaan yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup kaum minoritas dan disabilitas sesuai rencana akan diperkuat.

**Peningkatan Komunikasi Budaya Antardaerah**


**Pembangunan Kebudayaan Tahun 2017**

Topi kertas berbentuk kerucut dan papan nama jumbo biasanya terlihat hilir mudik saat penerimaan siswa baru.

Kesibukan siswa baru ini sebelumnya dikenal dengan nama Masa Orientasi Siswa (MOS). Dalam pelaksanaan MOS, tidak terhindarkan munculnya perilaku berlebihan sang kakak kelas, bahkan menjerum pelanggaran dan perundungan (bullying). Apa lagi jika guru-guru di sekolah tidak ketat mengawasi pelaksanaan MOS.

Siswa baru sering kali diperlakukan tidak wajar oleh kakak kelasnya, seperti diminta memakai atribut yang tidak berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar, diberi hukuman, dan dituntut untuk menghormati senior secara berlebihan di sekolah. Berbagai pelanggaran dan kekerasan rawan terjadi pada MOS.


Untuk pertama kalinya, pelaksanaan PLS dari tingkat SD hingga SMA sebagian besar dilaksanakan pada 18 Juli 2016.
Kini, para siswa baru tidak perlu takut lagi menghadapi hari-hari pertama di sekolah baru. Kekerasan senior dan hukuman yang mempermalukan sudah ketinggalan zaman dan bahkan dihindari. Sudah waktunya siswa baru diperkenalkan pada asyiknya belajar di sekolah baru.

Sekolah lain yang berbeda tanggal permulaan tahun ajaran baru, dapat menyesuaikan tanggal penyelenggaraan PLS-nya.

Kemendikbud menetapkan sembilan hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan PLS. Antara lain, perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pengenalan atau orientasi sekolah hanya menjadi hak guru; dilarang melibatkan kakak kelas atau alumni sebagai penyelenggara; wajib melakukan kegiatan yang bersifat edukatif; dilarang bersifat perpeloncoan; dan dilarang memberikan tugas berupa kegiatan pembelajaran.


Siswa juga harus memakai atribut resmi dari sekolah. Sekolah wajib memberikan informasi lengkap dan mendapat izin tertulis dari orang tua siswa dalam kegiatan pengenalan ekstrakurikuler. Kegiatan ini wajib diawasi minimal oleh dua orang guru. Pihak sekolah juga dilarang melibatkan siswa senior atau alumni sebagai penyelenggara PLS ataupun pengenalan ekstrakurikuler.

Selain itu, hukuman fisik yang tidak mendidik dan tidak berhubungan dengan kegiatan di sekolah juga dilarang. Siswa baru dilarang menggunakan atribut atau mendapat penugasan yang tidak relevan dengan kegiatan belajar. Sekolah juga dilarang melakukan pungutan untuk kegiatan PLS dalam bentuk apapun.

Sekolah bisa dilaporkan ke portal “Sekolah Aman”. Sanksi akan diberikan kepada siswa, guru, atau kepala sekolah yang terbukti lalai, melakukan, atau membiarkan terjadinya hal-hal yang dilarang dalam PLS. Sekolah bisa mendapat sanksi teguran tertulis. Sedangkan kepada siswa yang melanggar dikenakan tindakan edukatif.

Kepala dinas pendidikan juga akan memberikan teguran tertulis kepada sekolah berupa penundaan atau pengurangan hak, pembebasan sementara kepada guru atau kepala sekolah yang melanggar peraturan. Kepala dinas juga dapat menghentikan bantuan pemerintah daerah atau melakukan penutupan sekolah.

Semarak Gerakan Hari Pertama Sekolah
Ada yang berbeda pada hari pertama masuk sekolah tahun ini yang sebagian besar berlangsung pada 18 Juli 2016.

Hari itu, 18 Juli 2016, gairah dan kegembiraan masyarakat dalam menyambut hari pertama sekolah terkam pada linimasa berbagai media sosial yang dipenuhi dengan tagar #HariPertamaSekolah.


Pada hari itu, muncul gerakan massif orang tua menyempatkan diri untuk mengantarkan anaknya ke sekolah dan berkenalan dengan guru. Kenyataan itu sangat menggembirakan, mengingat Gerakan Hari Pertama Sekolah baru menginjak tahun kedua.


(1) Mendorong aparatur sipil daerah untuk mengantarkan anak ke sekolah di hari pertama dan memberikan dispensasi dapat memulai kerja sesudah mengantarkan anaknya ke sekolah;
(2) mendukung sekolah dalam menyambut siswa baru dan berinteraksi dengan orang tua;
(3) menyampaikan pesan kepada instansi swasta di daerah agar memberi dispensasi bagi karyawan untuk dapat memulai kerja sesudah mengantarkan anaknya ke sekolah di hari pertama; dan
(4) menggunakan berbagai kanal komunikasi di daerah untuk menyebarkan pesan Hari Pertama Sekolah kepada publik luas.

Melalui gerakan ini, Kemendikbud ingin mengubah momen hari pertama sekolah menjadi momen yang menggembirakan dan menumbuhkan harapan. Momen hari pertama sekolah biasanya identik dengan kegelisahan para peserta didik yang takut membayangkan atmosfer kelas baru dan berjumpa dengan teman-teman dan guru baru yang belum dikenalnya. Rasa gelisah tidak hanya melanda para peserta didik, melainkan juga orang tua. Sejumlah pertanyaan muncul di kalangan orang tua, seperti: apakah mereka sudah cukup mengenal orang tua kedua (guru) bagi anak mereka di sekolah? Apakah mereka sudah mengetahui program yang dirancang untuk membentuk anak-anak mereka selama puluhan jam dalam seminggu? Apakah selama ini mereka mengabaikan kekhawatiran dan rasa takut anak-anak mereka dalam menghadapi hari pertama sekolahnya?


Mendapatkan dukungan

Sejak awal, Kemendikbud optimis Gerakan Hari Pertama Sekolah akan mendapatkan dukungan banyak pihak. Optimisme itu terbukti di lapangan. Sebuah pemandangan langka yang tiba-tiba menyeruak ke permukaan, Hari Pertama Sekolah tidak lagi dipandang sebagai sebuah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Semarak Gerakan Hari Pertama Sekolah

Kegiatan dalam kalender akademik belaka, tidak pula diperlakukan sebagai program atau kebijakan kementerian, melainkan dibangun menjadi sebuah gerakan bersama. Hari Pertama Sekolah menjadi perayaan bersama seluruh lapisan dan unsur masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari dukungan yang mengalir dari berbagai unsur.


Kalangan swasta pun seolah tak ingin ketinggalan momen kebersamaan ini. Sejumlah perusahaan swasta menyatakan diri mendukung serta mengizinkan karyawannya pergi mengantar anak-anaknya pada Hari Pertama Sekolah. Pengumuman dari perusahaan-perusahaan tersebut diantaranya ada yang melalui email resmi dalam jaringan kantor, poster, dan media lainnya.

Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga (Bindikkel) Kemendikbud bekerja sama dengan Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat telah membuat strategi sosialisasi sedemikian rupa dalam rangka Kampanye Hari Pertama Sekolah. Sosialisasi dimulai dari memasang spanduk di arus mudik jalan tol, banner dan poster di KRL commuter line, mengadakan kompetisi jurnalistik dengan tema Hari Pertama Sekolah, membuat iklan di radio, iklan video yang ditayangkan di berbagai televisi lokal se-Indonesia, hingga sosialisasi dalam jaringan melalui akun-akun dan portal Kemendikbud.

Tidak hanya itu, Direktorat Bindikkel juga menyusun dan menyediakan kit yang dibagikan kepada seluruh orang tua siswa pada 5.000 Satuan Pendidikan binaan yang tersebar di Indonesia. Kit tersebut diantaranya berisi buku saku “Menjadi Orang Tua Hebat” untuk tiap jenjang pendidikan anak, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA/SMK, SLB, dan pendidikan nonformal. Ada pula surat jadwal Pelibatan Orang Tua di Sekolah, lembar refleksi untuk orang tua, dan stiker sahabat keluarga.

Pembagian kit ini disambut baik di berbagai daerah karena selama ini belum pernah orang tua menerima buku yang dibuat khusus dari Kemendikbud untuk wali murid.

Gerakan Seniman Masuk Sekolah: Gempita Siswa Mempelajari Seni

Ilmu pengetahuan membangun peradaban, seni budaya menyempurnakannya.

Sebagai kementerian yang membawahi bidang pendidikan dan kebudayaan, Kemendikbud menyadari pentingnya membangun lingkungan sekolah yang mampu mengakomodasi semua potensi anak didik. Sekolah bukan hanya tempat untuk mempelajari ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan aspek keterampilan dan intelektualitas. Sekolah, sebagaimana gagasan Bapak Pendidikan Nasional Ki Hadjar Dewantara, selayaknya juga menjadi tempat bagi peserta didik untuk memperhalus budi pekerti dan membangun karakter.

Pendidikan kesenian di sekolah adalah wadah yang tepat untuk membangun karakter dan memperhalus budi pekerti. Dalam konteks yang lebih luas, kemajuan peradaban suatu bangsa bukan hanya dilihat dari pencapaiannya pada bidang ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi
Pelajaran seni di sekolah bagaikan oase bagi para pelajar. Mereka mendapatkan kegembiraan dan kesempatan merayakan imajinasi seluas-luasnya lewat pelajaran senirupa, seni tari, seni musik, seni sastra, dan seni peran (teater). Namun, apakah hal ini sudah cukup untuk merangsang kecintaan pelajar pada dunia seni?


Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan mutu pendidikan berbasis warisan budaya dan kearifan lokal. Hal ini juga merupakan salah satu strategi Direktorat Kesenian membuat generasi muda semakin menghargai kesenian lokal di daerah masing-masing. Harus ada ikhtiar memotivasi mereka untuk mencintai kesenian daerahnya sebagai bagian dari karakter yang mereka miliki.


Juga pada bidang seni budaya.

Pelajaran seni di sekolah bagaikan oase bagi para pelajar. Mereka mendapatkan kegembiraan dan kesempatan merayakan imajinasi seluas-luasnya lewat pelajaran senirupa, seni tari, seni musik, seni sastra, dan seni peran (teater). Namun, apakah hal ini sudah cukup untuk merangsang kecintaan pelajar pada dunia seni?


Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan mutu pendidikan berbasis warisan budaya dan kearifan lokal. Hal ini juga merupakan salah satu strategi Direktorat Kesenian membuat generasi muda semakin menghargai kesenian lokal di daerah masing-masing. Harus ada ikhtiar memotivasi mereka untuk mencintai kesenian daerahnya sebagai bagian dari karakter yang mereka miliki.


Juga pada bidang seni budaya.

Pelajaran seni di sekolah bagaikan oase bagi para pelajar. Mereka mendapatkan kegembiraan dan kesempatan merayakan imajinasi seluas-luasnya lewat pelajaran senirupa, seni tari, seni musik, seni sastra, dan seni peran (teater). Namun, apakah hal ini sudah cukup untuk merangsang kecintaan pelajar pada dunia seni?


Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan mutu pendidikan berbasis warisan budaya dan kearifan lokal. Hal ini juga merupakan salah satu strategi Direktorat Kesenian membuat generasi muda semakin menghargai kesenian lokal di daerah masing-masing. Harus ada ikhtiar memotivasi mereka untuk mencintai kesenian daerahnya sebagai bagian dari karakter yang mereka miliki.


asal pelajar. Hal ini sesuai tujuan GSMS yang tidak hanya ingin mengenalkan seni, tetapi juga menumbuhkan kecintaan terhadap seni itu sendiri.


Salah satu kesenian yang dipelajari dan diajarkan GSMS di Kota Bima adalah Tari Wura Bongi Monca (Tarian Tabur Beras Kuning). Tarian ini adalah salah satu jenis tarian selamat datang atau penyambutan tamu dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Penari menari secara berkelompok dengan gerakan lemah lembut sambil menaburkan beras kuning sebagai simbol penghormatan dan harapan. Tari Wura Bongi Monca merupakan tarian tradisional yang masih populer dan sering dipentaskan pada berbagai acara di Bima.


“Saya bangga sekali dengan adanya kegiatan ini, karena menumbuhkembangkan minat dan bakat para pelajar. Mudah-mudahan acara ini berkelanjutan tidak hanya sampai di sini, tetapi untuk tahun ke depannya dapat ditingkatkan lagi,” ujarnya penuh harap.
Suasana aula yang berada di lantai dua kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan malam itu terasa hangat. Beberapa tokoh inspiratif berkumpul sambil sesekali tertawa mendengarkan cerita satu sama lain.


BBM memberikan kesempatan peserta yang berasal dari berbagai daerah untuk selama kurang lebih seminggu tinggal, berinteraksi, dan belajar secara langsung dengan para mentor di Jakarta. Pilihan peserta pelajar SMA/SMK karena pada jenjang iniilah peserta dinilai sudah mulai berpikir tentang tanggung jawabnya kelak, termasuk jenis profesi yang akan mereka tekuni.

Melalui program ini, peserta diharapkan bisa mendapatkan inspirasi, pembelajaran, dan mengetahui proses secara langsung dari para mentor dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari. Para peserta harus dapat memetik pelajaran, bahwa kesuksesan tidak diraih seketika. Kesuksesan lahir lewat
doa, kerja keras, serta keberanian untuk kembali bangkit setiap kali terjatuh karena hambatan.

Para mentor adalah tokoh-tokoh inspiratif dari berbagai bidang, termasuk yang berlatar belakang pimpinan perusahaan besar, pebisnis, tokoh di bidang industri kreatif, dan sebagainya. Mentor tidak sekadar ditunjuk, namun harus bersedia terlibat langsung untuk membimbing para siswa yang terpilih sebagai peserta. Tidak sedikit syarat dan ketentuan yang melekat dalam peran mentor tersebut. Antara lain, harus bersedia meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan peserta, bersedia rumahnya menjadi tempat tinggal bagi peserta selama program, bersedia untuk melibatkan dan mengajak peserta dalam kegiatan harian yang produktif dan membangun, berbagi cerita, ide, dan pengalaman, bersedia terlibat sepenuhnya dalam program sesuai dengan waktu yang ditentukan, serta membantu membuka jejaring untuk peserta di masa mendatang.

Tak mudah melibatkan tokoh-tokoh di berbagai bidang untuk mau ambil bagian di tengah-tengah rutinitas kesibukan mereka.

Kegiatan BBM pada tahap awal ini melibatkan sebelas tokoh dari berbagai profesi, yaitu Billy Boen, Djohan Pinarwan, Edward Suhadi, Gustav Aulia, Iphho Santosa, Jamil Azzaini, Muhammad Assad, M Chozin Amirullah, Nila Tanzil, Tri Mumpuni, dan Yoris Sebastian.

**Tiga nilai utama**

Kegiatan BBM memiliki tiga nilai utama, yaitu kegigihan, pendidikan, dan kepemimpinan. Ketiga nilai ini disatukan dalam satu payung besar, yaitu keteladanan. Harapannya, para peserta dapat belajar ketiga nilai tersebut dengan cara
meneladannya secara langsung dari para mentor. Kegiatan BBM 2016 diawali dengan pembekalan dari tim fasilitator tentang pengembangan diri, kepemimpinan, pemahaman lintas budaya dan interaksi antarpeserta. Setelah itu, selama tiga hari peserta akan mengikuti kecandaran Mentor, tinggal bersamanya, dan belajar memaknai spirit hidup, kepemimpinan, kreativitas, integritas, dan ketekunan yang telah mengantarkan para tokoh menuju tangga kesuksesan.

Salah satu mentor inspiratif adalah Tri Mumpuni. Ia dikenal sebagai salah seorang tokoh energi Indonesia yang berhasil mengembangkan kemandirian masyarakat di daerah terpencil melalui Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Tri Mumpuni menceritakan sejak tahun 2005 ia dan keluarganya terbiasa menerima kunjungan siswa/mahasiswa asing yang ingin melihat langsung pengalamannya membantu masyarakat di daerah terpencil lewat program PLTMH.

Namun, menerima dan membimbing siswa SMA/SMK dari daerah berbeda, apa lagi dari daerah pedesaan di luar Jawa, merupakan pengalaman baru dan menarik bagi keluarganya. Banyak kebiasaan-kebiasaan yang berbeda, termasuk untuk soal sederhana seperti makan malam bersama khas keluarga perkotaan. Menggali latar belakang asal keluarga peserta pun tak kalah menarik, terutama mendengar cerita hidup dan kecanduran mereka hingga berhasil terpilih mengikuti program ini.

“Saya hanya bisa berharap agar para peserta yang sudah dititipkan ke saya, bisa belajar mengatur waktu mereka dengan baik. Belajar bagaimana memanfaatkan waktu mereka yang singkat dengan produktif,” Ujar Tri Mumpuni.

Lain lagi cerita Ippho Santosa, salah seorang motivator sukses Indonesia yang juga terlibat sebagai mentor. Ia justru belajar dan menangkap pesan yang disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada saat pembukaan kegiatan. Seperti cerita tentang peran HOS Cokroaminoto dalam mempengaruhi begitu banyak orang dalam hidupnya.


Audry Maura, salah seorang peserta asal Kalimantan Barat percaya, setiap anak di negeri ini memiliki berbagai impian. Maura sendiri memiliki impian besar untuk bertemu beberapa tokoh Indonesia, dan tanpa disangka-sangka mimpinya terwujud lewat kegiatan BBM 2016.

“Seperti yang disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, anak daerah mengalami kesulitan untuk
memiliki banyak jaringan agar dapat bertemu dengan tokoh-tokoh sukses Indonesia. Atas dasar itulah kegiatan Belajar Bersama Mentor hadir untuk memutus gap antara kami yang ingin belajar langsung bersama para tokoh sukses,” kata Maura.


Kegiatan BBM merupakan kesempatan besar bagi anak-anak dari berbagai penjuru negeri untuk mengenal keberagaman, dunia kerja, berjuang membangun jejaring, dan berusaha menggapai impianinya dengan sepenuh hati. Impian dan harapan anak-anak di seluruh negeri harus terus berlanjut, sebagaimana kegiatan BBM ini. Ya, mimpi memang harus diraih dan diperjuangkan.
Gerakan Literasi Nasional
Menuju Masyarakat Sadar Literasi


Melalui Gerakan Literasi Nasional (GLN), Kemendikbud memfasilitasi dan mendukung proses penumbuhkembangan budaya literasi pada ekosistem pendidikan, mulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Semua itu dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat sebagai upaya
mengkatkkan kualitas hidup. Untuk mencapai tujuan tersebut, GLN berfokus pada lima pilar: peningkatan kapasitas pelaku/ pegiat literasi, penyediaan bahan bacaan, penguatan kelembagaan, pelibatan publik, serta publikasi dan sosialisasi. GLN memayungi segala bentuk ikhtiar dan inovasi dari unit-unit Kemendikbud terkait literasi, yang menyasar pada keluarga, sekolah, dan masyarakat.

**Gerakan literasi dalam keluarga**

Keluarga merupakan sekolah pertama dan utama bagi anak. Oleh karena itu, peran orang tua dalam memberikan keteladasan dan menanamkan kecintaan anak pada aspek literasi harus dioptimalkan. Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga (Dir. Bindikkel) Kemendikbud dalam buku saku pendidikan orang tua yang disusunnya dan laman Sahabat Keluarga, menyoroti pentingnya literasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pengasuhan anak.

Pada buku saku berjudul “Menjadi Orangtua Hebat” untuk keluarga dengan anak usia dini, orang tua dijelaskan bahwa buku yang disusunnya dan laman Sahabat Keluarga, menyarankan orang tua untuk menambah referensi orang tua.

**Gerakan literasi di sekolah**


Sebagai pedoman pelaksanaan di lapangan, Ditjen Dikdasmen telah menerbitkan desain induk, buku saku, dan panduan pelaksanaan untuk tiap jenjang pendidikan. Ditjen Dikdasmen juga telah menyiapkan informasi tersebut melalui serangkaian lokakarya bagi kepala sekolah. Lokakarya tersebut memberikan wawasan terkait pengadaan dan pengelolaan sudut baca, pojob literasi, dan lingkungan kaya literasi dalam mendukung pelaksanaan kegiatan 15 menit membaca sebelum jam pembelajaran.


“Gerakan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri,” kata Dirjen Dikdasmen Hamid Muhammad.

Hasil pemantauan pelaksanaan GLS sepanjang tahun 2016 mencatat sebanyak 5.360

“Gerakan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri”

[ Dirjen Dikdasmen - Hamid Muhammad ]
sekolah (lintas jenjang pendidikan) telah melakukan peningkatan kapasitas dan menjalankan kegiatan 15 menit membaca. Angka tersebut di luar sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan program literasi sebelum GLS diluncurkan pada tahun 2016.

**Pedoman penjenjangan buku nonteks pelajaran**


Penyusunan pedoman penjenjangan buku bertujuan untuk membuat perubahan dalam proses pembelajaran siswa dan dunia perbukuan. Kehadirannya sangat ditunggu sejumlah pemangku kepentingan, antara lain Puskurbuk Kemendikbud, penerbit, dan sekolah.


Penjenjangan buku merupakan hal yang signifikan karena berbagai manfaat yang dimilikinya. Antara lain, membuat anak menikmati bacaan, menjadikan anak pembaca mandiri, dan mempermudah guru dan orang tua dalam mengikuti perkembangan keterampilan membaca siswa/anak. Berbagai manfaat tersebut jelas tidak hanya dapat dinikmati pada ranah pendidikan formal, namun juga nonformal.

**Gerakan literasi dalam masyarakat**


Terkait dengan budaya baca ini, Dit. Bindiktara terus melakukan pengadaan buku...
## Festival Literasi 2016

<table>
<thead>
<tr>
<th>KEGIATAN</th>
<th>KETERANGAN</th>
<th>PESETA</th>
<th>LOKASI &amp; TANGGAL</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>TBM DAN KAMPUNG LITERASI</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Pameran Karya/Produk TBM dan Kampung Literasi</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Lokakarya penulisan, mendongeng, keterampilan origami, kerajinan daur ulang</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dialog/Sarasehan Literasi</td>
<td>Diskusi tentang Sastrawan Palu : Perkembangan Literasi di Sulawesi Tengah dari dulu hingga kini. Bersama Maman Suharman (ILC), Teguh Sudarisman, Dewi Lestari dan Riri Riza</td>
<td>Lebih dari 1.000 peserta</td>
<td>Palu, 18-20 Okt</td>
</tr>
<tr>
<td>Bedah Buku dan Peluncuran 100 buku Vokasi Menulis</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>SD</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional (LCSPN)</td>
<td>Mengusung tema &quot;Bangsa yang Maju adalah bangsa yang menghargai budayanya.&quot; Meliputi lomba lukis, cipta puisi, dan membatik</td>
<td>102 siswa dari 34 provinsi</td>
<td>Jakarta, 4-7 Okt</td>
</tr>
<tr>
<td>SMP</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional (LCSPN)</td>
<td>Mengusung tema &quot;Bangsa yang Maju adalah bangsa yang menghargai budayanya.&quot; Meliputi lomba lukis, cipta puisi, dan membatik</td>
<td>136 siswa dari 34 provinsi</td>
<td>Jakarta, 5-7 Okt</td>
</tr>
<tr>
<td>SMA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI)</td>
<td>3 bidang yang dilombakan: (1) Sains dan Teknologi, (2) Matematika dan Rekayasa, dan (3) Ilmu Sosial dan Humaniora</td>
<td>190 siswa</td>
<td>Jakarta, 2-7 Okt</td>
</tr>
<tr>
<td>SMK</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Lomba Bahasa</td>
<td>Lomba debat bahasa Indonesia dan bahasa asing: Inggris, Jerman, Prancis, Korea, Jepang, dan Mandarin</td>
<td>372 Siswa</td>
<td>Pangkal Pinang, 10-15 Okt</td>
</tr>
<tr>
<td>KOMUNITAS LITERASI NON-TBM</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Lomba Membaca dan Meringkas Cerita Naratif untuk Anggota/murid komunitas literasi</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Palu, 20 Okt</td>
</tr>
<tr>
<td>Lomba Meringkas dan Mengonversi Teks untuk Fasilitator/pegiat literasi</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Palu, 21 Okt</td>
</tr>
<tr>
<td>Lomba Merefleksi Bahan Bacaan Literasi untuk Penumbuhan Budi Pekerti untuk Fasilitator &amp; murid komunitas literasi</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Palu, 22 Okt</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Sebagai jembatan menuju masyarakat sadar literasi, GLN berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup seluruh anak bangsa melalui ruang-ruang keluarga, kelas, dan masyarakat yang kondusif dalam menumbuhkan budaya literasi.

Sementara itu Heni Wardatur Rohmah, Ketua FTBM DIY, mengungkapkan, “Setiap kegiatan yang saya ikuti memberi banyak manfaat. Pengembangan keilmuan, bekal dalam mengelola TBM serta jeearing baru adalah manfaat besar yang saya peroleh.”

Heni sebagai utusan FTBM DIY mengikuti pameran karya/produk TBM yang menginformasikan kegiatan kewirausahaan yang dilakukan oleh TBM di Yogyakarta. Heni juga menjadi narasumber dalam sesi berbagi tentang pemanfaatan media sosial untuk TBM.

“Saya berharap sinergi dari semua pihak bisa segera terwujud. Pendidikan formal dan nonformal, dukungan pemerintah, keterlibatan masyarakat akan makin membangun Gerakan Literasi Nasional menjadi kegiatan yang pada akhirnya membuat Indonesia menjadi lebih baik,” ujar Heni penuh harap.

Jalan menuju masyarakat peduli literasi adalah jalan panjang dan berlalu. Untuk meraihnya, perlu strategi yang tepat dan keterlibatan semua pihak. Sebagai jembatan menuju masyarakat sadar literasi, GLN berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup seluruh anak bangsa melalui ruang-ruang keluarga, kelas, dan masyarakat yang kondusif dalam menumbuhkan budaya literasi.
Pendidikan Keluarga Sebagai Gerakan Bersama

Menjalani kehidupan berkeluarga dan menjadi orang tua bukanlah perkara mudah.


Keberadaannya di lingkungan Kemendikbud memang terbilang paling baru. Namun, sejak dibentuk pada akhir 2015, direktorat baru ini bekerja keras memunculkan berbagai program inovatif.
Program-program tersebut bertujuan mewujudkan ekosistem pendidikan yang kondusif bagi penumbuhkembangan karakter dan budaya berprestasi anak. Sesuai tujuan pembentukannya, berbagai program tersebut berpusat pada penguatan kemitraan yang aktif dan positif antara tiga elemen: keluarga, sekolah, dan masyarakat.


Bukan perkara mudah untuk mewujudkan keberhasilan program pendidikan keluarga. Untuk mencapai tujuan tersebut, pada tahap awal program pendidikan keluarga diimplementasikan pada 5.000 satuan pendidikan (PAUD, SD, SMP, SMA/SMK, dan Pendidikan Nonformal) yang tersebar di 100 kabupaten/kota di 34 provinsi. Implementasi pada satuan pendidikan rintisan ini nantinya diharapkan dapat memberikan imbas positif bagi satuan pendidikan lainnya.


Orang tua sebagai pendidik


Buku satu “Menjadi Orang Tua Hebat” dikemas dalam empat versi untuk keluarga anak berdasarkan rentang usia: usia dini, usia SD, usia SMP, dan usia SMA/SMK. Buku satu ini merupakan bagian dari kit yang dibagi kepada semua orang tua siswa di 5.000 satuan pendidikan rintisan pada Hari Pertama Sekolah. Kolaborasi Kemendikbud dan komponen masyarakat, individual maupun lembaga, nyata terlihat dalam penyusunan buku-buku ini. Pada halaman akhir buku-buku ini terdapat daftar nama pakar dan lembaga (termasuk untuk anak berkebutuhan khusus), lengkap dengan informasi kontak yang dapat dihubungi jika orang tua atau sekolah membutuhkan konsultasi lebih lanjut.

Sedangkan “Pengasuhan Positif” dan “Mendidik Anak di Era Digital” merupakan dua topik yang mendesak untuk disebarkan berkaitan dengan semakin meningkatnya skala dan bentuk kekerasan yang terjadi, baik kekerasan verbal, fisik, maupun seksual. Topik-topik dalam buku tersebut menitikberatkan pada pendekatan preventif. Kemendikbud telah menghimpun materi substansi buku saku
“Mengimplementasikan program pendidikan keluarga adalah sebuah tantangan besar untuk mengubah wajah bangsa kita, 20 hingga 30 tahun ke depan. Kalau tidak sekarang, kapan lagi?”

[Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas - Harris Iskandar]
Mengukir Prestasi, Membangun Karakter, dan Merekatkan NKRI

Upaya membentuk generasi muda berprestasi bisa dilakukan lewat ajang lomba sains, olah raga, dan seni.


Ribuan siswa SD, SMP, dan SMA dari 34 Provinsi berkompetisi dengan gembira sambal bertemu sesama pelajar dari daerah lain. Bukan hanya sekadar lomba atau festival, OSN, O2SN, dan FLS2N bertujuan untuk membina karakter siswa yang penuh integritas, sportif, dan kreatif.

Para siswa yang berkompetisi pada ketiga kegiatan tersebut adalah mereka yang lolos seleksi di daerah masing-masing. Ajang lomba tingkat nasional ini bertujuan memunculkan juara-juara terbaik. Nantinya, mereka akan mewakili Indonesia dalam berbagai ajang festival dan olimpiade pelajar tingkat internasional.

Olimpiade Sains Nasional (OSN)
Sebanyak 1.579 siswa berkumpul di Palembang, Sumatera Selatan, untuk mengikuti ajang Olimpiade Sains Nasional (OSN) XV pada 15-21 Mei 2016. Olimpiade pelajar ini mengusung tema “membangun integritas melalui prestasi sains.” Para pelajar yang mewakili 34 provinsi tersebut...
Pelaksanaan 3 Perlombaan 2016

<table>
<thead>
<tr>
<th>ACARA</th>
<th>LOKASI</th>
<th>TANGGAL</th>
<th>JUMLAH PESERTA</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Olimpiade Sains Nasional (OSN)</td>
<td>Palembang, Sumatera Selatan</td>
<td>15-21 Mei 2016</td>
<td>1.579 siswa</td>
</tr>
<tr>
<td>Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)</td>
<td>DKI Jakarta</td>
<td>24-30 Juli 2016</td>
<td>4.126 siswa</td>
</tr>
<tr>
<td>Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)</td>
<td>Manado, Sulawesi Utara</td>
<td>28 August - 3 September 2016</td>
<td>2.945 siswa</td>
</tr>
</tbody>
</table>

sangat antusias untuk berlomba menjadi yang terbaik di bidang sains.

Nuansa penuh semangat dari para siswa memenuhi Palembang Sport Convention Center (PSCC) saat acara pembukaan OSN 2016. Mendikbud dan Gubernur Sumatera Selatan turut hadir pada acara pembukaan tersebut untuk memberi dukungan langsung kepada ribuan siswa berprestasi ini.

Dengan tema tersebut, Kemendikbud berharap para peserta tidak hanya terfokus untuk berkompetisi dan meraih juara, namun juga bertekad memiliki integritas yang kokoh. Dalam sambutannya, Mendikbud menyampaikan, "Kebiasaan yang dapat ditumbuhkan lewat sains, dan mungkin adalah yang terpenting, yaitu kebiasaan menegakkan integritas. Kejujuran dalam sains sangat dijunjung tinggi.”


Pelaksanaan 3 Perlombaan 2016

Selaras dengan tema “Generasi Sportif, Bangsa Produktif”, diharapkan O2SN tahun ini mengasah jiwa sportif dan persatuan dari para peserta yang berasal dari 34 provinsi tersebut.

Tahun ini, panitia O2SN melombakan 10 cabang yaitu catur, atletik, bulu tangkis, tenis meja, karate, pencak silat, renang, bola voli, boce, dan balap kursi roda. Komitmen menciptakan pendidikan inklusif juga terus dijalankan, dengan memfasilitasi siswa-siswa PKLK untuk turut mengasah sportivitas mereka dalam O2SN 2016. Sekitar 400 siswa-siswa PKLK dapat mengikuti 5 cabang olahraga, yaitu catur, atletik, bulu tangkis, boce, dan balap kursi roda.


Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)

Olimpiade Sains Nasional 2016

| No. | CABANG LOMBA       | SD | SMP | SMA |
|-----|--------------------|----|-----|-----|------|
| 1   | Matematika         |    |     |     | ●    |
| 2   | IPA                |    | ●   |     | ●    |
| 3   | IPS                |    |     | ●   |     |
| 4   | Informatika/Komputer |   |     |     | ●    |
| 5   | Fisika             |    |     | ●   |     |
| 6   | Kimia              |    |     | ●   |     |
| 7   | Biologi            |    |     | ●   |     |
| 8   | Kebumian           |    |     | ●   |     |
| 9   | Geografi           |    |     | ●   |     |
| 10  | Astronomi          |    |     | ●   |     |
| 11  | Ekonomi            |    |     | ●   |     |


Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)

<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>CABANG LOMBA</th>
<th>SD</th>
<th>SMP</th>
<th>SMA</th>
<th>SMK</th>
<th>PKLK</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Menyanyi Solo</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Vocal Group</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Musik Tradisional</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Gitar Solo</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Pianika</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Piano Klasik</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Tari Kreasi</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Tari Tradisional</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Pantomim</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Cipta dan Baca Puisi</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Pidato Bahasa Indonesia</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Debat Bahasa Indonesia</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Cipta dan Baca Cerpen</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Story Telling</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Baca Alqur’an</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Monolog</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Gambar Bercerita</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Melukis</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>Desain Poster</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>Desain Grafis</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>Seni Kriya</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Keterampilan Menganyam</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>Teater</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Film Pendek</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
<td>●</td>
</tr>
</tbody>
</table>


FLS2N, yang merupakan festival dan lomba seni paling bergengsi di kalangan pelajar nasional, sangat dinantikan kembali tahun depan. Pelaksanaan FLS2N 2017 dipercayakan kepada Nusa Tengara Timur sebagai tuan rumah.

Reformasi Birokrasi Internal (RBI): Menciptakan Birokrasi Efektif dan Terpercaya

Menyadari stigma tersebut, Kemendikbud terus berupaya melakukan Reformasi Birokrasi Internal (RBI).

Program ini adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih mampu menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien. Reformasi birokrasi dilakukan untuk memenuhi pelayanan publik yang optimal dengan mengimbangi perkembangan teknologi dan informasi yang pesat, sehingga birokrasi bisa menjadi transparan, efisien, dan cepat. Semua ini demi mencapai apa yang disebut dengan istilah Good Governance.

Dalam RBI, langkah awal dalam melakukan reformasi birokrasi yang dilakukan Kemendikbud adalah mengidentifikasi permasalahan internal yang dihadapi. Permasalahan umum yang ditemukan dalam internal Kemendikbud yaitu tumpang tindih tugas dan fungsi beberapa unit kerja, kurang optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi karena beban kerja yang tidak berimbang antarunit, beban kerja pelaksana teknis yang bervariasi, dan adanya fungsi kebudayaan yang semula ditangani Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Melihat permasalahan tersebut, Kemendikbud merumuskan delapan area sebagai fokus RBI. Delapan area tersebut adalah:
1. manajemen perubahan,
2. penguatan pengawasan,
3. penguatan akuntabilitas kerja,
4. penguatan kelembagaan,
5. penguatan tata laksana,
6. penguatan sistem manajemen SDM aparatur,
7. penguatan undang-undang, dan
8. peningkatan kualitas layanan publik.

Pada setiap area tersebut, Kemendikbud telah melakukan upaya perbaikan reformasi yang konkrit, efisien, dan akuntabel. Pelaksanaan manajemen perubahan berupa perencanaan arah kebijakan birokrasi dalam kepemimpinan, pemetaan kebutuhan, dan penggerak. Kegiatan yang telah dilakukan adalah membentuk Tim Manajemen Perubahan untuk merumuskan budaya kerja yang dibutuhkan dan kesenjangan internal.

Selain itu, tim ini juga menyusun strategi manajemen perubahan, strategi komunikasi, sosialisasi melalui poster atau infografis, penerapan budaya kerja, dan evaluasi.

Untuk penguatan pelaksanaan pengawasan, Kemendikbud telah membentuk Unit Pengawasan Gratifikasi. Tim ini membuat sistem "whistle blower" dan berhasil mendukung Kemendikbud mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama dua tahun berturut-turut. RBI juga mendukung penguatan antikorupsi yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan serta efektivitas pengelolaan keuangan negara, meningkatkan status opini BPK, dan menurunnya
penyalahgunaan wewenang.


Yang terakhir namun sangat penting adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik melalui layanan peserta didik, layanan satuan pendidikan, layanan substansi pendidikan, layanan guru dan tenaga kependidikan, layanan pendidikan orang tua dan keluarga, serta layanan budaya dan kebahaasaan. Untuk itu Kemendikbud terus berupaya melakukan penguatan Unit Layanan Terpadu (ULT).


RBI dengan pendekatan penguatan pelaku pendidikan dan kebudayaan, peningkatan mutu dan akses, dan pengembangan efektivitas birokrasi, menjadi jalan dalam memperbaiki tata kelola dan pelibatan publik. Kini masyarakat tidak perlu enggan berurusan dengan birokrasi di Kemendikbud, karena proses bertele-tele sudah menjadi cerita lama, dan telah digantikan dengan teknologi serta dedikasi.
Pengembangan Tata Kelola Kemendikbud Menjawab Tantangan Zaman

Kemendikbud berusaha maksimal memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Tujuannya agar tata kelola Kemendikbud menjadi lebih efektif dan efisien dalam menjalankan amanah pemerintahan. Dalam perkembangannya, tata kelola di lingkungan Kemendikbud saat ini tidak lagi bersifat manual dan telah memanfaatkan kemajuan TIK.

Sejak 2011 hingga saat ini, satu per satu sistem berbasis elektronik dibuat dan disempurnakan, untuk mempermudah tata kelola administrasi dan manajemen pegawai, persuratan, hingga keuangan. Upaya ini merupakan salah satu wujud Reformasi Birokrasi Internal (RBI), langkah awal dari cita-cita besar Presiden Joko Widodo untuk kebangkitan bangsa pada era digital. Presiden Jokowi pernah menegaskan untuk mewujudkan pemerintahan terbuka, dibutuhkan perubahan pola pikir di kalangan birokrasi pemerintahan.


1. **Simpeg (Sistem Informasi dan Manajemen Kepegawaian)**

   “Rekrutmen Hingga Asesmen Pegawai yang Objektif, Transparan, dan Akuntabel”

   Kemendikbud meyakini bahwa SDM yang tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), merupakan aset penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian. Oleh karenanya, kualitas PNS harus terus dijaga dan ditingkatkan, bahkan sejak masa rekrutmen. Secara khusus, Biro Kepegawaian Kemendikbud dipercaya melaksanakan tugas terkait kepegawaian di lingkungan Kemendikbud.

   Biro Kepegawaian telah memanfaatkan TIK dalam menciptakan Simpeg (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian), yang di dalamnya terdapat seluruh data kepegawaian. Simpeg dikembangkan untuk mengawal kualitas dan kinerja pegawai—sejak dari proses rekrutmen, penilaian kinerja, pengelolaan mutasi, hingga asesmen pegawai secara objektif, transparan, dan akuntabel.

2. **Simkeu (Sistem Informasi dan Manajemen Keuangan)**

   “Akses Data Keuangan Realtime yang Cepat dan Tepat”

   Penganggaran dan realisasi daya serap secara real-time (seketika) menjadi perhatian khusus Kemendikbud. Apalagi upaya untuk mengintegrasikan data keuangan dari seluruh satuan kerja (satker) di lingkungan Kemendikbud, sungguh pekerjaan yang memakan banyak waktu dan tenaga. Oleh karenanya, Biro Keuangan Kemendikbud meluncurkan Simkeu (Sistem Informasi dan Manajemen...
Keuangan) yang berisi data anggaran seluruh unit utama dan satker sampai dengan digit terakhir. Simkeu memungkinkan pimpinan memantau realisasi anggaran secara online dan real-time, sehingga memungkinkan pengambilan kebijakan terkait anggaran dengan cepat dan tepat.


3. E-office (Electronic Office)
“Kirim, Baca, Disposisi Surat dalam 24 Jam”


Dampak nyata yang dirasakan adalah tradisi baik mengurangi kebutuhan penggunaan kertas (paperless), media penyimpanan arsip fisik, dan kerepotan perangkatan pengganda dokumen. Pengelolaan surat secara elektronik juga mengurangi resiko kehilangan surat, dan mempermudah pencarian surat. Agar tingkat kerahasiaan informasi juga lebih terjamin, aplikasi e-office mengatur hanya pihak yang berhak mengetahui informasi tersebutlah yang bisa mengaksesnya.


4. E-planning (Electronic Planning)
“Demi Perencanaan Kemendikbud yang Berkualitas dan Akuntabel”

Beberapa masalah yang dihadapi selama ini dalam proses perencanaan di Kemendikbud antara lain penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang reaktif dan pengendalian dalam proses penyusunan RKA. Oleh karena itu, Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri (PKLN) sedang mengembangkan sistem e-planning. Ini sebuah upaya untuk memastikan proses perencanaan Kemendikbud terintegrasi dengan kebijakan dan program prioritas, serta menghasilkan dokumen anggaran yang akuntabel.

Dengan e-planning, penyusunan rencana kerja dan anggaran dapat dilakukan via daring dan terintegrisi, dengan menggunakan pusat data (database) tunggal. Dengan demikian, seluruh siklus perencanaan dan penganggaran dapat terkendali dan dianalisa dalam waktu yang singkat. Pengembangan e-planning bukan semata pengembangan “aplikasi berbasis TIK”, tetapi merupakan solusi peningkatan kualitas perencanaan yang menuntut komitmen, perubahan perilaku, dan pengembangan kapasitas SDM.

5. Simproka (Sistem Pemantauan dan Pengendalian Luaran Program dan Kegiatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

“Memantau Capaian Luaran Program Cukup dengan Simproka”

Simproka tidak hanya memantau dan mengendalikan kegiatan internal, namun juga bidang pendidikan dan kebudayaan, meskipun di luar Kemendikbud, seperti:

a. Rencana Aksi Nasional (RAN), seperti RAN Janji Presiden dan Wakil Presiden; dan RAN Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM);

b. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), seperti Goal 1: Tanpa Kemiskinan; Goal 2: Tanpa Kelaparan; Goal 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera; Goal 4: Pendidikan Berkualitas; dan Goal 5: Kesetaraan Gender.


6. Simtrada (Sistem Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Dana Transfer ke Daerah Bidang Pendidikan)


Operator dari masing-masing dinas memasukkan data realisasi yang terdiri terdiri: 1) BOP PAUD yang dikelola oleh Ditjen PAUD dan Dikmas; 2) BOS SD, SMP, SMA, dan SMK serta DAK SD yang dikelola oleh Ditjen Dikdasmen; dan 3) TPG dan Tamsil yang dikelola oleh Ditjen GTK. Selanjutnya melalui mekanisme integrasi layanan web, Simtrada mentabulasi dan mengagregasi data yang ditarik secara daring dari aplikasi-aplikasi pelaporan realisasi DAK bidang Pendidikan di lingkungan Kemendikbud.

Simtrada sepenuhnya siap melakukan integrasi data untuk memantau realisasi pelaksanaan DAK Fisik dan DAK Nonfisik bidang Pendidikan Triwulan IV Tahun 2016 sampai di tingkat kabupaten/kota. Tahun depan, akan terus dilakukan inovasi pengembangan Simtrada, yaitu dengan fasilitasi modul integrasi data yang bekerjasama dengan Kemenkeu, serta fitur pengingat (reminder) pemutakhiran data secara otomatis untuk semua kepala dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota melalui mekanisme email dan SMS.


Namun, tidak cukup dengan keenam aplikasi ini. Kemendikbud akan terus mengembangkan sistem elektronik untuk fungsi lainnya. Telah menjadi komitmen Kemendikbud untuk terus berinovasi dengan sistem tata kelola elektronik, demi penyediaan data yang akurat, transparan, dan akuntabel.
Uniknya Rembuk Pendidikan dan Kebudayaan 2016

Unik dan berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya! Itulah kesan yang tampak dari ajang besar Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) yang berlangsung 21-23 Februari 2016 di Pusdiklat Kemendikbud, Sawangan, Depok.
Kesan berbeda itu terlihat bukan hanya dari tema yang diusung, tetapi juga model pelaksanaan hingga rangkaian acara yang lebih dekat dengan masyarakat peduli pendidikan.


Sidang pleno/sidang komisi menjadi ajang diskusi yang hangat. Seluruh peserta dibagi ke dalam tujuh komisi. Mereka dengan antusias mendiskusikan permasalahan dunia pendidikan dan kebudayaan seperti topik topik setiap komisi. Tujuh topik yang dibahas adalah PAUD dan Dikmas dalam mencerdaskan masyarakat; Wajib Belajar 12 tahun; tatakelola guru serta tenaga kependidikan; kurikulum, penilaian pendidikan, dan akreditasi; bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional; membangun budaya dan budaya membangun; serta efektivitas birokrasi, pelibatan publik, dan hubungan pusat daerah.


Hasil kesimpulan dari Komisi I adalah memprioritaskan upaya penerapan daerah dalam meningkatkan akses, mutu, dan tatakelola serta pelibatan publik pada PAUD dan pendidikan masyarakat. Komisi II menghasilkan keseakatan untuk memperluas akses, peningkatan mutu, serta tatakelola dalam program Wajib Belajar 12 tahun. Komisi III mengutamakan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan (PKB) guru pembelajar dan sertifikasi guru. Komisi IV menekankan percepatan implementasi Kurikulum 2013, peningkatan mutu pelaksanaan, kemanfaatan ujian nasional, peningkatan budaya mutu dan pemanfaatan akreditasi, serta pelibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan pendidikan.

Komisi V yang membahas tentang bahasa Indonesia menghasilkan keseakatan untuk meningkatkan upaya menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Caranya, dengan tindakan penyebarluasan bahasa Indonesia melalui pengajaran BIPA (Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing), pengayaan kosakata bahasa Indonesia, serta penumbuhan budaya literasi. Komisi VI mengutamakan upaya membangun budaya dan budaya membangun untuk pengelolaan data kebudayaan dan inventarisasi warisan budaya benda (tangible heritage) dan warisan budaya takbenda (intangible heritage). Sedangkan diskusi Komisi VII menghasilkan efektivitas pelibatan publik dalam upaya penataan regulasi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah, perencanaan dan penganggaran, serta pengawasan pembangunan pendidikan dan kebudayaan di pusat dan daerah.

Warna baru

RNPK 2016 juga menampilkan warna baru. Warna baru itu misalnya terlihat dalam paparan narasumber yang cair dan hidup. Kemendikbud menampilkan sejumlah tokoh muda sebagai narasumber. Ada Handry Chaniago (CEO General Electric) yang tampil memukau hadirin dengan topik gerakan revolusi mental di bidang pendidikan dan kebudayaan. Aktivis Ade Irawan (Indonesia Corruption Watch, ICW) mendapatkan...


Hal lain yang juga baru dan unik adalah penggunaan graphic recording. Di setiap komisi terdapat ilustrator-illustrator yang setia mengikuti diskusi dan menuangkannya lewat ilustrasi spontan yang menarik. Jadi, di akhir diskusi, kesimpulan tidak hanya dalam bentuk tulisan, tapi juga gambar-gambar yang lucu dan informatif.

Sepanjang rangkaian acara RNPK, Kemendikbud juga memberi kesempatan pegiat pendidikan untuk memamerkan program, kegiatan, dan produk yang mereka hasilkan. Pameran
ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada para peserta tentang berbagai produk unggulan pendidikan dan kebudayaan, serta informasi dari pihak eksternal (di luar Kemendikbud) yang dapat bermanfaat dan meningkatkan pemahaman dan kerja sama dalam melaksanakan tugasnya.


Penguatan PAUD: Titik Awal Membangun Generasi Emas

Mereka yang paham pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pasti senang jika berkunjung ke PAUD KM Nol di lingkungan Kemendikbud.

Di tempat ini, terdapat pembagian ruang secara tematik. Ada area bermain peran dilengkapi kostum-kostum berbagai profesi, ruang musik dengan berbagai alat musik tradisional dan modern, area balok dan gerak, hingga area untuk bermain air dan pasir.

Meskipun ditujukan secara khusus bagi anak karyawan Kemendikbud, masyarakat juga dapat mendaftarkan anaknya ke PAUD KM Nol dengan biaya terjangkau. Peresmian PAUD percontohan ini pada 20 Juni 2016 menarik perhatian publik karena fasilitas yang lengkap dan tampilan ruangannya yang penuh warna. Nama PAUD KM Nol dipilih karena pada dasarnya pendidikan dimulai...
sejak anak berusia o tahun. PAUD ini juga berada di lingkungan Kemendikbud yang merupakan titik o pendidikan di Indonesia.

PAUD ini diharapkan dapat menjadi rujukan mengenai penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak. PAUD KM Nol mencontohkan desain PAUD yang baik bukan berarti harus berisi peralatan canggih dan mahal. Lebih penting buat PAUD menyediakan perangkat dan permainan warna-warni yang mengedepankan aspek kreativitas.

Peresmian PAUD KM Nol sejalan dengan lima misi utama pembangunan PAUD yang dicanangkan Kemendikbud: meningkatkan ketersediaan layanan PAUD, memperluas keterjangkauan layanan PAUD, meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi layanan PAUD, mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh layanan PAUD, serta menjamin kepastian memperoleh layanan PAUD. Lima hal tersebut sangat penting untuk diperhatikan, mengingat anak usia dini mengalami perkembangan otak yang sangat pesat.

Anak membutuhkan banyak stimulasi agar perkembangannya menjadi lebih optimal. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan korelasi keterlibatan anak di PAUD dengan prestasi belajar pada jenjang sekolah berikutnya, hingga penghasilan yang diperoleh ketika dewasa. Investasi pada PAUD menjadi sangat penting karena beberapa studi menunjukkan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Upaya untuk meningkatkan kualitas PAUD juga dilakukan Kemendikbud dengan menjalin hubungan baik dengan komunitas yang mendirikan PAUD, termasuk dengan Bunda PAUD yang merupakan perkumpulan istri-istrinya kepala daerah di Indonesia. Pada tanggal 29 September 2016, Kemendikbud memberikan penghargaan bagi 15 Bunda PAUD provinsi, 31 Bunda PAUD kabupaten/kota, 10 Bunda PAUD kecamatan, serta 10 Bunda PAUD desa, atas kerja nyata dan kepeduliannya dalam mewujudkan PAUD berkualitas. Pada acara ini, penghargaan juga diberikan kepada sejumlah anak usia dini yang berprestasi dalam berbagai bidang, misalnya pada penghafal Quran, atlet sepak roda, pelukis, serta penari cilik.

Untuk meningkatkan kreativitas pengajaran PAUD, tahun 2016 Kemendikbud juga mengadakan Lomba Cipta Karya PAUD, yang terdiri atas lomba pembuatan cerita rakyat, lagu anak, permainan edukatif, serta buku cerita elektronik. Penghargaan-penghargaan yang diberikan kepada para pegiat PAUD ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menyelenggarakan PAUD berkualitas. Hal ini sesuai pula dengan data PAUD di Indonesia, yang sebagian besar berdiri berdasarkan inisiatif masyarakat.

Untuk meningkatkan mutu PAUD di Indonesia, Kemendikbud menyediakan anggaran biaya operasional pendidikan (BOP) PAUD sebesar Rp600 ribu untuk setiap peserta didik per tahun. Kemendikbud juga berupaya mewujudkan PAUD bermutu dengan kriteria sebagai berikut: PAUD yang dapat menstimulasi anak sesuai dengan tahapan perkembangannya; terintegrasi dengan layanan dasar kesehatan pengasuhan dan perlindungan anak; serta mampu memanfaatkan...
lingkungan sekitar sebagai sumber belajar utama.

Upaya peningkatan kualitas pendidik PAUD juga dilakukan dengan meresmikan laman Anggun PAUD, yang berisi lagu anak, cerita rakyat, video pengajaran, serta materi-materi lain yang dapat menjadi referensi pendidik PAUD untuk mengadakan pembelajaran bagi anak usia dini. Pelatihan bagi guru PAUD serta sosialisasi mengenai pengajaran PAUD yang tepat jugagiatan dilakukan Kemendikbud untuk meningkatkan mutu pendidik PAUD.

Sejak tahun 2010 Kemendikbud juga telah melakukan gerakan Satu Desa Satu PAUD untuk meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) pendidikan anak usia dini di Indonesia. Hingga akhir tahun 2015, sebanyak 72,29% desa di Indonesia telah memiliki lembaga PAUD. Data pada akhir tahun 2015 menunjukkan peningkatan APK anak usia 4-6 tahun di Indonesia menjadi 70,06%. Meskipun demikian, disparitas APK pada provinsi-provinsi di Indonesia masih terlihat.

**Penghargaan UNESCO**


Keberhasilan program pendidikan di PAUD akan menjadi bekal dalam proses pendidikan berikutnya. Peningkatan mutu PAUD diharapkan dapat berdampak terhadap peningkatan mutu pendidikan di Indonesia pada khususnya dan kualitas sumber daya manusia Indonesia pada umumnya.

---

Angka Partisipasi Kasar

**Sumber:** Pendataan Online Ditjen PAUD-Dikmas per Juli 2015
Tunas Integritas sebagai Gerakan Revolusi Mental

Kasus-kasus KKN di negeri kita masih sangat memprihatinkan. Korupsi, khususnya, juga sampai dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga dalam penanganannya membutuhkan orang-orang luar biasa (*extraordinary people*).

**Orang**-orang luar biasa tersebut harus tersebar di berbagai lingkungan, bagaikan tunas-tunas yang menumbuhkan nilai integritas di lingkungan masing-masing.

Kemendikbud memiliki komitmen dalam menanamkan nilai antikorupsi sebagai bagian dari nilai integritas Gerakan Nasional Revolusi Mental (GRNM). Komitmen tersebut diperkuat dengan ditandatangainnya Nota Kesepakahan (*Memorandum of Understanding*) antara Mendikbud dan Ketua KPK. Salah satu bentuk kerja samanya adalah Program Tunas Integritas.

Kemendikbud membutuhkan insan-insan berkomitmen tinggi untuk menegakkan integritas di lingkungan kerja kementerian. Di sinilah Tunas Integritas berperan. Pembentukan Tunas Integritas memerlukan proses internalisasi nilai yang sistematis, yaitu melalui penyelenggaraan lokakarya (*workshop*) Tunas Integritas yang diprakarsai Divisi Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal Kemendikbud. Lokakarya tersebut diharapkan dapat menghasilkan para tunas integritas yang berperan sebagai tokoh panutan (*role model*) dan agen perubahan (*agent of change*)

Para tunas integritas yang merupakan aparatur pemerintah dari berbagai unit di lingkungan Kemendikbud, telah mewarnai lingkungannya dengan etos kerja yang tinggi dan menularkan semangat kepada sesama mitra kerjanya. Dengan menunjukkan kinerja dan kualitas tinggi di atas rata-rata, para Tunas Integritas diharapkan mampu membuat unit kerjanya termotivasi untuk terus menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Metode efektif untuk menginspirasi koleganya adalah para Tunas Integritas lebih banyak bekerja tanpa banyak bicara ataupun menggurui.

Tunas-tunas Integritas Kemendikbud dipercaya untuk menjadi motor penggerak perubahan pada unit kerjanya. Perubahan dari segi peningkatan mutu layanan publik, perbaikan metode kerja, dan budaya kerja yang semakin berintegritas. Dalam rangka mewujudkan Kemendikbud yang berintegritas sebagai agenda reformasi birokrasi, para Tunas Integritas-lah yang menjadi garda terdepan dalam internalisasi budaya kerja Kemendikbud.

Bermitra dengan KPK, Inspektorat Jenderal Kemendikbud telah menyelenggarakan lokakarya Tunas Integritas sebanyak 17 angkatan. Tahun 2016 ini, Kemendikbud menyelenggarakan empat lokakarya Tunas Integritas. KPK menetapkan Prosedur
Operasional Standar (POS) lokakarya dengan sangat ketat demi pencapaian hasil optimal. Jumlah peserta lokakarya diatur maksimal terdiri dari 30 orang. Formasi duduk peserta membentuk huruf U dengan tujuan pelatihan berjalan fokus, intensif, dan memaksimalkan kesempatan interaksi fasilitator dengan peserta.

Materi-materi yang didiskusikan dalam lokakarya Tunas Integritas meliputi materi pokok dan materi penunjang. Materi pokok berupa potensi dan makna integritas, visi dan tata nilai Kemendikbud, dan program pengendalian gratifikasi. Materi penunjang meliputi sistem pengendalian internal pemerintah, manajemen risiko, penanganan konflik kepentingan, dan laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Materi tersebut menjadi bekal bagi para Tunas Integritas untuk melakukan reformasi pada lingkungan kerjanya masing-masing.

### Terbanyak

Diantara Kementerian/Lembaga yang telah bekerja sama dengan KPK dalam mewujudkan Tunas-tunas Integritas melalui penyelenggaraan lokakarya, Kemendikbud adalah kementerian yang memiliki Tunas Integritas terbanyak. Jumlahnya 377 orang (2%) dari 16.328 pegawai Kemendikbud. Hal ini merupakan wujud nyata komitmen Kemendikbud dalam mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi.


Nilai-nilai di atas merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan perilaku seluruh pegawai Kemendikbud dalam menjalankan tugas, sesuai dengan Rencana Strategis Kemendikbud 2015-

### Jumlah Tunas Integritas Kemendikbud per Unit Utama

<table>
<thead>
<tr>
<th>NO.</th>
<th>UNIT UTAMA</th>
<th>ES I</th>
<th>ES II</th>
<th>ES III</th>
<th>ES IV</th>
<th>AUDITOR</th>
<th>WI</th>
<th>CPNS</th>
<th>JUMLAH</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Ditjen Dikdasmen</td>
<td>1</td>
<td>7</td>
<td>10</td>
<td>58</td>
<td>64</td>
<td></td>
<td></td>
<td>140</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Inspektorat Jenderal</td>
<td>5</td>
<td>4</td>
<td>14</td>
<td>22</td>
<td>27</td>
<td></td>
<td></td>
<td>72</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Sekretariat Jenderal</td>
<td>1</td>
<td>5</td>
<td>12</td>
<td>2</td>
<td>5</td>
<td></td>
<td></td>
<td>45</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Ditjen PAUD dan PM</td>
<td>1</td>
<td>7</td>
<td>9</td>
<td>2</td>
<td>16</td>
<td></td>
<td></td>
<td>35</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Balitbang</td>
<td>5</td>
<td>7</td>
<td></td>
<td></td>
<td>12</td>
<td></td>
<td></td>
<td>24</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Badan PP Bahasa</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>3</td>
<td></td>
<td>11</td>
<td></td>
<td></td>
<td>23</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Ditjen Kebudayaan</td>
<td>6</td>
<td>4</td>
<td></td>
<td></td>
<td>12</td>
<td></td>
<td></td>
<td>22</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Ditjen Guru dan TK</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>5</td>
<td></td>
<td>8</td>
<td></td>
<td></td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Total</td>
<td>4</td>
<td>41</td>
<td>56</td>
<td>79</td>
<td>22</td>
<td>5</td>
<td>170</td>
<td>377</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## Model Panutan Pengembangan Budaya Kerja Kemendikbud

<table>
<thead>
<tr>
<th>NO</th>
<th>PEJABAT ESELON I</th>
<th>MODEL PANUTAN TATA NILAI</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Inspektur Jenderal</td>
<td>Integritas</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Direktur Jenderal Kebudayaan</td>
<td>Kreatif</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan</td>
<td>Inovatif</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah</td>
<td>Inisiatif</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Sekretaris Jenderal</td>
<td>Meritokrasi</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Direktur Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat</td>
<td>Aktif</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan</td>
<td>Pembelajar</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa</td>
<td>Tanpa Pamrih</td>
</tr>
</tbody>
</table>

2019. Tata nilai tersebut telah disesuaikan untuk mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi Kemendikbud.


Pada momen tersebut, Mendikbud juga mencanangkan tiga unit utama sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK), yaitu Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Ditjen PAUD dan Dikmas. Hal ini merupakan implementasi dari konsep pulau-pulau integritas (Island of Integrity). Konsep ini mengibaratkan Kemendikbud sebagai samudera Zona Integritas yang memiliki unit-unit kerja sebagai pulau WBK. Selanjutnya, akan terus dilakukan pembentukan Tunas-tunas Integritas yang akan mengisi pulau WBK tersebut.

Dengan bertambahnya Tunas-tunas Integritas di lingkungan Kemendikbud, optimisme terwujudnya kementerian berintegritas semakin kuat.

Transaksi Nontunai dan Belanja Daring: Transparan, Aman, dan Nyaman

Persoalan tata kelola keuangan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah.

Keadaan ini tidak terlepas dari fakta bahwa sekitar 64% dari total anggaran pendidikan dikelola daerah. Pada tahun 2016, persentase nilai 64% itu mencakup anggaran pendidikan sebesar Rp 268 triliun yang merupakan dana transfer daerah.


Lebih lanjut akan dibahas kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam kaitannya untuk menyediakan platform, sehingga diharapkan dapat memperkuat kapasitas pemerintah daerah.

Basis data tunggal pendidikan

Sejalan dengan kebijakan Pemerintah terkait transaksi nontunai dan belanja daring, Kemendikbud menerbitkan peraturan menteri sebagai dasar pelaksanaannya. Arah kebijakan ini
sejalan dengan inisiatif penguatan tata kelola keuangan pendidikan melalui transaksi nontunai dan belanja daring. Terutama, diperuntukkan bagi dana transfer daerah untuk keperluan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Alokasi Khusus.


Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013


“Alhamdulilah, hari ini kita menyaksikan penandatanganan kontrak kerja antara Bapak Kepala LKPP dengan para pemimpin penyedia buku secara online,” kata Sekjen Kemendikbud Didik Suhardi pada acara penandatanganan kontrak kerja sama di Gedung LKPP.

Sekjen Kemendikbud optimis, dengan model daring ini, semua transaksi dapat dilakukan dengan transparan sehingga dapat lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Melalui mekanisme ini, Kemendikbud dapat memperoleh data akurat atas status pelaksanaan belanja, mulai dari jumlah pesanan, buku yang sudah diterima, dan pembayaran.

sistem, sehingga tahu kapan buku Kurikulum 2013 sampai. Proses pembayarannya juga sangat mudah dan transparan melalui sistem transfer ke rekening yang sudah tersedia.


“Saya, secara personal, merasa bahwa belanja buku Kurikulum 2013 melalui e-katalog itu nyaman dan aman. Kami pihak sekolah tidak takut dan merasa was-was untuk belanja buku Kurikulum 2013,” ujar salah satu bendahara sekolah menengah di Yogyakarta.


**Perluasan transaksi nontuni dan belanja daring**


Inisiatif untuk transaksi nontunai dan belanja daring diharapkan dapat terus berkembang. Sasarannya adalah menciptakan tatakelola keuangan pendidikan yang lebih baik. Kemendikbud berharap inisiatif transaksi nontunai dan belanja daring, tidak hanya berhenti sampai program BOS dan DAK. Inisiatif ini diharapkan dapat menyentuh kepentingan pengadaan lainnya yang dilakukan sekolah dan pelaksanaannya menggunakan anggaran daerah.

“Insya Allah ini akan kami lakukan secara bertahap, dengan begitu penggunaan dana pendidikan dapat dilakukan secara efektif dan efisien,” tegas Sekjen Kemendikbud optimis.
Membangun dari Pinggiran

SMP Negeri Bime Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua ini merupakan salah satu wujud komitmen Pemerintah untuk melayani mereka yang berada di pelosok negeri.
Dengan kondisi geografis menantang serta ragam bahasa dan budaya yang kaya, Papua dan Papua Barat memunculkan tantangan spesifik dan berbeda. Keduanya memiliki derajat kompleksitas lebih dibandingkan daerah-daerah lain.


Percepatan Kemajuan Pendidikan di Papua dan Papua Barat

Provinsi Papua dan Papua Barat merupakan bagian penting dalam upaya mewujudkan paradigma pendidikan nasional.
Dalam konteks pendidikan nasional, arah pembangunan jangka menengah diterjemahkan ke dalam enam paradigma: pendidikan untuk semua, pendidikan sepanjang hayat, pendidikan sebagai suatu gerakan, pendidikan menghasilkan pembelajar, pendidikan membentuk karakter, sekolah yang menyenangkan, dan pendidikan yang membangun kebudayaan.

Kembali ke Papua dan Papua Barat, berbagai indikator pendidikan menunjukkan masih banyak upaya yang harus dilakukan untuk mempercepat kemajuan pendidikan di wilayah paling timur Indonesia tersebut. Papua dan Papua Barat mendapat perhatian khusus dari Kemendikbud dalam beberapa aspek: peningkatan akses, mutu dan relevansi, serta tata kelola pendidikan.

Papua dan Papua Barat mendapat perhatian khusus dari Kemendikbud dalam beberapa aspek: peningkatan akses, mutu dan relevansi, serta tata kelola pendidikan. Arah kebijakan yang diambil adalah memastikan ketersediaan dan keterjangkauan, peningkatan mutu guru, sarana prasarana, relevansi pendidikan secara berkelanjutan dan memastikan pengelolaan sumber daya secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

Tantangan Akses dan Mutu

1) Akses


2) Mutu


<table>
<thead>
<tr>
<th>Provinsi</th>
<th>Angka Partisipasi Kasar</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>SD</td>
</tr>
<tr>
<td>Papua</td>
<td>86.6</td>
</tr>
<tr>
<td>Papua Barat</td>
<td>111.37</td>
</tr>
<tr>
<td>Nasional</td>
<td>108.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber: Pusat Data dan Statistik Pendidikan 2016
## KILASAN KINERJA 2016

### Percepatan Kemajuan Pendidikan di Papua dan Papua Barat

#### Tantangan: Akses, Mutu

<table>
<thead>
<tr>
<th>Masalah dan Tantangan</th>
<th>Arah Kebijakan</th>
<th>Langkah Konkret Kemendikbud</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Akses</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>• Sebaran penduduk di area terisolir dengan tantangan geografis</td>
<td>• Memastikan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan</td>
<td>• Program Indonesia Pintar</td>
</tr>
<tr>
<td>• Disparitas geografis, sosial, budaya, dan ekonomi</td>
<td></td>
<td>• Pembangunan sekolah baru berpola asrama</td>
</tr>
<tr>
<td>• Daya tampung terbatas</td>
<td>• Program Indonesia Pintar</td>
<td>• Renovasi sekolah (rusak berat)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>• Sekolah Garis Depan</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>• Rehabilitasi ruang kelas</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>• Afirmasi Pendidikan Menengah</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>• Pembangunan perpustakaan dan pusat sumber belajar</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Mutu dan Relevansi</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>• Guru: mutu dan distribusi</td>
<td>• Meningkatkan mutu guru, mutu sarana prasarana, dan relevansi pendidikan secara berkelanjutan</td>
<td>• Guru Garis Depan</td>
</tr>
<tr>
<td>• Sarana dan prasarana: kelayakan</td>
<td></td>
<td>• Sarjana Mengajar di Daerah 3T</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>• Guru Pembelajar</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>• Pendidikan vokasi (peningkatan kompetensi kerja dan keselarasan dengan dunia kerja)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>• Program peningkatan karier</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>• Program pertukaran kepala sekolah</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>• Program kualifikasi S1 dan S2</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>• Penyediaan sarana pendidikan</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Tata Kelola</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>• Penggunaan sumber daya belum efektif</td>
<td>• Memastikan sumber daya dikelola dengan efisien, efektif, transparan, dan akuntabel</td>
<td>• Neraca Pendidikan Daerah</td>
</tr>
<tr>
<td>• Kurang fokus pada Tupoksi</td>
<td></td>
<td>• Membentuk Desk Papua dan Papua Barat di Kemendikbud</td>
</tr>
<tr>
<td>• Kurang transparan</td>
<td></td>
<td>• Integrasi program antara dana Kemendikbud dan dana otonomi khusus</td>
</tr>
<tr>
<td>• Kurang akuntabel</td>
<td></td>
<td>• Melakukan konsolidasi atas seluruh kegiatan CSR di Papua dan Papua Barat dari 52 instansi swasta</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>• Memberikan asistensi teknis dalam pengembangan pendidikan</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Solusi

Akses

- Program Indonesia Pintar;
- Pembangunan unit sekolah baru dan revitalisasi sekolah;
- Rehabilitasi ruang kelas;
- Sekolah Garis Depan (25 unit);
- Pembangunan perpustakaan dan pusat sumber belajar;
- Penyediaan alat pendidikan;
- ADEM (Afirmasi Pendidikan Menengah) untuk 500 siswa di 171 sekolah penerima;
- Pembangunan Sekolah Berasrama sebanyak 9 SMP di 7 Kabupaten dan 1 SMP di Kabupaten Sorong (Target: 52 unit).

Mutu

Ketersediaan guru:
- Guru Garis Depan [GGD]: mengirimkan 292 guru ke lima kabupaten di Papua Barat dan 14 kabupaten di Papua;
- Sarjana Mengajar di Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (SM3T).

Mutu guru:
- Guru Pembelajar (alokasi dana Rp 66,6 miliar);
- Program bantuan peningkatan karier (alokasi dana Rp 8,6 miliar);
- Program pertukaran kepala sekolah (telah diikuti 141 kepala sekolah);
- Peningkatan kualifikasi S1 dan S2 (telah diikuti 224 guru di Papua dan 112 guru di Papua Barat).

Absensi:
- Tunjangan khusus dan intensif non-PNS (alokasi dana Rp 385 miliar);
- Tunjangan profesi guru PNS dan non-PNS (alokasi dana Rp 773 miliar).

Intervensi

Akses:
- a. BOS SM
- b. BOP PAUD
- c. USB
- d. RKB

Mutu:
- a. Peningkatan Sarpras Pendidikan
- b. Afirmasi Pendidikan
- c. Peningkatan Kualifikasi
- d. Peningkatan Kualifikasi, Kompetensi, dan Kesejahteraan Guru

Kebudayaan dan Bahasa:
- a. Revitalisasi Desa Adat
- b. Pelestarian nilai budaya
- c. Pembangunan Rumah Budaya
- d. Fasilitasi Komunitas Adat
- e. Pelindungan dan Pelestarian Bahasa Lokal

Alokasi Bantuan KEMENDIKBUD
Rencana Alokasi Program Bantuan
untuk Papua dan Papua Barat

**Papua**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Satuan Kerja</th>
<th>BOS (siswa)</th>
<th>PIP (siswa)</th>
<th>USB (unit)</th>
<th>RKB (unit)</th>
<th>Rehab (unit)</th>
<th>Perpustakaan (unit)</th>
<th>Peralatan Pendidikan (paket)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Dit. Pembinaan SD</td>
<td>429,594</td>
<td>279,805</td>
<td>1</td>
<td>79</td>
<td>207</td>
<td>77</td>
<td>179</td>
</tr>
<tr>
<td>Dit. Pembinaan SMP</td>
<td>105,314</td>
<td>74,975</td>
<td>3</td>
<td>82</td>
<td>-</td>
<td>28</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Dit. Pembinaan SMA</td>
<td>53,287</td>
<td>21,370</td>
<td>-</td>
<td>692</td>
<td>356</td>
<td>59</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Dit. Pembinaan SMK</td>
<td>25,933</td>
<td>24,766</td>
<td>17</td>
<td>20</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>Dit. Pembinaan PKLK</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Papua Barat**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Satuan Kerja</th>
<th>BOS (siswa)</th>
<th>PIP (siswa)</th>
<th>USB (unit)</th>
<th>RKB (unit)</th>
<th>Rehab (unit)</th>
<th>Perpustakaan (unit)</th>
<th>Peralatan Pendidikan (paket)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Dit. Pembinaan SD</td>
<td>146,053</td>
<td>77,923</td>
<td>-</td>
<td>40</td>
<td>123</td>
<td>24</td>
<td>102</td>
</tr>
<tr>
<td>Dit. Pembinaan SMP</td>
<td>41,558</td>
<td>30,888</td>
<td>2</td>
<td>33</td>
<td>-</td>
<td>12</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Dit. Pembinaan SMA</td>
<td>24,074</td>
<td>9,156</td>
<td>-</td>
<td>33</td>
<td>11</td>
<td>26</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Dit. Pembinaan SMK</td>
<td>11,885</td>
<td>10,907</td>
<td>4</td>
<td>14</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>Dit. Pembinaan PKLK</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Total**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Satuan Kerja</th>
<th>BOS (siswa)</th>
<th>PIP (siswa)</th>
<th>USB (unit)</th>
<th>RKB (unit)</th>
<th>Rehab (unit)</th>
<th>Perpustakaan (unit)</th>
<th>Peralatan Pendidikan (paket)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Dit. Pembinaan SD</td>
<td>575,647</td>
<td>357,728</td>
<td>1</td>
<td>119</td>
<td>330</td>
<td>101</td>
<td>281</td>
</tr>
<tr>
<td>Dit. Pembinaan SMP</td>
<td>146,872</td>
<td>105,863</td>
<td>5</td>
<td>115</td>
<td>-</td>
<td>40</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Dit. Pembinaan SMA</td>
<td>77,361</td>
<td>30,526</td>
<td>-</td>
<td>725</td>
<td>367</td>
<td>85</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Dit. Pembinaan SMK</td>
<td>37,818</td>
<td>35,673</td>
<td>21</td>
<td>34</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>17</td>
</tr>
<tr>
<td>Dit. Pembinaan PKLK</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM)

Salah satu program afirmasi yang dikembangkan Kemendikbud adalah Program ADEM atau Afirmasi Pendidikan Menengah. Program ini bertujuan memberikan kesempatan yang sama kepada lulusan SMP atau sederajat dari putera-puteri asli Papua dan Papua Barat yang memiliki motivasi tinggi untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat menengah di luar provinsinya. Arah besar dari program ini dalam jangka panjang adalah untuk mempercepat pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Papua dan Papua Barat. Sasaran berikutnya adalah mewujudkan akulturasi keragaman budaya melalui program implementasi pendidikan layanan khusus afirmasi pendidikan menengah.


Arah besar dari program ini dalam jangka panjang adalah untuk mempercepat pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Papua dan Papua Barat

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Provinsi</th>
<th>Peserta Didik</th>
<th>Target 2016</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Jawa Timur</td>
<td>61</td>
<td>144</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>DIY</td>
<td>12</td>
<td>36</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Jawa Barat</td>
<td>30</td>
<td>96</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Jawa Tengah</td>
<td>42</td>
<td>70</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Banten</td>
<td>20</td>
<td>66</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Bali</td>
<td>21</td>
<td>75</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Jumlah</td>
<td>186</td>
<td>487</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Usulan Siswa Program ADEM
Kabupaten/Kota Tahun 2016

1. Pemberangkatan Jayapura

<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Kab/Kota</th>
<th>Jumlah Kuota</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Kerom</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Puncak</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Jaya Wijaya</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Dogiyagi</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Deiyai</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Yalimo</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Lanny Jaya</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Nduga</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Tolikara</td>
<td>12</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Total Jayapura : 202 Orang

2. Pemberangkatan Merauke

<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Kab/Kota</th>
<th>Jumlah Kuota</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Merauke</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Mappi</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Boven Digoel</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Pegunungan Bintang</td>
<td>12*</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Asmat</td>
<td>12</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Total Merauke : 60 Orang

3. Pemberangkatan Biak

<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Kab/Kota</th>
<th>Jumlah Kuota</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Biak Numfor</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Suppiori</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Yapen</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Nabire</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Paniai</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Intan Jaya</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Waropen</td>
<td>12</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Total Biak : 88 Orang

* Keberangkatan quota Pegunungan Bintang dialokasikan ke Jayapura

4. Pemberangkatan Manokwari

<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Kab/Kota</th>
<th>Jumlah Kuota</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Manokwari</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Teluk Wondama</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Teluk Bintuni</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Pegunungan Arfak</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Manokwari Selatan</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Kaimana</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Fakfak</td>
<td>10</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Total Manokwari: 70 Orang

5. Pemberangkatan Sorong

<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Kab/Kota</th>
<th>Jumlah Kuota</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Kota Sorong</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Kab. Sorong</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Sorong Selatan</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Raja Ampat</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Maybrat</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Tambrauw</td>
<td>13</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Total Sorong: 80 Orang
Membangun Asa
Lewat Sekolah Garis Depan

Upaya mengejar pendidikan layak di daerah 3T (Terluar, Terdepan, dan tertinggal) sering kali bak berhadapan dengan tembok tebal.


Selain infrastruktur, keragaman kondisi sosial, ekonomi, dan budaya juga mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan melalui satuan pendidikan yang ada selama ini dianggap belum memberikan kesempatan untuk mengangkat konteks sosial yang beragam. Satuan pendidikan yang ada cenderung dicirikan oleh penyeragaman karakteristik sekolah. Kecenderungan tersebut menjadikan layanan pendidikan yang ada kurang sesuai dengan karakteristik masyarakat yang dilayani dan lingkungan tempat satuan pendidikan tersebut berada.


Pengertian “pinggiran” dalam Nawacita ketiga adalah pinggiran secara geografis dan pinggiran secara sosio-ekonomis. Maka, lokasi SGD dipilih berdasarkan kriteria...
berikut:

1. Daerah 3T atau,
2. tempat bersejarah dalam meraih kemerdekaan Indonesia atau,
3. daerah perkotaan yang merupakan gambaran 'terpinggir' dari segi sosial ekonomi.

Berdasarkan kriteria di atas, tim melakukan verifikasi ke lapangan agar benar-benar tepat sasaran dalam pemberian bantuan. Dari proses tersebut, untuk tahun 2016 terpilihlah 113 sekolah yang akan dikembangkan menjadi SGD yang tersebar di 42 Kabupaten di Indonesia. Sekolah Garis Depan ini terdiri dari sekolah yang sudah ada kemudian direvitalisasi, dan pembangunan unit sekolah baru.

SGD direncanakan untuk benar-benar mengakomodasi keberagaman kondisi sosial demografi Indonesia. Mulai dari aspek sarana dan prasarana, guru dan model pembelajaran, didesain untuk menjawab kebutuhan anak usia sekolah di tempat tersebut.

Diskusi terpumpun


Dalam acara tersebut, keenam
Siswa akan lebih cepat menyerap ilmu jika pembelajaran diadapetasikan dalam konteks yang familiar untuk anak. Pegiat pendidikan ini membagikan pengalamannya dalam mendirikan sekolah dan menjalankan proses belajar-mengajar di daerah 3T maupun daerah yang terpinggirkan secara sosial ekonomi. Mereka bersama tim SGD Kemendikbud terlibat aktif membahas prinsip-prinsip yang akan diterapkan dalam pembangunan SGD.

Hasil dari Diskusi Terpumpun menghasilkan sejumlah prinsip berikut:
1. Mengadapetasikan kontekstualitas lokal;
2. mengaplikasikan Pembelajaran Abad 21 dan Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan (ESD);
3. mengaplikasikan manajemen yang transparan dan akuntabel;
4. mewujudkan guru yang andal dalam mengajar dan menyusuaikan dengan konteks lokal;
5. sekolah yang aman dan ramah anak;
6. sekolah adalah Organisasi Pembelajar;
7. kepala sekolah harus mempunyai kemampuan manajemen sekolah dan kepemimpinan yang bermutu;
8. sarana dan prasarana yang sesuai dengan konteks lokal.

Hasil Diskusi terpumpun di atas menekankan pentingnya konteks daerah tempat SGD tersebut berada dalam meningkatkan efektivitas belajar siswa. Siswa akan lebih cepat menyerap ilmu jika pembelajaran diadapetasikan dalam konteks yang familiar untuk anak. Walau begitu, proses belajar-mengajar juga harus mengedepankan pengembangan kualitas Abad ke-21 agar siswa di daerah SGD dapat bersaing dengan
Salah satu desain SGD yang masuk final sayembara


SGD juga tidak boleh melupakan faktor kompetensi guru. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan mengadakan pelatihan pembelajaran berbasis TIK bagi 1.800 guru yang berasal dari SGD. Nantinya, mereka dapat memanfaatkan sarana internet di sekolah untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar.


Kehadiran SGD diharapkan mampu memperkecil ketimpangan pendidikan yang masih terdapat di berbagai daerah. Kehadiran SGD diharapkan juga mampu mewujudkan peningkatan kualitas SDM Indonesia.
Revitalisasi LPMP: Tangan Kanan Kemendikbud di Daerah

Untuk negara seluas Indonesia, tidak mudah menjamin pemerataan kualitas pendidikan di setiap daerah.

Apa lagi dengan berlakunya UU yang mengatur otonomi daerah. Untuk memastikan terjaminnya kualitas pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP), Kemendikbud harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah.


Karena itu, Dirjen Dikdasmen berkeinginan mengefektifkan betul LPMP. Revitalisasi LPMP sangat diperlukan mengingat fungsi strategisnya di lapangan, ujar Hamid Muhamad dalam wawancara dengan Tim Sekolah Dasar.

Menurut Permendikbud Nomor 14 Tahun 2015, LPMP menyelenggarakan enam fungsi yaitu (1) pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah; (2) pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah; (3) supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan; (4) fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan; (5) pelaksanaan kerja sama di bidang penjaminan mutu pendidikan; dan (6) pelaksanaan urusan administrasi LPMP.

Di Indonesia terdapat 33 LPMP yang tersebar di 33 Provinsi, kecuali Kalimantan Utara yang belum mempunyai LPMP. Sebaran LPMP bisa dilihat dalam peta di bawah ini.

Program unggulan

Berkaitan dengan revitalisasi LPMP, ada beberapa program unggulan yang dilakukan LPMP guna memastikan peningkatan kualitas mutu pendidikan di daerah. Salah satunya adalah Training of Trainer (ToT) Instruktur Kabupaten/Kota (IK) Kurikulum 2013 untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Pelatihan ini bertujuan agar Instruktur Kabupaten bisa mendampingi sekolah dalam melaksanakan kurikulum 2013 secara benar. Pada tahun 2016, ada
58.000 sekolah yang menerapkan Kurikulum 2013, dan sekolah-sekolah ini yang akan menjadi target bagi Instruktur Kabupaten.


Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan upaya untuk menggerakkan seluruh elemen yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan dalam rangka meningkatkan mutu secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah bertujuan menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan dasar dan menengah secara sistematik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri.


Untuk memudahkan pemantauan penjaminan mutu, terdapat aplikasi pendataan yang dapat digunakan sekolah, yaitu Aplikasi Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP). Adanya Aplikasi PMP diharapkan dapat memberikan fasilitasi satuan pendidikan dalam penerapan sistem penjaminan mutu. Tujuannya, memperkuat upaya satuan pendidikan dalam memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu sesuai kebutuhan.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Revitalisasi LPMP: Tangan Kanan Kemendikbud di Daerah

nyata di lapangan. LPMP bertugas dalam pendampingan penggunaan aplikasi ini di lapangan. Kedua hal ini dilakukan agar Kemendikbud bisa memetakan mutu satuan pendidikan sehingga bisa memutuskan intervensi yang tepat sesuai kebutuhan.


Suasana Training of Trainer Tim Pengembang Kurikulum 2013

LPMP berada di barisan pertama dalam memantau implementasi kebijakan pusat di daerah

Revitalisasi LPMP: Tangan Kanan Kemendikbud di Daerah 105
Guru Garis Depan
Mengabdi untuk Pendidikan di Daerah Khusus

Negara harus hadir dalam mengatasi masalah-masalah besar bangsa ini.

Sejak tahun 2015, Kemendikbud berusaha mewujudkan kehadiran negara dalam bidang pendidikan di daerah 3T (Terluar, Terdepan, Tertinggal). Upaya ini bukan hanya dalam bentuk pemberian bantuan kebutuhan sekolah dan perbaikan infrastruktur. Lewat program Guru Garis Depan (GGD), negara juga berusaha menyediakan dan meningkatkan kualitas pengajar di daerah 3T.

Sesuai semangat Nawacita, program GGD adalah program prioritas pemerintah dan program afirmasi Kemendikbud dalam rangka “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak Indonesia lewat upaya memberikan layanan pendidikan, mengatasi kekurangan guru, dan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Dalam penempatannya nanti, para guru yang mengikuti program GGD diharapkan dapat menjadi agen perubahan di tengah masyarakat.


Banyak pengalaman unik yang diceritakan para GGD ini. Salah satunya adalah Andi Halifah yang mengajar di SMA 2 Serui. Dengan keterbatasan yang ada, Guru Fisika asal Makassar ini sangat kreatif membuat bahan ajar dari lingkungan sekitarnya.

“Di sini sangat alami, kami harus membuat bahan ajar sesuai dengan daerahnya”, ujarnya.


Hal yang sama juga dialami oleh Irfan Dani yang ditempatkan di SMA 1 Labuan Haji, Aceh Selatan. Pria asal Padang, Sumatera Barat yang akrab disapa Pandani ini mengajar pelajaran Biologi. Tapi yang membuatnya menjadi guru favorit di SMA 1 Labuan Haji adalah keaktifannya dalam program ekstrakurikuler sekolah. Pandani aktif menjadi pembina Pramuka, PMR, dan komputer.

Program ekstra kurikuler komputer adalah program yang dibentuk atas inisiatifnya sendiri. Pandani membuka ekstrakurikuler komputer yang tidak hanya diikuti oleh siswa tetapi juga kepala sekolah dan rekan-rekan guru lainnya.


Semangat para GGD ini berlanjut pada tahun 2016 dengan membuka kembali kesempatan bagi pemuda-pemuda terbaik Indonesia. Mereka dapat berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia dengan menjadi guru yang berkomitmen ditempatkan di daerah 3T. Pada tahun 2016, Kemendikbud kembali mengirimkan 7.000 GGD ke daerah 3T. Calon peserta GGD juga lebih beragam yaitu selain berasal dari SM-3T yang telah mengikuti program PPG, calon peserta juga berasal dari:

1. PPG S1 PGSD Berasrama yaitu program S1 PGSD yang terintegrasi dengan program PPG yang pesertanya merupakan lulusan SMA atau D2 dari daerah 3T;
2. SMK Kolaboratif merupakan penyiaran guru SMK mata pelajaran produktif yang tidak dihasilkan oleh LPTK,
Peningkatan jumlah GGD yang hampir sepuluh kali lipat ini merupakan komitmen kuat negara untuk hadir di setiap daerah di Indonesia.

input PPG kolaboratif lulusan S-1/D-IV kejuruan/keteknikan yang berasal dari Non-LPTK yang pelaksanaan PPG nya berkolaborasi antara perguruan tinggi non-LPTK dengan LPTK yang ditunjuk;

3. S-1 Basic Science Berasrama
yaitu penyampaian guru sains profesional yang inputnya adalah lulusan SMA dari daerah 3T yang kuliah S-1 Sains pada Perguruan Tinggi nonkependidikan yang setelah lulus mengikuti program PPG pada LPTK yang ditunjuk;


Tidak semua peserta yang mendaftar bisa diterima menjadi GGD. Hanya orang-orang terpilih yang lolos seleksi yang bisa ditetapkan menjadi GGD. Pada tahun 2016, seleksi GGD dilaksanakan pada tanggal 15-18 September. Tes dilaksanakan secara komputerisasi dan serentak di 107 Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang tersebar di 34 Provinsi Indonesia. Selain agar pelaksanaannya bisa cepat, mekanisme ini juga dilakukan sebagai salah satu upaya bagi calon peserta agar tidak melakukan kecurangan sehingga benar-benar guru terbaiklah yang akan dipilih. Setelah lolos seleksi, para GGD ini akan melalui proses pembekalan. Para GGD ini akan diberikan informasi secara mendalam tentang daerah penempatannya, sehingga diharapkan bisa cepat beradaptasi dengan lingkungan tempat mereka akan mengajar.

Merawat Hubungan Pusat dan Daerah melalui Dialog dan Kerja Nyata

Ada yang berbeda dari Ruang Graha 1 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada Kamis, 28 September 2016. Sekelompok orang berbaju tenun khas Sumba terlihat serius berdiskusi.


Menurut undang-undang, pemda juga mempunyai peran yang krusial dalam memajukan pendidikan. Kemendikbud menyumbat baik adanya kolaborasi ini ke depannya,” ujar Mendikbud Muhadjir Effendy, saat membuka lokakarya ini.

Hasil penelitian ACDP menghasilkan banyak temuan tentang kondisi pendidikan dasar di Sumba. Yang pertama, selisih (gap) yang besar antara gaji guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan non-PNS di Sumba. Gaji guru honorer di Sumba hanya Rp350,000 per bulan dan hal ini sangat tidak sebanding dengan gaji guru PNS yang berjumlah Rp 3,000,000-

“Bagaimana kami bisa menuntut guru-guru kami untuk mengajar dengan baik, jika dari segi gaji saja mereka tidak tercukupi,” ujar Bapak Len, perwakilan dari Dinas Pendidikan Sumba Barat Daya.


“Yang sekarang harus dilakukan bukan hanya menambah (guru PNS) tetapi redistribusi guru yang sudah ada. Namun seringnya, guru-guru ini tidak mau dipindahkan dari sekolah mereka sekarang karena sudah nyaman,” ungkap Sumarna.

Dirjen GTK menyebut bahwa mensyaratkan baik ide pengangkatan GGD dari Putra Daerah. “Sebenarnya kita sudah mulai mengangkat guru GGD dari daerah lewat jalur PGSD basic science dan kolaborasi,” ujarnya. Dia mengusulkan jika pemda memang ingin mengangkat putera daerah, pemda bisa berkoordinasi langsung dengan universitas/LPTK dalam menyiapkan lulusan yang akan masuk dalam SM3T. Dari sini, peserta SM3T bisa masuk ke GGD.

“Namun, pemda masih harus tetap menyediakan potret kebutuhan data guru di tiap Kabupaten,” ujarnya.

Selain guru, kepala sekolah juga menjadi bahasan dalam diskusi ini. Diskusi ini membahas tentang kemampuan manajerial kepala sekolah. Menurut pejabat Pemda Kabupaten Sumba, banyak kepala sekolah yang tidak memiliki kemampuan manajerial sekolah yang baik. Mereka tidak melalui proses pembekalan dan perekstratan yang semestinya tercantum dalam peraturan yang berlaku. Selain itu, untuk jenjang SD, kepala sekolah sibuk mengisi waktu untuk mengurus administrasi dana BOS.

“Untuk menambah kompetensi kepala sekolah, kita bisa menggunakan LPMP sebagai lembaga yang bertanggung jawab mengadakan pelatihan, seperti yang terjadi di Kurikulum 2013,” ujar Supriano, Direktur Pembinaan SMP. Ide tersebut bergulir sehingga menghasilkan usulan kerja sama pemda dengan LPMP dan LPKKS dalam menyiapkan kepala sekolah.

Selain guru dan kepala sekolah, pendidikan PAUD juga menjadi perhatian. Menjamurnya pendidikan PAUD di Sumba tidak dilengkapi dengan program transisi siswa yang baik sehingga masih banyak siswa yang kewalahan saat masuk SD. Difasilitasi oleh ACDP, aparat Pemda Sumba ini bertemu dengan Save The Children dalam membahas peningkatan literasi pada siswa pendidikan dasar. Save the Children berjanji akan membuat modul kurikulum transisi PAUD ke-SD dan pelatihan guru untuk bisa menggunakan bahasa daerah saat mengajar di kelas awal SD. Penggunaan bahasa daerah dalam pendidikan ini juga diperbolehkan undang-undang, namun hanya untuk kelas awal. Tujuannya agar siswa bisa cepat beradaptasi dan membantu siswa menanamkan pemahaman tentang literasi dan numerasi.


“Kami senang Kemendikbud
mau menerima kami dan menyediakan waktunya untuk mendengar dan bersama menyelesaikan permasalahan pendidikan di Sumba,” ujarnya.

Pada hari terakhir, pemda empat kabupaten berusaha merumuskan solusi dan tindak lanjut. Hasilnya akan masuk dalam proposal tiap kabupaten yang akan diajukan kepada Kemendikbud.

Keempat pemda kabupaten ini juga sepakat mengadakan pertemuan rutin membahas rencana dan target yang telah dibuat dalam Forum Peduli Pendidikan Sumba (FPPS). Lebih jauh semoga kolaborasi ini juga bisa menjadi praktik baik bagi Pemda lain.

“Harapannya semoga kolaborasi ini bisa berlanjut, bukan hanya fokus menyelesaikan masalah yang saat ini terjadi, tetapi juga mengembangkan ide-ide pengembangan pendidikan, kebudayaan dan karakter di setiap siswa,” ujarnya.

Mengjaga harmoni dan memperkuat partisipasi daerah

Tidak hanya lokakarya dengan Pemda Sumba, Kemendikbud juga melakukan upaya lain dalam peningkatan hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Lokakarya Neraca Pendidikan Daerah (NPD) yang sudah dilakukan PASKA di sejumlah provinsi dengan mengundang jajaran pemda kabupaten masing-masing provinsi, merupakan contoh lain dari penguatan hubungan pusat dan daerah. Lewat Lokakarya NPD, jajaran pemda menjadi sadar jika alokasi dana APBD untuk pendidikan masih rendah dengan hasil yang tidak signifikan. Pada lokakarya ini, pemda bersama-
sama memikirkan solusi untuk permasalahan di daerahnya.

Desk Papua juga merupakan bagian dari penguatan hubungan pusat dan daerah yang berada di bawah Kemendikbud. Desk Papua bertujuan untuk meningkatkan koneksi aktifitas aktif-aktiv pendidikan Tanah Papua melalui pelibatan publik. Desk Papua membuka ruang untuk berkerja berdampingan dengan Pupuan Education Community (komunitas aktivis pendidikan informal yang bergerak di Papua), di bawah koordinasi dan pengawasan Staf Ahli Kemendikbud untuk Hubungan Pusat-Daerah James Moodouw.

Guru Pembelajar merupakan program unggulan Ditjen GTK yang juga melibatkan daerah. Guru Pembelajar merupakan program pelatihan agar para guru bisa mencapai kompetensi profesi sesuai harapan. Metode pelatihannya sendiri ada yang memakai metode daring secara keseluruhan, setengah daring, setengah tatap muka, serta tatap muka secara keseluruhan. Karena pengembangan kompetensi guru juga merupakan tanggung jawab pemda, bagi pelatihan yang menggunakan metode tatap muka, Kemendikbud meminta pemda memibayai langsung pelatihan bagi guru mereka.


Kemendikbud berencana merintis program ini pada 100 kabupaten/kota di seluruh Indonesia pada tahun 2019 dengan mengutamakan daerah 3T.


Dalam rapat koordinasi tersebut, Kemendikbud dapat mengomunikasikan perubahan kebijakan yang akan terjadi sesuai dengan perubahan kewenangan. Misalnya, menyangkut tatakelola pemberian bantuan infrastruktur di sekolah menengah, dan tenaga kependidikan PNS di sekolah, terlebih dahulu, kemudian menjadi model ‘daerah rintisan’ ini dengan merujuk kepada daerah dengan penilaian tertinggi.


Dalam rapat koordinasi tersebut, Kemendikbud dapat mengomunikasikan perubahan kebijakan yang akan terjadi sesuai dengan perubahan kewenangan. Misalnya, menyangkut tatakelola pemberian bantuan infrastruktur di sekolah menengah, dan tenaga kependidikan PNS di sekolah, terlebih dahulu, kemudian menjadi model ‘daerah rintisan’ ini dengan merujuk kepada daerah dengan penilaian tertinggi.


Dalam rapat koordinasi tersebut, Kemendikbud dapat mengomunikasikan perubahan kebijakan yang akan terjadi sesuai dengan perubahan kewenangan. Misalnya, menyangkut tatakelola pemberian bantuan infrastruktur di sekolah menengah, dan tenaga kependidikan PNS di sekolah, terlebih dahulu, kemudian menjadi model ‘daerah rintisan’ ini dengan merujuk kepada daerah dengan penilaian tertinggi.

Anak-anak Suku Wana yang termasuk suku terasing sedang mendapatkan layanan pendidikan khusus di Sekolah Lipu, Sumbol, Morowali Utara
Neraca Pendidikan Daerah: Mencari Solusi atas Permasalahan Pendidikan di Daerah

Kemendikbud menyadari peningkatan mutu pendidikan baik di pusat maupun daerah memerlukan dukungan semua pihak terkait.

Pihak-pihak terkait ini diharapkan bersama-sama berkontribusi penuh dalam memberikan solusi atas berbagai persoalan pendidikan. Tujuannya demi mewujudkan pendidikan bermutu, terjangkau, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berbagai upaya peningkatan mutu pendidikan di daerah akan berjalan efektif dan maksimal apabila memiliki korelasi dengan jenis dan derajat permasalahan

Seperti neraca-neraca pada umumnya, NPD dapat menunjukkan posisi keseimbangan antara input dan output yang dicapai di bidang pendidikan. NPD dibuat dengan perspektif menyajikan cara pandang yang lebih transparan dan akuntabel terhadap profil dan kondisi pendidikan di provinsi/kabupaten/kota. Semua informasi yang dicantumkan dalam NPD didesain sedemikian rupa sehingga dapat memberikan gambaran utuh bagi pembaca tentang kondisi pendidikan di suatu daerah dalam satu halaman.

Terdapat empat komponen besar pada NPD yaitu komponen:
1. Input, yang meliputi jumlah siswa, jumlah guru, jumlah sekolah;
2. Intervensi, yang meliputi APBD, anggaran pendidikan, dana transfer daerah;
3. Output, yang meliputi rerata hasil Ujian Nasional (UN), Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN), Uji Kompetensi Guru (UKG), kualifikasi dan sertifikasi guru, akreditasi sekolah, kondisi ruang kelas dan ruang penunjang, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan angka tuna aksara. Data-data yang dicantumkan dalam NPD bersumber dari Kemendagri, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Akreditasi Nasional Sekolah-Madrasah (BAN SM), dan data internal Kemdikbud;
4. Informasi penunjang lainnya yang meliputi peta dan data administrasi wilayah, isu-isu strategis pendidikan, nama, alamat dan nomor kontak instansi terkait penyelenggaraan pada halaman.

Informasi pendidikan yang ditampilkan dalam NPD antara lain:
1. Anggaran pendidikan daerah yang meliputi total APBD, jumlah dan persentase alokasi anggaran pendidikan (menurut urusan) dalam APBD, Dana Daerah, Transfer Daerah dari APBN (ke Provinsi dalam bentuk BOS dan ke Kab/Kota dalam bentuk DAU gaji, DAK, Tunjangan Profesi Guru, dan Tambahan Penghasilan);
2. Guru yang meliputi jumlah guru, persentase guru yang sudah dan belum kualifikasi D4/S1, persentase guru yang sudah menerima sertifikasi profesi, rerata hasil UKG per jenjang pendidikan, dan perbandingan rerata hasil UKG antar Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional;
3. Siswa yang meliputi jumlah siswa, persentase anak bersekolah menurut Angka Partisipasi Murni (APM), rerata hasil UN per jenjang pendidikan, perbandingan rerata hasil UN per jenjang pendidikan di Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional, dan perbandingan rerata IIUN di Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional;
4. Satuan pendidikan yang meliputi jumlah satuan...
pendidikan, kondisi sarana dan prasarana ruang kelas dan ruang penunjang per jenjang pendidikan, dan persentase sekolah yang berakreditasi A, B, C dan belum terakreditasi;

5. Ketunaaksaraan yang meliputi jumlah dan persentase penduduk tuna aksara, dan perbandingan persentase penduduk tuna aksara antar Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional; dan

6. IPM yang meliputi rerata Angka Harapan Lama Sekolah, angka Rerata Angka Lama Sekolah, serta perbandingan dan ranking skor IPM antar- Kabupaten/ Kota, Provinsi dan Nasional.


Data dan informasi yang tercantum dalam NPD akan memiliki nilai manfaat tinggi bila ditindaklanjuti dengan komunikasi semua pemangku kepentingan yang terlibat. Karena itulah, PASKA menyelenggarakan Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT ‘Forum Group Discussion’) untuk semua provinsi. DKT dengan tema “Mencari Solusi atas Permasalahan Pendidikan di Daerah” ini dimaksudkan sebagai media diskusi pendidikan antara Kemendikbud dengan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota beserta para pemangku kepentingan pendidikan di daerah.

Banyak pihak terlibat dalam diskusi, seperti Komisi yang membidangi pendidikan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, BAPPEDA Provinsi/Kabupaten/ Kota, Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/Kota, LPMK, perguruan tinggi negeri/swasta, Dewan Pendidikan Provinsi/Kabupaten/ Kota, Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia, media massa, tokoh/pegiat/pemerhati pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil.
Selain dimaksudkan sebagai media diskusi untuk mencari permasalahan dan alternatif solusinya, DKT juga diniatkan untuk membagi dan menyebarkan praktik baik pendidikan yang sudah dilakukan oleh suatu daerah tertentu. Dengan terbitnya NPD dan terselenggaranya DKT, diharapkan masyarakat dapat terus berpartisipasi dan berkolaborasi untuk ikut terlibat dalam proses peningkatan dan pengembangan mutu pendidikan di daerahnya masing-masing.


Sebagai tindak lanjut dari penyusunan NPD dan penyelenggaraan DKT ini, Kemendikbud akan melakukan penyusunan dan penerbitan Neraca Guru dan Tenaga Kependidikan, Neraca Pendidikan Daerah Tahun 2016 dan Pelatihan untuk Pelatih (Training of Trainer/ToT) untuk penyelenggaraan DKT di Kabupaten/Kota.

NPD dan DKT ini merupakan salah satu terobosan Kemendikbud yang, harapannya, akan berujung pada terselengggaranya peningkatan mutu dan akses pendidikan secara nasional.
Neraca Guru dan Tenaga Kependidikan: Potret Guru dan Tenaga Kependidikan Daerah

Neraca Guru menjadi cermin yang memperlihatkan apa yang sudah baik, apa yang perlu dibenahi dan perlu dikembangkan untuk meningkatkan mutu guru dan tenaga kependidikan.

Itulah sebabnya, Kemendikbud tengah merintis penyusunan Neraca guru dan tenaga kependidikan (NGTK).


Prinsip

Neraca GTK didesain dengan memperhatikan beberapa prinsip:

1) *Stimulative*, neraca ini harus mampu menampilkan informasi terkait guru dan tenaga kependidikan yang bisa merangsang diskusi konstruktif di antara para pemangku kepentingan pendidikan;

2) *Trade in balance*, neraca ini harus memperlihatkan sisi input, intervensi, dan output yang berimbang;

3) *Self explanatory*, neraca ini harus mampu dipahami dengan mudah oleh siapa pun yang membaca dan mencermatinya;

4) *Informative*, informasi yang ditampilkan dalam neraca ini harus kaya, penting dan berguna yang dibutuhkan dalam analisa permasalahan dan solusi pemecahannya;

5) Sederhana, semua informasi yang ditampilkan harus digambarkan dalam tabel dan grafik yang sederhana dan mudah dipahami;

6) Menarik, desain neraca ini harus menarik dan memberikan kesan kuat sebagai produk yang dihasilkan oleh Kemendikbud;

7) *Valid* dan *update*, semua data dan
informasi yang disajikan harus menggunakan data terbaru dan terjamin validitasnya.

Penyusunan Neraca GTK bertujuan untuk memberikan gambaran terkini tentang potret, kondisi, dan pencapaian kinerja guru dan tenaga kependidikan di daerah. Informasi di dalamnya harus dapat digunakan sebagai acuan analisis kebutuhan dan peta pengembangan guru ke depan. Para pengambil keputusan dan pemangku kepentingan pendidikan di pusat dan daerah dapat memanfaatkannya sebagai referensi dalam menentukan prioritas program peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan.

Neraca GTK ini akan menampilkan gambaran jumlah guru dan tenaga kependidikan berdasarkan jenis kelamin, status pegawai, kelompok usia, dan juga golongan. Dari pengambaran jumlah guru berdasarkan kelompok usia nantinya dapat dilihat berapa jumlah guru yang akan pensiun dalam lima tahun ke depan, sebagai masukan untuk perencanaan kebutuhan guru di daerah.

Baik buruknya kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh standar kualitas guru. Guru menjadi garda terdepan pembentukan kualitas generasi penerus bangsa. Karenanya, guru harus terus memiliki kompetensi dan performa yang tinggi. Guru sebagai penentu, pencetak, sekaligus pembentuk generasi masa depan yang andal, harus didukung dengan program yang dapat memfasilitasi guru meningkatkan kompetensi dan kinerja mereka.


Pada peringatan Hari Guru Nasional dan HUT PGRI 20 Desember 2015 di Banyuwangi, Mendikbud berpesan agar guru dapat menjadi guru yang menginspirasi dan terus melahirkan karya-karya bermutu.


Ya, Seorang guru mempengaruhi keabadian. Ia tidak pernah tahu kapan pengaruhnya berhenti.
Pengayaan Lema Bahasa Indonesia

Bahasa Indonesia dirujuk tidak saja oleh penutur Bahasa Indonesia, tetapi juga oleh para pemelajar bahasa yang ingin mengetahui lebih jauh tentang bahasa nasional kita.


Kita ambil contoh bahasa Inggris yang memiliki satu juta kosakata, jelas memiliki kekuatan dalam mengungkapkan hampir semua konsep kehidupan. Coba kita bandingkan dengan kosakata bahasa daerah tertentu yang dituturkan dalam ranah terbatas. Kamus bahasa adalah cara paling mudah untuk mencermati kekayaan kosakata bahasa tertentu.


Pertumbuhan kosakata dalam KBBI yang lambat bertolak belakang dengan derasnya konsep-konsep baru yang masuk ke dalam Bahasa Indonesia serta kekayaan bahasa dan budaya Indonesia.
Sebagaimana kita ketahui, istilah-istilah asing dari berbagai ranah seperti teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sangat kaya dengan berbagai konsep dan istilah baru yang selalu bermunculan.


Selain itu, bahasa daerah kaya dengan konsep yang dapat menjadi padanan konsep lain, terutama konsep yang berasal dari bahasa asing. Contohnya, “mengunggah” yang diterjemahkan dengan perekaan dari upload yang sama-sama memiliki unsur makna menaikkan sesuatu.

Potensi pengayaan kosakata

Istilah asing baru dan konsep unik dan khas dalam bahasa daerah menjadi potensi besar dalam pengayaan Bahasa Indonesia atau pengembangan lema Bahasa Indonesia di dalam KBBI. Lema KBBI yang saat ini lebih dari 90.000, terbuka untuk ditambah...
Badan Bahasa merencanakan KBBI edisi revisi berikutnya akan memiliki 200.000 kosakata pada tahun 2019. Pada tahun ini, akan terbit KBBI edisi V yang akan memuat 110.000 kosakata.

dan dikembangkan. Ditambah maksudnya dimasukkan kata atau istilah baru sama sekali, atau dikembangkan maknanya dari makna yang sudah ada. Penambahan dan pengembangan kosakata Bahasa Indonesia memerlukan keterlibatan semua penutur Bahasa Indonesia, baik di dalam maupun di luar Indonesia.

Keterlibatan para penutur dalam mengembangkan kamus yang dikenal dengan istilah crowd sourcing (urun daya) juga dilakukan kamus bahasa lain. Webster English Dictionary, salah satu kamus lima besar Bahasa Inggris, mengumpulkan data dari masyarakat selama bertahun-tahun. Lebih dari separuh datanya berasal dari masukan langsung masyarakat.

Untuk pengayaan KBBI, masyarakat dapat melakukan dua hal. Pertama, mengusulkan kata baru atau perbaikan kata yang sudah ada. Kedua, mengusulkan makna baru atau perbaikan makna yang sudah ada. Usulan kata baru dari masyarakat harus merupakan konsep yang unik dan khas yang belum ada dalam bahasa Indonesia, sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, berkonotasi baik, serta memiliki bentuk yang enak didengar (eufonis). Kata tersebut dapat berasal dari kosakata bahasa daerah, kosakata atau makna yang hidup di tengah masyarakat, kosakata budaya, kosakata kuliner, dan sebagainya.


Guna mengantisipasi keterbatasan sumber daya, area pencarian data, waktu, dan tempat, tampaknya sangat perlu untuk melibatkan masyarakat penutur secara luas. Untuk itu, Badan Bahasa membangun sebuah program berbasis internet yang akan memudahkan masyarakat melakukan pengusulan kata atau definisi. Program tersebut bernama “Program Pengayaan Kosakata
Bahasa Indonesia". Program tersebut dibuat juga berbasis aplikasi Android dan IOS.

Program ini sudah diluncurkan secara resmi pada 5 Mei 2016. Program tersebut sudah mulai "menyuplai" kosakata usulan masyarakat untuk dimasukkan ke dalam KBBI. Sampai saat ini, sudah tersaring sebanyak 509 kosakata yang diusulkan 1.281 orang.

Badan Bahasa merencanakan KBBI edisi revisi berikutnya akan memiliki 200.000 kosakata pada tahun 2019. Pada tahun ini, akan terbit KBBI edisi V yang akan memuat 110.000 kosakata. Terdapat selisih 90.000 kosakata yang harus "dikejar" selama tiga tahun, atau rata-rata sebanyak 30.000 kosakata setahun. Sebuah angka yang ambisius kalau dilihat dari perkembangan KBBI edisi I sampai IV yang hanya mencapai 90.000 kosakata.

Namun, sasaran yang besar tersebut tidak mustahil dilakukan karena kita memiliki lebih dari 617 bahasa daerah yang menjadi taman sari Bahasa Indonesia. Taman sari yang dapat menyumbangkan bunga yang paling unik dan khas ke dalam taman besar bernama Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang diperlukan adalah sistem penjaringan yang murah, mudah, dan dapat diakses dari mana saja, serta melibatkan masyarakat secara luas. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan optimis target tersebut dapat dicapai dengan sosialisasi yang baik dan menjangkau seluruh lapisan ekosistem pendidikan.
Memenuhi Amanat Konstitusi Lewat Program Indonesia Pintar

“Kita tidak ingin lagi mendengar anak putus sekolah karena alasan biaya. Kita pastikan bahwa alasan tersebut tidak lagi relevan.”

Kalimat ini seolah dapat menggambarkan besarnya semangat jajaran Kemendikbud untuk menyukseskan Program Wajib Belajar 12 Tahun.

Namun, salah satu tantangan terbesar program Wajib Belajar 12 Tahun adalah anak putus sekolah sebelum menyelesaikan jenjang pendidikan menengahnya karena masalah biaya. Tahun 2016, diperkirakan jumlah anak putus sekolah dari jenjang SD, SMP dan SMA/K masing-masing 0.98%, 0.98% dan 1.22%.

Masalah ini kerap menjadi alasan fundamental, walaupun dalam beberapa kasus, budaya serta tekanan sosial juga merupakan penyebab anak putus atau tidak sekolah. Itulah sebabnya Pemerintah meluncurkan Program Indonesia Pintar (PIP) sebagai program unggulan. PIP ingin memastikan bahwa semua anak Indonesia, terutama anak dari keluarga prasejahtera, tetap bisa mengakses pendidikan sampai ke tingkat pendidikan menengah.

Melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014, Presiden Joko Widodo menetapkan enam tugas bagi Kemendikbud terkait Program Indonesia Pintar. Tugas tersebut sebagai berikut:
1. meningkatkan koordinasi dengan Menteri Sosial, TNP2K, dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam penetapan sasaran PIP;
2. menyediakan Kartu Indonesia Pintar sejumlah penerima PIP untuk siswa SD, SMP, SMA, dan SMK;
3. membayar manfaat PIP beserta tambahan manfaat lainnya kepada siswa penerima PIP yang berada di sekolah yang dikelola Kemendikbud;
4. melaksanakan sosialisasi secara intensif kepada penerima PIP;
5. menjadi pengguna anggaran dalam pelaksanaan PIP di lingkup Kemendikbud;
6. melaporkan pelaksanaan PIP sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Menko PMK.

PIP merupakan perbaikan atas program sebelumnya seperti program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Berlangsung antara tahun 2008-2014, BSM memberikan bantuan biaya personal pendidikan kepada siswa dari keluarga tidak mampu. BSM fokus memberikan bantuan kepada anak-anak yang berada pada satuan pendidikan formal. Sedangkan PIP memiliki cakupan penerima manfaat yang lebih luas. Selain menjangkau sistem pendidikan dalam rentang usia 6-21 tahun, PIP juga menjangkau anak-anak yang berada di luar sistem pendidikan formal.

Secara umum, PIP memiliki empat tujuan:
1. meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah;
2. meningkatkan angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah dan angka tidak melanjutkan;
3. menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara wilayah perkotaan dan pedesaan, dan antardaerah.
4. meningkatkan kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.


**Kriteria Anak Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP):**
1. Anak usia sekolah (6-21 tahun) dari keluarga tidak mampu yang ditetapkan oleh pemerintah pada 2016.
3. Anak usia sekolah (6-21 tahun) dari Peserta Program Keluarga Harapan (PKH).
4. Anak usia sekolah (6-21 tahun) yang tinggal di panti asuhan/ sosial.
5. Anak/santri (6-21 tahun) dari pondok pesantren yang keluarga/rumah tangganya memiliki KKS (khusus untuk PIP Kementerian Agama) maupun melalui jalur usulan pondok pesantren (sejenis FUM/ Formulir Usulan Madrasah).
6. Siswa usia sekolah (6-21 tahun) yang terancam putus sekolah karena kesulitan ekonomi dan/atau korban musibah bencana alam.

**Kartu Indonesia Pintar**
Program Indonesia Pintar melalui KIP adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun) yang menerima KIP, atau yang berasal dari keluarga miskin dan rentan (misalnya dari keluarga/ rumah tangga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera/KKS). Atau, anak yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.


Untuk mendapatkan Dana PIP melalui KIP, penerima KIP harus mendaftarkan KIP-nya kepada satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal, ke dalam sistem Dapodik (Data Pokok Pendidikan). Selanjutnya, berdasarkan sistem Dapodik yang tersinkronisasi dengan direktorat teknis kementerian, maka Kemendikbud akan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pencairan yang diteruskan ke bank penyalur, dinas pendidikan, dan satuan pendidikan terkait. Satuan Pendidikan selanjutnya akan menginformasikan kepada siswa penerima KIP agar segera...
mencairkan manfaat PIP di bank-bank penyalur yang telah ditunjuk.

KIP Plus
Sejak 2016, Kemendikbud menetapkan Tujuh Tujuan Strategis Tata Kelola Keuangan Pendidikan, sebagai berikut.
1. Transparansi belanja pendidikan, baik belanja APBN dan APBD;
2. monitoring atas penggunaan anggaran pendidikan;
3. meningkatkan pertanggungjawaban penggunaan pendidikan;
4. perbaikan perencanaan anggaran pendidikan;
5. meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran;
6. bantuan lebih fleksibel dan terarah;
7. mengenalkan sistem perbankan (banking literacy) sejak dini.

Sebagai upaya perbaikan tatakelola keuangan pendidikan agar lebih transparan dan akuntabel, Kemendikbud juga melakukan inovasi atau pengembangan atas model KIP yang tengah berjalan. Pengembangan tersebut diwujudkan dalam bentuk mengubah pola bantuan PIP dari tunai menjadi nontunai (cashless).

Dalam proses ini, Kemendikbud mengandeng Bank Indonesia untuk bersama-sama menyusun kerangka sistem cashless untuk PIP.

KIP Plus adalah kartu identitas bagi penerima yang terhubung secara langsung dengan nomor rekening penerima. Dengan demikian kartu tersebut dapat berfungsi sebagai alat transaksi pembayaran nontunai yang sumber dananya berasal dari dana PIP.


Sebagai proses pengembangan, KIP Plus diuji coba secara terbatas di Yogyakarta dengan melibatkan bank penyalur (BNI dan BRI) dan berkerja sama dengan sekolah-sekolah untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK di kota tersebut. Uji coba tersebut berlaku mulai 1 Oktober-31 Desember 2016. Uji coba KIP Plus dianggap sukses jika mampu memenuhi empat indikator, yakni:
1. Kesiapan lapak belanja siswa;
2. Kerjasama Kemendikbud dan Pemda (Provinsi dan Kota);
3. Kesiapan Struktur Tim Kemendikbud dan Dinas Pendidikan dalam pengawasan pelaksanaan uji coba KIP Plus;
4. Keterlibatan aktif BI, bank penyalur, dan Sekolah dalam edukasi dan pengawasan atas pelaksanaan uji coba.

Hasil uji coba ini, jika berhasil, akan menjadi dasar dan tolok ukur penerapan model KIP nontunai secara bertahap dan meluas. Semoga berbagai inovasi yang dilakukan dapat menyukseskan PIP dan pada akhirnya membuat pemerintah mampu memenuhi amanah konstitusi untuk bidang pendidikan.

### Sasaran dan Anggaran PIP 2016

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Jenjang</th>
<th>Sasaran</th>
<th>Anggaran (Rp 000,000)</th>
<th>Biaya Penyaluran</th>
<th>Jumlah</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Dana diterima Siswa</td>
<td>Pencetakan dan Pengiriman Kartu</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>SD</td>
<td>10,360,614</td>
<td>4,401,142</td>
<td>108,496</td>
<td>51,803</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>SMP</td>
<td>4,369,968</td>
<td>3,324,583</td>
<td>20,854</td>
<td>21,850</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>SMA</td>
<td>1,367,559</td>
<td>1,380,201</td>
<td>14,321</td>
<td>6,838</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>SMK</td>
<td>1,829,167</td>
<td>1,839,813</td>
<td>20,220</td>
<td>9,146</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Jumlah</td>
<td>17,927,308</td>
<td>10,945,739</td>
<td>163,891</td>
<td>89,637</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sasaran dan Anggaran PIP 2016

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Jenjang</th>
<th>Sasaran</th>
<th>Anggaran (Rp 000,000)</th>
<th>Biaya Penyaluran</th>
<th>Jumlah</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Dana diterima Siswa</td>
<td>Pencetakan dan Pengiriman Kartu</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>SD</td>
<td>10,360,614</td>
<td>4,401,142</td>
<td>108,496</td>
<td>51,803</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>SMP</td>
<td>4,369,968</td>
<td>3,324,583</td>
<td>20,854</td>
<td>21,850</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>SMA</td>
<td>1,367,559</td>
<td>1,380,201</td>
<td>14,321</td>
<td>6,838</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>SMK</td>
<td>1,829,167</td>
<td>1,839,813</td>
<td>20,220</td>
<td>9,146</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Jumlah</td>
<td>17,927,308</td>
<td>10,945,739</td>
<td>163,891</td>
<td>89,637</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Pembangunan Infrastruktur untuk Pendidikan yang Lebih Baik

Bencana banjir bandang yang terjadi di Garut, Jawa Barat, pada Selasa malam (20/9-2016), ikut meluluhlantakkan sejumlah fasilitas pendidikan.


Tindakan tanggap darurat itu merupakan bukti nyata perhatian pemerintah terhadap masalah yang dihadapi masyarakat dalam pelayanan pendidikan. Selain program-program pembangunan infrastruktur yang memang sudah direncanakan setiap tahun, Kemendikbud juga aktif membantu pemulihan fasilitas pendidikan di daerah-daerah yang tertimpa bencana alam.

Kemendikbud menyadari, infrastruktur pendidikan menjadi bagian integral pembangunan pendidikan. Penyiapan kurikulum dan peningkatan kualitas pembelajaran juga harus didukung infrastruktur dasar yang memadai. Kemendikbud berkomitmen...
membantu pemerintah daerah (pemda) untuk memastikan ketersediaan fasilitas pendidikan dasar yang berkelanjutan dan bermanfaat untuk peningkatan kualitas pendidikan.

Salah satu tantangan terbesar dalam pembangunan infrastruktur pendidikan adalah ketimpangan fasilitas pendidikan di daerah. Daerah-daerah yang memiliki kemampuan fiskal kuat serta komitmen pendanaan pendidikan yang besar cenderung memiliki fasilitas pendidikan yang lebih baik. Sebaliknya, walaupun memiliki komitmen baik, daerah yang memiliki ruang fiskal sempit tetap kewalahan dalam penyediaan fasilitas pendidikan.

Dalam beberapa kasus seperti di Indonesia Timur, rumitnya kondisi geografis serta akses pendukung yang amat terbatas, memberikan tekanan yang lebih besar terhadap penyediaan infrastruktur dasar di tengah-tengah masyarakat. Keterbatasan fasilitas jalan raya dan transportasi yang tidak bisa diandalkan, menyebabkan fasilitas pendidikan yang memadai sekalipun tidak akan bisa dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan akses.


Pada tahun ini, Kemendikbud juga membantu pengadaan 18.530 perangkat peralatan pendidikan untuk peningkatan kualitas proses belajar mengajar di kelas. Program ini menghabiskan dana sekitar Rp 1,5 triliun dan diserahkan kepada unit-unit satuan pendidikan yang membutuhkan. Untuk peningkatan kegiatan praktik siswa, Kemendikbud juga menyediakan 1.975 ruang laboratorium atau ruang praktik siswa dan terutama ditujukan untuk jenjang pendidikan SMP, SMA, dan SMK. Untuk menumbuhkan semangat literasi dan belajar luar kelas siswa, Kemendikbud membantu
Pembangunan Infrastruktur untuk Pendidikan yang Lebih Baik


Besarnya jumlah bantuan infrastruktur di atas juga memiliki dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja di lapangan. Diperkirakan lebih dari 150 ribu orang terlibat menjadi pekerja dalam pembangunan infrastruktur pendidikan tersebut.

Kemendikbud juga telah mengembangkan sistem informasi daring yang mampu menyajikan informasi infrastruktur pendidikan untuk tiap sekolah di Indonesia. Informasi yang diolah di dalam sistem Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) ini bersumber

---

### Sasaran Pembangunan Infrastruktur
Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2016

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Program</th>
<th>Sasaran</th>
<th>Anggaran (rupiah)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Pembangunan Unit Sekolah Baru</td>
<td>572 unit</td>
<td>1.257,6 miliar</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>SD</td>
<td>20 unit</td>
<td>41,1 miliar</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>SMP</td>
<td>110 unit</td>
<td>78,7 miliar</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>SMA</td>
<td>204 unit</td>
<td>484,7 miliar</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>SMK</td>
<td>221 unit</td>
<td>613,4 miliar</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>PKLK</td>
<td>17 unit</td>
<td>39,5 miliar</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Pembangunan Ruang Kelas Baru</td>
<td>16.255 ruang</td>
<td>3.111,3 miliar</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>SD</td>
<td>2.020 ruang</td>
<td>339,7 miliar</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>SMP</td>
<td>3.786 ruang</td>
<td>653,6 miliar</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>SMA</td>
<td>4.187 ruang</td>
<td>818,3 miliar</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>SMK</td>
<td>5.962 ruang</td>
<td>1.263,2 miliar</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>PKLK</td>
<td>300 ruang</td>
<td>36,3 miliar</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Bantuan Peralatan Pendidikan</td>
<td>18.530 paket</td>
<td>1.527 miliar</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Laboratorium dan Ruang Praktik Siswa</td>
<td>1.975 ruang</td>
<td>437 miliar</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Perpustakaan/Pusat Sumber Belajar</td>
<td>1.622 ruang</td>
<td>402 miliar</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Rehabilitasi Ruang Belajar</td>
<td>13.608 ruang</td>
<td>1.522,1 miliar</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>SD</td>
<td>8.190 ruang</td>
<td>742,9 miliar</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>SMP</td>
<td>1.518 ruang</td>
<td>576,7 miliar</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>SMA</td>
<td>1.600 ruang</td>
<td>83,8 miliar</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>SMK</td>
<td>2.000 ruang</td>
<td>102,8 miliar</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>PKLK</td>
<td>300 ruang</td>
<td>15,8 miliar</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber: Dikdasmen 2016

Pengadaan 1.622 perpustakaan atau pusat sumber belajar di berbagai daerah.

Pembangunan Infrastruktur untuk Pendidikan yang Lebih Baik

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Pembangunan Infrastruktur untuk Pendidikan yang Lebih Baik

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Dalam penyediaan infrastruktur, Kemendikbud mendorong keterlibatan pemda agar lebih dominan. Hal ini sesuai dengan wewenang dan kewajiban yang diemban pemda dalam kerangka pembangunan di era otonomi daerah.

**Pendataan dan Pelibatan**

Pendataan infrastruktur ini penting dalam bagian perencanaan kementerian. Sesuai dengan komitmen yang digariskan dalam arah kerja Kemendikbud, data menjadi sumber informasi pengambilan keputusan dan juga digunakan sebagai bahan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program.

Dalam penyediaan infrastruktur, Kemendikbud mendorong keterlibatan pemda agar lebih dominan. Hal ini sesuai dengan wewenang dan kewajiban yang diemban pemda dalam kerangka pembangunan di era otonomi daerah. Selain mendorong Pemda, Kemendikbud juga mendorong keterlibatan kementerian dan lembaga lain untuk bersama-sama menyiapkan infrastruktur yang integral dan terkait.


Penyediaan fasilitas untuk penyandang disabilitas ini penting dan telah dimulai dari sekolah-sekolah inklusi yang ditunjuk pemerintah. Harapan ke depan, penyediaan akses yang inklusif dapat menjadi norma dalam penyediaan sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia.


Kemendikbud harus mencari formulasi baru agar peningkatan sasaran rehabilitasi sekolah bisa dilakukan. Persoalan ketidaktercapainya sasaran ini mencakup dua hal, yaitu penentuan sekolah sasaran yang tidak tepat, dan penentuan besaran bantuan yang tidak sesuai dengan tingkat kerusakan sekolah.

Kesimpulannya, ada ketidakakuratan pelaksanaan perencanaan dan pengalokasian anggaran hingga penetapan sekolah penerima, ditambah kurangnya kapasitas sekolah yang mengalami kerusakan untuk mengajukan anggaran perbaikan.

Dari catatan di lapangan, penguncian besaran alokasi anggaran rehabilitasi sekolah tidaklah cukup. Penguatan tata kelola pelaksanaan perbaikan infrastruktur sekolah menjadi hal yang sangat penting untuk memperbaiki kesalahan data ini. Tata kelola harus dilakukan dengan merinci data dan kondisi infrastruktur seluruh sekolah di setiap daerah.

Golden Record

Karena itulah Pemerintah lalu membuat sebuah pusat data yang disebut Golden Record. Pusat data ini diharapkan menjadi jalan keluar untuk mendapatkan data akurat dari infrastruktur sekolah. Golden record memuat profil seluruh SD yang berjumlah 148.000 lebih. 

Golden Record: Dasar Penguatan Tata Kelola Rehab Infrastruktur Sekolah


Kemendikbud harus mencari formulasi baru agar peningkatan sasaran rehabilitasi sekolah bisa dilakukan. Persoalan ketidaktercapainya sasaran ini mencakup dua hal, yaitu penentuan sekolah sasaran yang tidak tepat, dan penentuan besaran bantuan yang tidak sesuai dengan tingkat kerusakan sekolah.

Kesimpulannya, ada ketidakakuratan pelaksanaan perencanaan dan pengalokasian anggaran hingga penetapan sekolah penerima. Pemerintah, baik pusat ataupun daerah, kurang memiliki data akurat atas target sekolah penerima, ditambah kurangnya kapasitas sekolah yang mengalami kerusakan untuk mengajukan anggaran perbaikan.

Dari catatan di lapangan, penguncian besaran alokasi anggaran rehabilitasi sekolah tidaklah cukup. Penguatan tata kelola pelaksanaan perbaikan infrastruktur sekolah menjadi hal yang sangat penting untuk memperbaiki kesalahan data ini. Tata kelola harus dilakukan dengan merinci data dan kondisi infrastruktur seluruh sekolah di setiap daerah.

Golden Record

Karena itulah Pemerintah lalu membuat sebuah pusat data yang disebut Golden Record. Pusat data ini diharapkan menjadi jalan keluar untuk mendapatkan data akurat dari infrastruktur sekolah. Golden record memuat profil seluruh SD yang berjumlah 148.000 lebih.
Data sekolah-sekolah ini dimuat secara lengkap dan detail, meliputi data teknis bangunan/gedung, gambar bangunan, foto sekolah dari berbagai sisi, Rencana Anggaran Biaya (RAB) sekolah berdasarkan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), hingga data sekolah rawan bencana.


Tidak hanya itu, golden record dikembangkan menjadi peta infrastruktur sekolah dari tingkat nasional sampai dengan tingkat satuan pendidikan, sehingga mekanisme penentuan sasaran rehab diubah. Tidak lagi tergantung proposal pengajuan, tetapi sasaran sekolah rehab mengacu pada golden record.
Sebuah SMP di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Data infrastruktur yang akurat membantu proses perencanaan yang lebih baik.


“Bukan tidak mungkin ketika terjun di lapangan nanti, anak-anak dan guru SMK akan diragukan oleh sekolah yang bersangkutan. Apa betul anak-anak SMK dan gurunya ini mampu. Nah, adanya sertifikasi dari Kementerian PUPR bisa menjawab keraguan tersebut,” ungkap Direktur Pembinaan SMK.

Keterlibatan SMK tidak hanya berperan untuk pembentukan golden record, tetapi juga terlibat sebagai tim teknis dalam pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan rehab. Lebih jauh, SMK nantinya akan terlibat dalam program pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), Ruang Kelas Baru (RKB), hingga sanitasi sekolah.

**Penutup**


“Selama ini, dari sekolah yang akan dilakukan rehab, mungkin paling banyak hanya 10% yang diverifikasi. Dengan inovasi tata kelola ini, 100% sekolah yang akan direhab pelaksanaan, pasti terdata semua secara lengkap,” tegas Direktur Pembinaan Sekolah Dasar.

Sasaran pengguna Aplikasi Sarana Prasarana nantinya bukan hanya Kemendikbud dan pemerintah daerah. Lebih jauh, Aplikasi Sarana Prasarana juga bisa digunakan masyarakat, lembaga donor, dan pihak swasta sehingga bisa menjadi platform untuk partisipasi publik serta memperkuat tata kelola dalam perbaikan infrastruktur sekolah. Melalui perbaikan tata kelola, penanganan infrastruktur sekolah bisa lebih komprehensif dan juga aman untuk semua pihak terlibat.

Inovasi Teknologi dalam Pendidikan

Perkembangan teknologi membawa dampak besar terhadap proses pembelajaran. Akses internet yang merambah dunia serta diiringi dengan adopsi komputer serta perangkat digital lainnya, telah mengubah cara manusia memperoleh informasi.


Rumah Belajar

Rumah Belajar merupakan portal pembelajaran yang menyediakan berbagai bahan belajar serta fasilitas komunikasi dan interaksi antar komunitas pendidikan. Rumah Belajar dikembangkan untuk memfasilitasi berbagai kebutuhan antara lain: 1) tersedianya fasilitas e-pembelajaran untuk persekolahan, 2) tersedianya berbagai bahan belajar berbasis kanal (web) yang sesuai dengan kebutuhan komunitas pendidikan; 3) tersedianya fasilitas e-pembelajaran untuk pelatihan dan pengembangan profesionalisme guru. Rumah Belajar memiliki fitur-fitur utama sebagai berikut:

- Sumber Belajar
- Buku Sekolah Elektronik
- Bank Sosial
- Laboratorium Maya
- Peta Budaya
- Wahana Jelajah Angkasa
- Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan
- Kelas Maya
Sumber Belajar

Menu-menu yang tersedia di fitur Sumber Belajar terdiri atas bahan belajar interaktif untuk jenjang SD/SMP/SMA/SMK. Bahan belajar interaktif berisi bahan belajar untuk mata pelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Tiap topik dari materi disajikan secara menarik dan interaktif, yang dilengkapi dengan animasi, simulasi, latihan dan tes berdasarkan kurikulum untuk siswa SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA.

Bahan belajar interaktif ini dimanfaatkan baik secara klasikal maupun individual. Guru dapat meminta siswa untuk mempelajari bahan belajar interaktif sesuai dengan pelajaran yang sedang dipelajari di sekolah atau digunakan secara individu oleh siswa untuk memantapkan pemahaman terhadap materi yang diajarkan di sekolah.

Bahan belajar interaktif juga ada yang dikembangkan dengan bentuk chunking materi, yaitu materi yang pendek-pendek dengan penggalian tapi mendalam, dan juga memperhatikan kemampuan awal yang dimiliki siswa sebelum masuk ke dalam materi ajar. Menu Kuis ditampilkan untuk melihat kemampuan awal siswa, sebelum siswa mempelajari uraian materi dan berlatih memantapkan pemahaman pada tiap kegiatan belajar. Setelah mempelajari tiap kegiatan belajar, siswa dapat mengerjakan tes akhir untuk mengukur pemahamannya terhadap isi materi. Hasil tes akhir dimunculkan untuk menginformasikan pada siswa sampai di mana pemahamannya terhadap isi bahan ajar modul online.

Buku Sekolah Elektronik

Buku Sekolah Elektronik (BSE) adalah portal yang menyediakan buku sekolah dari mulai jenjang SD, SMP, SMA & SMK yang dapat dibaca secara daring maupun diunduh sebagai bahan ajar atau belajar secara luring dengan gratis. Buku yang disediakan merupakan buku yang sudah berstandar nasional.

Bank Soal

Uji kemampuan dari berbagai soal yang dapat diakses via internet, berisi soal-soal yang dapat digunakan untuk berbagai latihan, ulangan dan ujian. Saat ini Pusat Teknologi dan Komunikasi (Pustekkom) memiliki kumpulan soal yang dapat diakses melalui fitur Bank Soal di Rumah Belajar. Soal yang tersedia dapat digunakan dan dapat dipilih berdasarkan Kelas, bidang studi atau mata pelajaran.

Siswa dapat menguji kemampuan dirinya dengan diberi kebebasan untuk memilih latihan atau uji kompetensi (ulangan dan ujian). Fasilitas ini diberikan untuk memberikan kemudahan bagi siswa untuk melakukan latihan terlebih dahulu sebelum melakukan uji kompetensi di portal ataupun sebagai latihan, baik untuk mata pelajaran yang sudah atau akan dipelajari. Dengan menggunakan Bank Soal, siswa dapat melakukan latihan dan uji kompetensi (ulangan dan ujian) berdasarkan kelas, semester, mata pelajaran tertentu. Siswa juga dapat menguji kemampuannya berdasarkan masing-masing topik materi pelajaran yang diinginkan, dengan jumlah yang disesuaikan berdasarkan banyaknya soal pada saat Ujian Nasional (UN).

Laboratorium Maya

Laboratorium Maya atau virtual labs adalah serangkaian alat-alat laboratorium yang berbentuk perangkat lunak (software) komputer berbasis multimedia interaktif, yang dioperasikan dengan komputer dan dapat mensimulasikan kegiatan di laboratorium seakan-akan pengguna berada pada laboratorium sebenarnya. Laboratorium maya diperlukan untuk memperkuat pemahaman konsep dalam proses pembelajaran. Laboratorium
maya bukanlah pengganti tetapi bagian dari laboratorium riil yang digunakan untuk melengkapi dan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. Di samping itu dimungkinkan pula bagi sekolah-sekolah yang belum memiliki laboratorium secara fisik menerapkan laboratorium maya. Setiap konten di laboratorium Maya dilengkapi dengan deskripsi singkat terkait dengan materi yang akan dipelajari. Pengguna (siswa dan guru) dapat memberikan umpan balik dengan mengisi rating (jumlah bintang) dan berbagi melalui salah satu jejaring sosial yang disediakan. Pengguna dapat melakukan percobaan mandiri secara berulang-ulang atau pun dipandu oleh guru yang bersangkutan dengan menggunakan Lembar Kerja Siswa (LKS) yang disediakan atau LKS yang dikembangkan sendiri oleh guru tersebut. Setiap pengguna dapat merekomendasikan bahan referensi yang terkait dengan materi percobaan tersebut dan dapat menguduh bahan teori, bahan LKS dan konten lab maya itu sendiri sehingga dapat dimanfaatkan secara luring tanpa terhubung internet. Di laboratorium maya ini, setiap pengguna yang sudah login diberi kesempatan untuk memberikan komentar terhadap isi laboratorium Maya tersebut. Setiap konten laboratorium Maya juga dilengkapi dengan teori singkat dan petunjuk percobaan yang akan dilakukan pada menu bantuan.

• Peta Budaya:

• Wahana Jelajah Angkasa

• Kelas Maya
Implementasi pembelajaran kolaborasi dapat pula dilakukan dalam portal Rumah Belajar dengan menggunakan salah satu fitur Kelas Maya. Di dalam fitur kelas maya telah tersedia forum
diskusi yang dapat digunakan untuk melakukan kolaborasi antara peserta didik dengan peserta didik lainnya, maupun antara peserta didik dengan guru. Forum diskusi dapat dilakukan secara sinkron dan asinkron. Dalam pembelajaran sinkron, peserta didik dapat langsung berinteraksi dan berdiskusi melalui kolom pesan instan yang tersedia. Mereka juga dapat langsung mengunggah hasil diskusi atau tugas melalui papan presentasi yang telah tersedia di dalam aplikasi Kelas Maya. Bagi peserta didik yang tidak memiliki kesempatan untuk kolaborasi secara langsung, maka dapat melakukan secara asinkron.

- **Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan**
  Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan merupakan salah satu fasilitas yang tersedia pada Portal Rumah Belajar. Digunakan sebagai sarana pendidikan dan pelatihan yang dilakukan jarak jauh bagi penyelenggara pendidikan dan pelatihan baik di lingkungan pendidikan maupun non-pendidikan, untuk pendidik dan tenaga kependidikan dan kebudayaan dan tenaga profesi lainnya. Seluruh aktivitas belajar, mencakup membaca ataupun mengunduh bahan belajar, mengikuti forum diskusi, tutorial, chatting, mengerjakan tugas, latihan, ujian online, dan lain-lain dapat dilakukan melalui komputer yang terhubung ke internet. Pembelajaran dikelola dalam sebuah sistem aplikasi LMS, yang dapat mencatat dan mengolah seluruh aktivitas peserta dalam mengikuti Diklat.

**Fitur-fitur pendukung Rumah Belajar:**
- **Karya Komunitas**: Fitur yang dapat digunakan sebagai sarana komunitas/masyarakat yang berkecimpung di dunia pendidikan untuk dapat mengunggah karya pendidikannya.
- **Karya Guru**: Fitur yang dapat digunakan sebagai sarana bagi guru yang berkecimpung di dunia pendidikan untuk dapat mengunggah karya pendidikannya.
- **Karya Bahasa dan Sastra**: Fitur yang bekerja sama dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam menyajikan karya bahasa dan sastra Indonesia.

**TV Edukasi**
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki Televisi Edukasi yang diresmikan tahun 2004. Televisi Edukasi diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh siaran pendidikan secara lebih mudah, guna mendukung upaya peningkatan mutu pendidikan. Dengan kondisi geografis, ekonomi, sosial, budaya yang heterogen, diperlukan media yang tepat dan mudah dalam menyediakan sumber belajar bagi guru dan siswa.

Salah satu media tersebut adalah melalui siaran televisi yang dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Jam siaran Televisi...
Edukasi: pukul 05.00 s.d 21.00 WIB dan di tayangkan ulang oleh beberapa televisi lokal dan televisi berlangganan dan dapat di-saksikan secara daring melalui http://tve.kemdikbud.go.id

Video On Demand (VOD) TV Edukasi

Tayangan program TV Edukasi dapat diunduh melalui website http://video.kemdikbud.go.id. Program-program tersebut dikategorikan dalam setiap jenjang dan mata pelajaran, sehingga mempermudah guru dan siswa dalam mencari program yang dibutuhkan. Adapun program yang dapat diunduh tidak hanya mata pelajaran, namun juga program pendidikan karakter dan berita.

Kihajar 2016


Belajar astronomi secara daring dapat dilakukan dengan mudah. Laman belajar.kemdikbud.go.id menyediakannya.

Berbagai macam inovasi Kemendikbud tersebut terus dikembangkan menyesuaikan dengan kemajuan teknologi. Harapannya adalah kemajuan teknologi tidak melulu berimbas pada masyarakat perkotaan yang memiliki akses infrastruktur baik, namun juga dapat dirasakan oleh masyarakat yang jauh dari sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu, dalam setiap inovasi yang dikembangkan oleh Kemendikbud selalu disediakan fitur luring yang memastikan bahwa isi dari portal pembelajaran tersebut tetap bisa diakses tanpa layanan internet. Ini merupakan wujud komitmen Kemendikbud terhadap pemerataan pendidikan yang berkualitas.
Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia melalui Program Beasiswa

Pelataran Gedung A Kemendikbud pada tanggal 31 Mei 2016 diramaikan kehadiran 400 mahasiswa asing dari berbagai negara yang mengenakan pakaian tradisional Indonesia.


Menariknya, acara tersebut diisi dengan berbagai atraksi kesenian daerah Indonesia yang dibawakan peserta Darmasiswa. Ada yang menari, bermain alat musik, pencak silat, paduan suara, dan menyampaikan testimoni dalam bahasa Indonesia.

Program Darmasiswa adalah salah satu program Beasiswa yang ditawarkan Kemendikbud untuk mahasiswa asing yang tertarik mempelajari bahasa, seni, dan budaya Indonesia selama satu tahun. Pada tahun akademik 2016/2017, peserta Darmasiswa RI terdiri dari 580 mahasiswa dari 78 negara. Mereka mendapat kesempatan belajar pada 51 lembaga perguruan tinggi.
pengelola Program Darmasiswa RI. Tahun ini, perubahan signifikan yang dilakukan Kemendikbud terhadap penyelenggaraan program Darmasiswa ditunjukkan dari peningkatan nilai beasiswa yang diterima peserta. Biaya hidup yang diterima mulai tahun ini disesuaikan dengan standar hidup untuk setiap daerah.

Perubahan lain yang dilakukan pada program Darmasiswa adalah memberikan kebebasan kepada peserta untuk memilih lembaga perguruan tinggi sendiri sesuai minat masing-masing. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah di kemudian hari. Misalnya, ketidaksukaan pada lembaga perguruan tinggi tempat mereka belajar yang membuat mereka pulang ke negaranya sebagai menyelesaikan program belajarnya.

Program Beasiswa Unggulan

Selain program Darmasiswa, Kemendikbud juga menyediakan beasiswa melalui program Beasiswa Unggulan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia Indonesia untuk mendukung percepatan pembangunan. Hal ini sejalan dengan semangat nawacita, yakni untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, serta melakukan revolusi karakter bangsa.

Program ini dikembangkan dalam upaya memberikan kesempatan kepada putera-puteri terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi, dengan prioritas kepada para calon mahasiswa yang memiliki prestasi yang baik pada kemampuan akademik maupun nonakademik, serta memberikan perhatian kepada mahasiswa berprestasi yang kurang beruntung dari segi ekonomi. Beasiswa Unggulan juga ditujukan untuk mempercepat capaian target-target rencana strategis Kemendikbud, khususnya dalam peningkatan SDM Kementerian, peningkatan kualitas guru, tenaga kependidikan dan pelaku kebudayaan, serta implementasi kerja sama internasional yang memberi perhatian kepada mahasiswa dari daerah terpencil, tertinggal, dan terluar di wilayah Indonesia.

Beasiswa Unggulan diberikan kepada mahasiswa Indonesia yang ingin melanjutkan studi S1, S2, dan S3 di Indonesia maupun di luar negeri. Beasiswa ini ditujukan untuk peraih medali olimpiade internasional; pemenang lomba bidang sains, teknologi, seni budaya, dan olah raga di tingkat nasional, regional, dan internasional; guru yang berprestasi; pegawai atau karyawan yang berprestasi; serta pegiat sosial. Penerima Beasiswa berhak memilih sendiri bidang studi dan universitas yang dituju, Namun, bidang studi yang diprioritaskan adalah yang berkaitan dengan dunia pendidikan dan kebudayaan, seperti Manajemen Pendidikan, Kurikulum dan Pedagogi, Perfilmkan, Kebudayaan, dan Kebijakan Publik.

Selain itu, diutamakan pula bidang studi yang sesuai dengan program prioritas nasional, yaitu bidang pertanian, kamaritiman, pariwisata, dan industri kreatif. Program Beasiswa Unggulan juga tersedia bagi karyawan Kemendikbud yang menunjukkan prestasi kerja yang baik, untuk meningkatkan kualitas SDM bagi karyawan di lingkungan Kemendikbud. Tidak hanya beasiswa untuk melanjutkan pendidikan formal, Beasiswa Unggulan juga memberikan bantuan riset, lokakarya, pelatihan, dan pagelaran bagi para peneliti dan pegiat pendidikan dan kebudayaan.

Selain diberikan kepada mahasiswa Indonesia, beasiswa unggulan juga diberikan kepada mahasiswa asing yang ingin melanjutkan studi S2 dan S3 di Indonesia. Beasiswa ini ditujukan untuk memperkuat hubungan dan kerja sama Indonesia dengan negara sahabat, serta mempromosikan pendidikan, bahasa, dan seni budaya Indonesia di kancah internasional. Pada tahun 2016, telah dilakukan dua kali proses penerimaan Beasiswa Unggulan yang menghasilkan 1.369 penerima.
beasiswa. Jumlah penerima Beasiswa Unggulan pada tiga tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel.

Mulai tahun ini, sistem penerimaan Beasiswa Unggulan yang semula mengedepankan aspek perguruan tinggi sebagai basis data, diubah menjadi pengelolaan tersentral melalui program pendataan berbasis IT (sistem daring) dengan mengoptimalkan laman www.beasiswaunggulan.kemdikbud.go.id dalam proses sosialisasi, seleksi, evaluasi, dan pusat data penerima beasiswa. Dengan menggunakan sistem daring yang tersentralisasi, diharapkan Beasiswa Unggulan semakin dapat menjangkau putera-puteri terbaik bangsa. Akses terhadap program Beasiswa Unggulan diharapkan menjadi lebih mudah, sehingga calon penerima memiliki kesempatan yang sama untuk berkompetisi dalam mengikuti program Beasiswa Unggulan. Teknologi Informasi ini juga diharapkan memudahkan dalam pencatatan, pendataan, dan pencarian terhadap calon serta akan lebih meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.


### Jumlah Penerima Beasiswa Unggulan 2013 - 2015

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tahun</th>
<th>S1</th>
<th>S2</th>
<th>S3</th>
<th>Jumlah</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2013</td>
<td>756</td>
<td>955</td>
<td>81</td>
<td>1.792</td>
</tr>
<tr>
<td>2014</td>
<td>419</td>
<td>766</td>
<td>52</td>
<td>1.237</td>
</tr>
<tr>
<td>2015</td>
<td>713</td>
<td>833</td>
<td>68</td>
<td>1.614</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber: Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri

### Laman Beasiswa Unggulan

![Laman Beasiswa Unggulan](image-url)
Revitalisasi Museum: Edukatif, Rekreatif, dan Komunikatif

Banyak orang masih menilai museum dengan cara pandang lama. Museum sumber ilmu pengetahuan?


Museum Tino Sidin diharapkan dapat menginspirasi anak-anak untuk gigih dan pantang menyerah dalam mencapai cita-cita sebagaimana proses menggambar yang membutuhkan ketekunan.

sebagaimana proses menggambar yang membutuhkan ketekunan.

Taman yang berupa rumah dan galeri yang resmi dibuka untuk umum sejak 4 Oktober 2014 diharapkan mampu menjadi fasilitator lahirnya Tino Sidin yang baru dari kalangan generasi muda. Di sini Anda dapat menemukan barang, dokumen dan arsip terutama gambar sketsa.


Salah satu sudut Museum Tino Sidin
Museum merupakan objek budaya yang memiliki fungsi strategis dalam pembangunan sebuah bangsa

[ Direktur Jenderal Kebudayaan - Hilmar Farid ]


Kemendikbud juga sedang mengembangkan museum berbasis kampus yakni Museum Etnografi Universitas Airlangga. Keunikan
museum ini terletak pada ratusan koleksi barang bersejarah yang berkaitan dengan prosesi kematian di berbagai daerah di Indonesia. “Kematian” menjadi tema utama yang disepakati sebagai ikon sekaligus menjadi pameran tetap. Jalan cerita museum tersebut akan ditata sedemikian rupa sehingga pengunjung tidak terfokus pada kesan mengerikan dari tema kematian tersebut, melainkan pada misi edukasi akan unsur budaya, tradisi, dan filosofi dari masyarakat yang menjalankan prosesi tersebut.

Museum Etnografi ini mengemban tanggung jawab yang besar tidak hanya dalam melestarikan koleksi-koleksinya, tetapi juga dalam mengomunikasikan hasil penelitian dan penemuan para antropolog Unair lewat dialog-dialog publik. Lewat dialog tersebut, publik mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pengetahuan mengenai kekayaan etnografi Indonesia yang menjadi koleksi museum.

Bersamaan dengan proses revitalisasi ketiga museum di atas, terdapat 21 museum yang mendapatkan dana revitalisasi dari pemerintah pusat. Namun, pelaksanaan revitalisasi dan pengelolaan dilakukan oleh pemerintah daerah. Sejumlah 21 museum tersebut berada dalam tahapan revitalisasi yang berbeda-beda.


Diorama proses penelitian arkeologi di Museum Sangiran

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Revitalisasi Museum: Edukatif, Rekreatif, dan Komunikatif
Galeri Nasional Indonesia, “Rumah Besar” Perupa Indonesia

Galeri Nasional Indonesia (GNI) semakin mengkokohkan posisinya sebagai “Rumah Besar” Perupa Indonesia.

Kemendikbud melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan terus mengembangkan eksistensi GNI. Selain sebagai ruang pamer prestisius yang menjadi dambaan para perupa Indonesia, GNI juga mengemban fungsi pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan karya seni rupa untuk layanan edukasi.

Melalui pengembangan GNI, Kemendikbud memperluas kesempatan bagi masyarakat untuk mengapresiasi seni dan berkesenian. Pengembangan kapasitas ini semakin mengukuhkan GNI sebagai tolok ukur perkembangan senirupa Indonesia yang konsisten dalam pemanfaatan karya seni rupa sebagai bagian dari agenda revolusi karakter bangsa.


Presiden Joko Widodo, Ibu Megawati Soekarnoputri beserta Undangan pada pembukaan pameran lukisan koleksi Istana Negara 17 l 71 di Galeri Nasional

selama sebulan digelar, pameran ini mampu memancing sekitar 35.000 pengunjung dari berbagai kalangan, baik dari Indonesia maupun luar negeri.

“Pameran ini menjadi bukti bahwa seni rupa itu hidup dan ada penggemarnya, terbukti dari antusiasme pengunjung yang datang ke Galeri Nasional Indonesia,” kata Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid.

Kemendikbud juga menggelar sejumlah acara penting lain di GNI sepanjang tahun 2016. Pada peringatan Hari Pendidikan


Harapan yang sama datang dari Tubagus ‘Andre’ Sukmana, Kepala GNI. “Kepada para pemangku kepentingan di bidang pendidikan dan kebudayaan, serta masyarakat luas yang berkesempatan mengapresiasi pameran ini, diharapkan mampu memberi penilaian positif serta menyerap nilai-nilai estetik dan edukatif yang disuguhkan, sehingga pagelaran ini menjadi media bagi kita semua untuk menjadi apresiator seni yang hebat,” ujarnya.


Kesempatan, tolok ukur, dan karakter merupakan kata-kata kunci yang akan terus menjadi pedoman Kemendikbud dalam mengembangkan GNI.


Pada saat pembukaan pameran Manifesto V, Mendikbud yang kala itu dijabat Anies Baswedan menyatakan, “Ini adalah salah satu cara bagi para seniman untuk membagi pesan moral untuk kebaikan masyarakat melalui media seni rupa”.


Kesempatan, tolok ukur, dan karakter merupakan kata-kata kunci yang akan terus menjadi pedoman Kemendikbud dalam mengembangkan GNI. Kemendikbud terus melakukan hal penting lainnya, yaitu menggalang kerja sama dengan daerah dalam riset untuk mengenali potensi daerah, dan mengusung pameran nasional yang mengutamakan ekspresi daerah. Kemendikbud juga mengupayakan kerja sama strategis dengan berbagai pihak sebagai upaya memunculkan seni rupa Indonesia di kancah dunia.
Promosi dan Diplomasi Budaya dan Bahasa Indonesia

Setelah menjadi ‘tamuh kehormatan’ (guest of honor) pada pelaksanaan Frankfurt Book Fair 2015, Jerman, nama Indonesia kembali menarik perhatian dalam kancah internasional.


Selain sineas di belakang “Prenjak”, sejumlah film Indonesia yang lolos seleksi mengikuti festival film internasional lainnya, juga mendapatkan dukungan serupa. Antara lain, untuk film Indonesia yang lolos seleksi mengikuti Festival Film Rotterdam, Festival Film Berlin, DC Independent Film Festival, Asian Film Awards, Salaya Documentary International Film Festival, Cinemadamare Film Festival, Locarno International Film Festival, dan Venice International Film Festival.

Bahasa bisa menjadi jembatan agar kebudayaan Indonesia semakin dikenal bangsa lain. Salah satu program diplomasi bahasa dan budaya yang diselenggarakan Kemenkudikbud adalah pembangunan Pusat Budaya Indonesia di Timor Leste sebagai tindak lanjut rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan RI-Timor Leste. Program yang dijalankan di Pusat Budaya Indonesia ini antara lain kursus Bahasa Indonesia, pameran budaya, perlombaan di bidang kebudayaan, permainan anak, serta informasi tentang kebudayaan Indonesia.


dunia sebagai kekayaan (asset) bangsa.

Sebelumnya, pada 2 Desember 2019, tiga genre tari tradisional Bali diakui sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia pada kategori Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity. Tiga genre tersebut adalah Tarian Sakral (Tari Rejang, Sanghyang Dedari dan Ritual Baris); Tarian Semi-Sakral (termasuk Topeng Sidakarya, Gambuh ballet, dan Wayang Wong ballet); dan Tarian Pertunjukan (termasuk Legong Keraton, Joged Bumbung, dan Barong).


Diplomasi Budaya juga dilakukan dengan koordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBR) dalam acara-acara budaya internasional yang dilaksanakan di Tunisia, Uzbekistan, Italia, Spanyol, Rusia (dalam Festival Budaya Asean dan Rusia), serta acara budaya internasional di Forde, Norwegia.


Selain itu, Kemendikbud melalui Badan Bahasa juga memiliki program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) yang bertugas menyusun mutu penggunaan, pembelajaran, dan fungsi Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Program ini mengurus berbagai lembaga yang memberikan pelatihan BIPA serta buku saku bagi para penutur asing. Lembaga BIPA berjumlah 251 lembaga yang tersebar di 22 negara. Jumlah yang besar dan menunjukkan antusiasme masyarakat internasional mempelajari Bahasa Indonesia.

Rumah Peradaban: Mengungkap, Memaknai, Mencintai

Rumah Peradaban merupakan program Pusat Penelitian Arkeologi Nasional (Puslit Arkenas) di bawah naungan Kemendikbud, dan terhubung dengan sepuluh Balai Arkeologi di seluruh Indonesia.

Kontribusi besar Rumah Peradaban adalah memasyarakatkan hasil penelitian yang dilakukan Puslit Arkenas ke dalam bentuk yang mudah dipahami dan menyenangkan bagi masyarakat.

Rumah Peradaban mempunyai semboyan “mengungkap, memaknai, dan mencintai”. Semboyan tersebut diterjemahkan ke dalam beragam kegiatan pada tahun 2016, sesuai dengan pesan yang terkandung dalam Nawacita, yaitu kebhinekaan, kemaritiman, dan mengangkat daerah 3T (terluar, terdepan, tertinggal).


Setelah beberapa tahun penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa Gua Harimau menjadi lokasi pertama kedatangan manusia Austronesia di Sumatera. Tidak berhenti sampai di situ, tindak lanjut dilakukan oleh Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan
Permuseuman Kemendikbud melalui pembangunan museum di kawasan tersebut. Melalui hasil penelitian tersebut, saat ini Gua Harimau tidak hanya menjadi Rumah Peradaban bagi bangsa Indonesia, namun juga “rumah peradaban” bagi masyarakat dunia.


Setelah memaknai, masyarakat akan diarahkan untuk mampu menghubungkan hal tersebut
Masyarakat diharapkan sadar bahwa budaya yang terjadi pada saat ini merupakan hasil dari perjalanan masa lampau, yang patut dihargai dan dicintai.

dengan keadaannya sekarang. Masyarakat diharapkan sadar bahwa budaya yang terjadi pada saat ini merupakan hasil dari perjalanan masa lampau, yang patut dihargai dan dicintai.


Berbagi cara bisa dilakukan untuk menumbuhkan rasa cinta masyarakat akan budaya Indonesia, termasuk di antaranya hal penataan perkotaan. Banyak yang sebatas memahami bahwa penataan kota-kota besar di Indonesia untuk mewujudkan peningkatan akses penduduk terhadap lingkungan pemukiman yang berkualitas saja. Padahal lebih dari itu, penataan kota harus memperhatikan cagar budaya. Pembangunan dan penataan perkotaan sebaiknya diserahkan kepada arsitek yang berkompeten terhadap hal tersebut.


Sementara itu, Ketua Asosiasi Antropologi Indonesia, Idham Bachtiar Setiadi menjelaskan terkait pembangunan perkotaan yang ramah terhadap cagar budaya. “Peran organisasi profesi di sini adalah sebagai komunikator pengetahuan, menghimpun dan mendistribusikan ilmu, serta membantu dan mengawal konseptualisasi pengetahuan untuk aplikasi dalam perencanaan,” ujar Idham. Sedangkan peran yang bisa dimainkan dari perspektif kesejarahan adalah mendorong aktivitas masyarakat untuk melakukan peningkatan kemampuan dan minat terhadap sejarah perkotaan.


Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kemendikbud Dukung Perfilman Indonesia

Sebagai kementerian yang membawahi masalah pendidikan dan kebudayaan, Kemendikbud juga menaruh perhatian khusus terhadap perkembangan film Indonesia.

Pusat Pengembangan Perfilman Kemendikbud menyadari pentingnya pertumbuhan film nasional. Pertumbuhan ini bukan hanya dilihat dari segi potensi ekonomi kreatif, tetapi juga pengaruh film yang besar sebagai produk budaya.

Itulah sebabnya, selain menyokong pelaksanaan ajang legendaris perfilman nasional seperti Festival Film Indonesia (FFI), Kemendikbud juga menginisiasi pelaksanaan ajang tahunan lainnya untuk insan perfilman, yaitu Apresiasi Film Indonesia (AFI). Gagasan menggulirkan AFI bersumber dari keinginan Kemendikbud untuk memberikan penghargaan kepada insan film Indonesia.

Kriteria penerima penghargaan adalah mereka yang memiliki komitmen dalam berkarya dengan memproduksi film-film berbasis nilai budaya, kearifan lokal, dan pembangunan karakter bangsa.

Harapannya, para sineas Indonesia semakin terpacu membuat karya film berkualitas sehingga dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat Indonesia. Film Indonesia sebagai produk budaya saat ini dirasakan efektif untuk menyampaikan pesan yang berkaitan dengan nilai budaya dan pembangunan karakter bangsa. Tidak berhenti di situ, Kemendikbud juga ingin mendorong masyarakat untuk mau menonton film Indonesia berkualitas dan menjadikannya tuan rumah di negeri sendiri.


AFI 2016 merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mengenai, menilai, dan menghargai bobot kesenian yang berbasis nilai-nilai budaya, kearifan lokal, dan pembangunan karakter bangsa. Hal-hal tersebut tercermin pada sejumlah produk film yang dibuat, diedarkan, dan melibatkan pemain serta tim produksi dari Indonesia.

Saat memberikan sambutan, Mendikbud Muhadjir Effendy menyatakan, pemberian penghargaan kepada insan perfilman sesuai dengan ciri khas
## Penerima Anugerah AFI 2016

### KATEGORI PENGHARGAAN UTAMA

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kategori</th>
<th>Film Panjang Bioskop</th>
<th>Film Dokumenter Umum</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Apresiasi</td>
<td>&quot;Salawaku&quot;</td>
<td>&quot;Pantjasila: Cita-cita &amp; Realita&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>Apresiasi Film Panjang</td>
<td>&quot;Istirahatlah Kata-kata&quot;</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Apresiasi Film Dokumenter</td>
<td>Mahasiswa &amp; Pelajar</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Apresiasi Film Pendek Umum</td>
<td>&quot;Pangreh&quot;</td>
<td>&quot;Kami Hanya Menjalankan Perintah, Jenderal!&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>Apresiasi Film Pendek Pelajar</td>
<td>&quot;Ijinkan Saya Menikahinya&quot;</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Apresiasi Film Pendek Mahasiswa</td>
<td>&quot;Emak&quot;</td>
<td>&quot;Amarta&quot;</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### KATEGORI PENGHARGAAN KHUSUS

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kategori</th>
<th>Film Panjang Bioskop</th>
<th>Film Dokumenter Umum</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Apresiasi Asosiasi</td>
<td>&quot;Asosiasi Produser Film Indonesia (APROFI)&quot;</td>
<td>&quot;Layar Perak [Metro TV]&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>Apresiasi Lembaga Pendidikan</td>
<td>&quot;Universitas Multimedia Nusantara, Serpong&quot;</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Apresiasi Komunitas</td>
<td>&quot;Sumbawa Cinema Society&quot;</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Apresiasi Festival Film</td>
<td>&quot;Jogja-Netpac Asian Film Festival&quot;</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Apresiasi Poster Film</td>
<td>&quot;Ada Apa Dengan Cinta 2&quot;</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Apresiasi Kritik Film</td>
<td>&quot;Hikmat Darmawan&quot;</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### KATEGORI PENGHARGAAN INSPIRATIF

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kategori</th>
<th>Film Panjang Bioskop</th>
<th>Film Dokumenter Umum</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Adi Karya</td>
<td>&quot;Si Mamad&quot;</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Adi Insani</td>
<td>&quot;Hartanto&quot;</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
FFI bertujuan untuk mengembangkan dan menguatkan industri film dalam negeri dan melekatkan hubungan kebudayaan dengan masyarakat
dari AFI itu sendiri. Penilaianannya menitikberatkan kepada karya-karya film yang sarat akan nilai budaya, kearifan lokal, serta pembangunan karakter bangsa.


Festival Film Indonesia (FFI)

Kualitas penyelenggaraan festival film di tingkat lokal dan nasional saat ini semakin meningkat. estival Film Indonesia (FFI) memiliki catatan panjang yang penuh gejolak dan bahkan dalam beberapa kali penyelenggaraannya sempat mendapatkan ketidakpercayaan dari insan perfilman. Namun secara umum tujuan diselenggarakannya FFI adalah menumbuhkan apresiasi terhadap film Indonesia serta menjadi momentum yang tepat untuk mengevaluasi produksi film dalam negeri selama setahun.

Tahun ini Pusat Pengembangan Perfilman Kemendikbud berusaha melanjutkan apa yang telah dicapai pada FFI tahun lalu sebagai upaya melestarikan nilai-nilai budaya dan pembangunan karakter bangsa melalui film. FFI bertujuan untuk mengembangkan dan menguatkan industri film dalam negeri dan melekatkan hubungan kebudayaan dengan masyarakat.

FFI berfungsi sebagai tolok ukur prestasi, apresiasi, dan promosi bagi film Indonesia. Kemendikbud terkait dengan Festival Film Indonesia dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah berusaha untuk:

a. Mempromosikan film Indonesia sebagai produk budaya yang penting bagi pendidikan publik sekaligus merangsang apresiasi masyarakat untuk menonton film Indonesia
b. Meningkatkan produksi film nasional baik kualitas maupun kuantitas; dan


World Culture Forum 2016 sebagai Gerakan Kemanusiaan

Pembangunan di banyak tempat di dunia masih menghadapi berbagai krisis yang berkepanjangan dan tak kunjung mendapatkan solusinya.

Pada potret-potret pembangunan yang mengalami krisis tersebut kerap ditemukan hubungan yang tidak harmonis antara budaya dan metode-metode pembangunan yang diambil.

Ketidakharmonisan yang nyata tersebut masih dipandang sebelah mata dan dibiarkan berlarut-larut sehingga melahirkan krisis multidimensi lintas generasi,
“World Culture Forum merupakan usaha Indonesia untuk memberi peran yang lebih penting bagi kebudayaan dalam era ini,” ujar Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid pada pembukaan resmi World Culture Forum (WCF) 2016.

Dalam beberapa dekade terakhir, berbagai usulan hasil pemikiran dari berbagai tempat di dunia terus menggarisbawahi pentingnya kebudayaan menjadi bagian metode pembangunan yang efektif. WCF, yang pertama kali diselenggarakan pada tahun 2013, merupakan upaya berkesinambungan untuk mempromosikan budaya sebagai penyokong dan pendorong pembangunan berkelanjutan.


Lewat pesan videonya, Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon dan Direktur Jenderal UNESCO Irina Bokova mengapresiasi Indonesia yang telah berinisiatif menyelenggarakan WCF 2016.


Pada enam simposium pembuka yang dilaksanakan pada 11-12 Oktober 2016 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), sebanyak 10 pembicara dan enam pembahas tidak hanya menyuguhkan informasi dan menawarkan ide-ide yang inspiratif, tetapi juga mengajak peserta berdiskusi. Para peserta yang merupakan individu-individu kritis ini pun antusias menyambut sesi-diskusi tersebut.

Simposium membahas enam subtema budaya: kebudayaan dan pembangunan desa; air bagi kehidupan; kebudayaan dan dinamika perkotaan; kebudayaan dan dunia digital; perbedaan budaya lintas komunitas dan kelas; serta kaitan kebudayaan dan pembangunan yang bertanggung jawab. Tiga Simposium awal dilaksanakan serentak pada 1 Oktober, dan tiga simposium berikutnya dilaksanakan pada hari berikutnya.


Simposium kedua bertema “Air bagi kehidupan: Mereksosiliasi Pertumbuhan Sosio-Ekonomi dan Etika Lingkungan” Peserta belajar dari banyak studi kasus dan studi
# Daftar Pembicara Simposium

<table>
<thead>
<tr>
<th>11 Oktober</th>
<th>Simposium-1</th>
<th>Simposium-2</th>
<th>Simposium-3</th>
</tr>
</thead>
</table>
| **Pembicara** | Aleta Baun  
Kepala Desa Mollo,  
Nusa Tenggara Timur | Wayan Windia  
Ahli Subak dan Profesor di  
Universitas Udayana, Bali | Arief Azis  
Direktur Change.org Indonesia |
| | Lanying Zhang  
Direktur Pusat Rekonstruksi  
Pedesaan Liang Shuming, RRC | Hendro Sangkoyo  
Aktivis Lingkungan | Nyoman Nuarta  
Perupa di Gerakan Seni Rupa  
Baru Indonesia dan Ahli Seni Rupa |
| | Soon-Tak Lee  
Profesor di Universitas Yeungnam, Korea Selatan | Satoko Kishimoto  
Aktivis pada proyek Keadilan Air,  
Transnational Institute (TNI) | Ridwan Kamil  
Walikota Bandung dan Arsitek |
| **Pembahas** | Diyah Lestari  
Ahli Tari dan Profesor di  
Universitas Minnesota, US | Semsar Yazdi  
Direktur Pusat Internasional mengenai Qanat dan Struktur Hidrolik Bersejarah, Iran | Shahbaz Khan  
Direktor Kantor UNESCO di  
Jakarta |
| **Moderator** | Sandra Moniaga  
Ahli Hukum Adat | Shinsuke Ota  
Wakil Presiden Komisi  
Internasional mengenai Irigasi dan Drainase, Jepang | Eka Budianta  
Penulis |

<table>
<thead>
<tr>
<th>12 Oktober</th>
<th>Simposium-4</th>
<th>Simposium-5</th>
<th>Simposium-6</th>
</tr>
</thead>
</table>
| **Pembicara** | Luisella Mazza  
Kepala Operasional Institut Kebudayaan Google | Celio Turino  
Culture Points, Brazil | Din Syamsuddin  
Ketua Majelis Ulama Indonesia  
dan Presiden Komite Eksekutif  
Konferensi Keagamaan dan  
Perdamaian se-Asia |
| | Jill Cousins  
Direktur Eksekutif Europeana | Chen Kuan-Hsing  
Penulis Asia as Method | Ahmad Fedyani Saifuddin  
Profesor Antropologi  
Universitas Indonesia |
| | Ahn Kwang Han  
Presiden MBC, Korea Selatan | Nani Zulminarni  
Pendiri PEKKA dan Ahli Kajian Gender | Mocef Ben Abdeljelil  
Dekan Fakultas Sastra dan  
Humaniora, Universitas Sousse,  
Tunisia |
| | Belva Devara  
CEO Ruangguru.com | | |
| **Pembahas** | Yanuar Nugroho  
Deputi II Kepala Staf Kepresidenan | Shadia Marhaban  
Mediator Internasional, Konsultan Perempuan untuk PBB, Harvard Fellow, Ahli Kajian Gender,  
Direktur Liga Inong Aceh | AKP Mochtan  
Wakil Sekretaris-Jenderal  
ASEAN untuk Urusan  
Masyarakat dan Perusahaan |
| **Moderator** | Desi Anwar  
Penyiar Berita Senior dan Direktur CNN Indonesia | Melani Budianta  
Profesor Studi Gender dan  
Pascakolonialisme, Universitas Indonesia | Heddy Shri Ahimsa Putra  
Profesor Antropologi, Universitas Gadjah Mada |
...budaya penting untuk dilihat bukan sebagai produk, melainkan sebagai suatu proses yang menghubungkan dan menyatukan nilai-nilai dan perspektif-perspektif yang ada


Tidak ketinggalan, kebutuhan untuk menyebarluaskan nilai-nilai saling menghormati perbedaan budaya dan keragaman demi menciptakan keharmonisan dalam masyarakat perkotaan yang heterogen. Walikota Bandung Ridwal Kamil, salah satu pembicara, menegaskan, “Kita tidak menciptakan perkerjaan untuk membuat diri kensanga. Oleh karena itu kita harus siap untuk menerima keberagaman dan menunjukkan toleransi untuk kehidupan perkerjaan yang damai dan harmonis.”


Simposium keenam, “Keragaman Budaya untuk Pembangunan yang Bertanggungjawab”, mengajak peserta untuk menyatukan pentingnya mengatasi tantangan-tantangan yang muncul terhadap upaya pengarusutamaan budaya dalam pembangunan yang sering kali muncul dari segi ekonomi dan politik. Simposium
Deklarasi Bali

1. Mendukung pelaksanaan penuh Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 dan bekerja menuju integrasi yang lebih nyata dan efektif, dan pengaruh budaya dalam strategi di semua tingkatan kebijakan pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan.

2. Mempromosikan budaya perdamaian dalam masyarakat yang dapat mendorong masyarakat adil dan inklusif, yang menjunjung tinggi keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan budaya lokal untuk memperbaiki hubungan yang tidak seimbang antara kontribusi ekosistem dengan tuntutan manusia.

3. Memperkuat keterkaitan antara pemangku kepentingan yang bersangkutan untuk menciptakan praktik-praktik terbaik yang lazim digunakan untuk pembangunan berkelanjutan yang inklusif.

4. Memperkuat peran pemuda dalam aktivitas ekonomi, budaya dan sosial-politik serta lingkungan dalam rangka mempromosikan pemahaman bersama dan membawa transformasi sosial yang positif serta kesetaraan menuju pembangunan berkelanjutan, termasuk, namun tidak terbatas, pada promosi ekonomi kreatif.

5. Memperkuat peran organisasi antarpemerintah dan organisasi nonpemerintah internasional untuk mengembangkan jaringan dan kerjasama yang bertujuan untuk mempromosikan fenomena bersama dan membawa transformasi sosial yang positif serta kesetaraan menuju pembangunan berkelanjutan yang inklusif.

6. Memperkuat peran organisasi antarpemerintah dan organisasi nonpemerintah internasional untuk mengembangkan jaringan dan kerjasama yang bertujuan untuk mempromosikan fenomena bersama dan membawa transformasi sosial yang positif serta kesetaraan menuju pembangunan berkelanjutan yang inklusif.

7. Memperkuat peran organisasi antarpemerintah dan organisasi nonpemerintah internasional untuk mengembangkan jaringan dan kerjasama yang bertujuan untuk mempromosikan fenomena bersama dan membawa transformasi sosial yang positif serta kesetaraan menuju pembangunan berkelanjutan yang inklusif.

8. Memperkuat peran organisasi antarpemerintah dan organisasi nonpemerintah internasional untuk mengembangkan jaringan dan kerjasama yang bertujuan untuk mempromosikan fenomena bersama dan membawa transformasi sosial yang positif serta kesetaraan menuju pembangunan berkelanjutan yang inklusif.

9. Memperkuat peran organisasi antarpemerintah dan organisasi nonpemerintah internasional untuk mengembangkan jaringan dan kerjasama yang bertujuan untuk mempromosikan fenomena bersama dan membawa transformasi sosial yang positif serta kesetaraan menuju pembangunan berkelanjutan yang inklusif.

10. Memperkuat peran organisasi antarpemerintah dan organisasi nonpemerintah internasional untuk mengembangkan jaringan dan kerjasama yang bertujuan untuk mempromosikan fenomena bersama dan membawa transformasi sosial yang positif serta kesetaraan menuju pembangunan berkelanjutan yang inklusif.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

World Culture Forum 2016 sebagai Gerakan Kemanusiaan

Selain menjalani forum-forum diskusi dari pagi hingga siang hari, peserta WCF 2016 juga menikmati karnaval budaya, pertunjukan tari kolaborasi, dan pertunjukan musik orkestra yang menampilkan pianis Ananda Sukarlan.


Merayakan Bulan Pendidikan dan Kebudayaan 2016

Pendidikan harus bisa membawa perubahan, menghapus kegelapan menuju terangnya dunia yang penuh harapan. Ki Hadjar Dewantara mengungkapkannya lewat kata-kata bertuah, “Pendidikan yang memerdekakan.”


Bulan Dikbud bukan hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga gerakan yang mengajak seluruh masyarakat untuk peduli terhadap pendidikan dan kebudayaan. Kemendikbud tidak hendak mendominasi menjadi pemeran utama dalam perayaan ini, namun cukup berperan sebagai fasilitator antara publik, komunitas, dan masyarakat yang ingin turut berpartisipasi.


Lewat subtema “kembali ke sekolah”, Kemendikbud mengajak berbagai kalangan untuk kembali ke sekolah untuk bernostalgia dan berbagi pengalaman tentang profesi yang mereka jalani sekarang. Gerakan kembali ke sekolah ini sudah dijalankan sebelumnya untuk memberikan inspirasi kepada para siswa. Kalangan masyarakat dari beragam profesi bisa berbagi cerita, bagaimana pendidikan menjadi hal penting dalam perjalanan hidup mereka. Masyarakat juga diajak kembali ke sekolah untuk memulai profesi dan membantu sekolah. Lewat aplikasi Sekolah Kita yang secara transparan memperlihatkan data sekolah-sekolah di Indonesia, lulusan yang sudah berhasil diajak berkontribusi ke sekolah tempat mereka belajar dulu.

Indonesia, misalnya, menggelar acara di Plaza Insan Berprestasi, kantor Kemendikbud. Mereka melibatkan ratusan siswa SMA dan SMK untuk berbagi ilmu dan pengalaman dalam bidang seni peran dan film.


Tidak hanya di Jakarta, kota lain juga menyelenggarakan perayaan pendidikan serupa. Salah satunya, Bandung, mengadakan Festival Anak Bertanya dengan tema "membuka cakrawala, mematri cita-cita".

Kemendikbud juga membuka kantor kementerian dan menyediakan berbagai fasilitas selama satu bulan penuh untuk semua pihak yang ingin mengadakan acara bernafas pendidikan dan kebudayaan. Syarat yang harus dipenuhi untuk ikut berpartisipasi, antara lain, kegiatan yang diselenggarakan berhubungan dengan pendidikan dan kebudayaan serta tidak memungut bayaran. Beberapa pihak yang ikut berpartisipasi antara lain Galeri Nasional yang mengadakan pameran kesenian bertemakan...
Pemerintah ingin bergerak bersama dengan seluruh lapisan masyarakat. Beberapa agenda besar seperti pendidikan karakter dan penanaman literasi dasar, jelas membutuhkan keterlibatan masyarakat luas.


Berbagai aktivitas seperti Bus Sekolah dengan fasilitas pembelajaran masa depan, berbagai karya pelajar SMK, program “Jalur Rempah”, serta dialog tentang literasi dan pendidikan dini, menjadi pilihan publik yang memadati acara penutupan Bulan Dikbud. Semoga antusiasme dan keterlibatan publik juga berlaku pada setiap upaya menyuskeskan beragam kegiatan pendidikan dan kebudayaan di masa-masa mendatang.
DAPODIK: Satu Nusa Satu Data

Data merupakan komponen terpenting dalam sebuah perencanaan.

Data yang akurat, terpercaya, dan terkini akan menguatkan perencanaan yang disusun. Kemendikbud mencoba membuat Program Data Pokok Pendidikan (Dapodik)—sebuah sistem pendataan pendidikan skala nasional yang terpadu, akurat, terpercaya, dan terkini.


Sebelum tahun 2012, Dapodik dikoordinasikan Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri (Biro PKLN). Setelah serah terima secara resmi dan penetapan penutupan

Aplikasi Dapodikdas berbasis servis jaringan, dengan hosting lokal (localhost) pada komputer yang digunakan satuan pendidikan. Proses memasukkan (input) data dan pengiriman data tidak dilakukan secara seketika (real time), melainkan dengan sistem sinkronisasi. Pengiriman data berupa paket basis data dengan kode registrasi yang berbeda-beda untuk masing-masing satuan pendidikan, sehingga dalam pengisian data pendidikan dari Satuan Pendidikan pun dapat dilakukan secara luring (offline).


Permendikbud tersebut bertujuan untuk mewujudkan basis data tunggal sehingga dapat tercipta tata kelola data pendidikan yang terpadu dan representatif untuk memenuhi kebutuhan Kemendikbud dan pemangku kepentingan lain. Tujuan lain adalah mendukung peningkatan efisiensi, efektivitas, dan sinergi kegiatan pengumpulan data pokok yang terintegrasi dalam satu sistem pendataan untuk digunakan oleh Kemendikbud dan seluruh pemangku kepentingan.

Permendikbud Nomor 79 tahun 2015 juga mengatur tugas masing-masing unit utama di Kemendikbud secara jelas. Termasuk, Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK), memiliki tugas:
1. Merancang basis data pendidikan relasional sehingga mampu menghasilkan data longitudinal untuk tiap entitas pendidikan;
2. Merancang satu formulir pendataan yang mencakup semua atribut yang diperlukan untuk tiap entitas pendidikan;
3. Membangun pusat data kementerian untuk menampung dan mengintegrasi semua data yang dihasilkan dari kegiatan pengumpulan data;
4. Membangun sistem untuk melakukan verifikasi dan validasi, dengan melibatkan satuan kerja dan institusi lain yang mempunyai kemampuan dan/atau otoritas dalam menentukan validitas data sebagai validator;
5. Menetapkan mekanisme standar bagi sistem/aplikasi lain dalam berintegrasi dengan Dapodik dan mengevaluasi pemenuhan standar tersebut;
6. Memastikan komitmen institusi lain pengguna data, menjaga kerahasiaan data pendidikan; dan
7. Mengevaluasi seluruh unit kerja yang terlibat dalam Dapodik sehingga kegiatan pengumpulan Dapodik terintegrasi dalam satu sistem pendataan dengan efektivitas dan efisiensi.

Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat memiliki tugas:
1. Merancang prosedur pengumpulan data dengan memanfaatkan mekanisme yang berlaku pada masing-masing direktorat jenderal;
2. Melakukan sosialisasi formulir dan prosedur yang dihasilkan untuk satuan pendidikan di bawah pembinaan masing-masing direktorat jenderal;
3. Membangun sistem pengumpulan dan penyimpanan data yang cepat dan efisien;
4. Mengkoordinir pengumpulan semua Dapodik dari satuan pendidikan yang berada di bawah pembinaan masing-masing direktorat jenderal;
5. Menyediakan layanan helpdesk Dapodik; dan
6. Menginformasikan kepada unit kerja mengenai semua atribut yang ingin didata terkait dengan entitas pendidikan yang menjadi bahan kebijakannya.

   Sedangkan unit kerja eselon I lainnya mempunyai tugas:
   1. Melakukan pengumpulan data transaksional sesuai dengan kebutuhan;
   2. Melakukan koordinasi dengan sekretariat eselon I terkait;

   Dinas Pendidikan baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota juga memiliki tugas tersendiri dalam proses satu data pendidikan, yaitu:
   1. Melakukan pengisian dan pengiriman data pengawas sekolah.
   2. Sosialisasi, bimbingan, dan layanan teknis;
   3. Melakukan pengelolaan manajemen pendataan;
   4. Melakukan verifikasi dan validasi tingkat provinsi/kabupaten/kota; dan
   5. Menginstruksikan kepada semua satuan pendidikan di wilayah kerja masing-masing untuk melakukan pengumpulan dan pengiriman data melalui Dapodik;
   6. Memanfaatkan data yang dihasilkan dari Dapodik untuk mendukung program pembangunan pendidikan di wilayahnya masing-masing; dan
   7. Memfasilitasi dan menegur kepada semua satuan pendidikan di wilayah kerja masing-masing yang tidak melakukan pemutakhiran data secara berkala; dan

9. Menyediakan dan memelihara infrastruktur pendataan di tingkat satuan pendidikan maupun tingkat daerah;

   Satuan pendidikan, sebagai ujung tombak pendataan memiliki tugas seperti:
   1. Melakukan pengisian dan pengiriman data melalui Dapodik;
   2. Melakukan pemutakhiran data secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam satu semester;
   3. Memeriksa dampak data yang telah diisikan pada aplikasi Dapodik di sejumlah sistem transaksional Kementerian; dan

4. Menjamin kelengkapan, kebenaran dan kemutakhiran data yang dikirimkan.


   Operator Sekolah memiliki tugas melakukan pengisian data pendidikan yang ada pada satuan pendidikan tempatnya bertugas.

   Beberapa hal yang harus dilakukan seorang operator sekolah adalah: 1) menginstal Aplikasi Dapodik, termasuk melakukan pembaruan Aplikasi; 2) Memasukkan semua data Sekolah mulai dari Data Sekolah, Kondisi Sarana dan
Prasarana, Kepala Sekolah, PTK, Peserta Didik, dll.; 3) Setelah melakukan penginputan data pada Dapodik, tugas selanjutnya untuk melakukan sinkronisasi data dengan data server Dapodik; 4) Mencetak profil sekolah sebagai hasil laporan pengerjaan; 5) Melakukan Koreksi Data jika Ada Kesalahan/Perbaikan Data Sekolah, kemudian menyinkronkan dengan server.

Hasil pengumpulan data melalui Dapodik diintegrasikan oleh PDSPK, dan menjadi satu-satunya acuan dalam pelaksanaan kegiatan, kajian, dan pengambilan keputusan terkait data pendidikan yang didata. PDSPK juga menjadi satu-satunya unit yang menjadi distributor hasil olahan data Dapodik ke unit utama di lingkungan Kemendikbud dan secara berkala melaporkan hasil kerja kepada Menteri.

Pemanfaatan DAPODIK antara lain:
1. Sebagai Basis pencairan dana PIP, siswa yang sudah memiliki KIP belum bisa memanfaatkan dana PIP-nya jika belum dimasukan ke dalam Dapodik;
2. Baseline BOS, untuk perhitungan jumlah dana BOS tiap sekolah dihitung dari jumlah siswa yang sudah dimasukkan ke dalam Dapodik. Khusus untuk SMA, siswa yang dihitung sebagai dasar pencairan BOS adalah siswa yang sudah memiliki NISN;
3. Data awal peserta UN;
4. Pemberian NISN. NISN adalah hak siswa. Untuk mendapatkan NISN, siswa harus dimasukkan ke dalam Dapodik terlebih dahulu, untuk kemudian dilakukan verifikasi dan validasi di PDSPK.

Setiap sistem informasi manajemen untuk mengendalikan pelaksanaan program kerja dapat mengumpulkan data transaksional yang mengacu pada Dapodik sebagai referensi secara daring. Setiap pengumpulan data transaksional wajib berkontribusi untuk memperkaya informasi yang terdapat dalam Dapodik, dengan memberikan variabel output sistem transaksional tersebut menjadi bagian dari Dapodik.

Dari data yang akurat akan lahir kebijakan yang tepat. Dengan terintegrasinya seluruh entitas data pendidikan, tidak ada lagi perbedaan dan saling klaim data mana yang paling benar dan akurat. Data pendidikan yang valid, akurat, terkini, dan terpercaya yang berasal hanya dari satu sumber akan mempengaruhi proses pengambilan kebijakan pendidikan ke arah yang lebih baik dan terarah. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, dan satu data.
Regulasi untuk Pendidikan yang Lebih Baik

Tahun 2016 menjadi tahun yang penuh dengan perbaikan regulasi untuk pendidikan yang lebih baik.

Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan perubahan yang disebabkan perkembangan teknologi dan perubahan nilai-nilai kehidupan akibat perubahan zaman. Perkembangan teknologi dan kemajuan zaman telah membawa dampak dan perubahan besar pada lingkup pendidikan, yang kemudian mengubah pandangan dan pola pikir siswa serta pelaku pendidikan.


1. Permendikbud No. 64 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah,

2. Permendikbud No.79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan

3. Permendikbud No.82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

4. Permendikbud No.17 Tahun 2016 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Tambahkan Penghasilan

5. Permendikbud No.18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah

6. Permendikbud No.24 Tahun 2016 tentang KI dan KD Pelajaran Pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Menengah

7. Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME Pada Satuan Pendidikan


Selain kawasan berlaku peraturan di atas, berbagai peraturan lain juga akan terus ditambah. Hal ini bertujuan mendorong perubahan perilaku para peserta didik, pelaku pendidikan serta berbagai lapisan masyarakat agar dapat saling berkolaborasi dalam mendorong pembangunan dan peningkatan kualitas pendidikan yang berada di seluruh Indonesia.

Sekolah Aman

Sekolah adalah rumah kedua bagi anak dan menjadi bagian penting dalam pembentukan karakter dan pola pikir anak. Tak heran, banyak orang tua yang berpikir panjang dalam memilih sekolah yang tepat bagi anak-anaknya. Sekolah yang baik tentu saja sekolah yang menyenangkan dan dapat membuat anak-anak merasa betah belajar hingga tiba waktunya pulang. Untuk itu, lingkungan sekolah harus jauh dari segala tindakan yang mengancam keselamatan anak, seperti tindak kekerasan fisik maupun psikis.

Di sebagian daerah, kekerasan masih menjadi budaya dalam kegiatan belajar mengajar. Tidak sedikit guru yang beranggapan bahwa menghukum anak dengan kekerasan adalah tindakan yang wajar dengan dalil mendisiplinkan. Namun, seiring perkembangan...
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Regulasi untuk Pendidikan yang Lebih Baik

Regulasi untuk Pendidikan yang Lebih Baik

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

zaman pola pikir berubah dan yang sering terjadi justru sebaliknya. Tindakan guru menghukum murid dianggap menyalahi aturan kemanusiaan dan pelanggaran HAM. Tak jarang hukuman ringan seperti menasehati atau memberikan tugas tambahan justru diartikan sebagai tindakan hukuman yang tidak pantas dilakukan. Guru kerap menjadi sasaran bullying atau kemarahan orang tua.

Guru maupun siswa siswa patut dibela, sebab keduanya merupakan tonggak pembangunan bangsa. Menyiapkan hal tersebut, dan dalam upaya melindungi keduanya guru, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Permendikbud No.82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Permendikbud ini merumuskan kebijakan bagi pelaku pendidikan, para peserta didik, serta kolaborasi berbagai pihak (orang tua/wali, komite sekolah, masyarakat, pemerintah daerah dan pemerintah pusat) dalam mencegah dan menanggulangi tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah. Ragam tindak kekerasan yang diatur mencakup pelecehan, perundungan, penganiayaan, perkelahian, perpeloncoan, pemberasan, pencabulan, pemerkaosaan, tindak kekerasan atas dasar diskriminasi terhadap suku, agama, ras, dan/ atau antargolongan (SARA), serta tindak kekerasan lain. Aturan ini juga memuat sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar, serta mengharuskan setiap sekolah memasang Papan Informasi Sekolah Aman di serambi atau halaman depan sekolah sebagai langkah antisipasi serta upaya meminimalisasi tindak kekerasan.

Harapannya, kebijakan ini dapat menjadi dasar bagi para pelaku dan peserta pendidikan dalam membangun ekosistem sekolah yang ramah dan menyenangkan bagi seluruh peserta didik demi mewujudkan generasi-generasi terbaik negeri ini.

Kawal Sekolah Aman!
Jangan diamkan aksi kekerasan seperti pengerian, pelecehan, perpeloncoan, perundungan, pemberasan, dan tindak kekerasan lainnya, terjadi dan mencermati sekolah kita.

Kontak pelapor dan permintaan bantuan:
- Telepon SMAN 8 Tangerang Selatan: 021 - 7445375
- Telepon Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan: 021 - 75875168
- Telepon Polres Kec. Ciputat: 021 - 7492167
- Telepon Polres Tangerang Selatan: 021 - __________
- Laman pengaduan: http://sekolahaman_ kemendikbud.go.id
- SMS Kemendikbud: 0811-976-929
- Telepon Kemendikbud: 021 - 5790-3020 atau 021- 570-3303
- Email Kemendikbud: laporkekerasan@kemendikbud.go.id

Contoh Papan Informasi Sekolah Aman


Dengan bertambahnya jumlah perokok, maka semakin banyak pula kawasan-kawasan yang dijadikan tempat untuk merokok termasuk kawasan sekolah. Demi meminimalisasi dampak rokok terhadap anak-anak usia sekolah serta dalam rangka mendukung program Kementerian Kesehatan yang mencanangkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan aturan yang memuat pelanganan rokok di lingkungan sekolah yang tertuang dalam Permendikbud No. 64 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah.

Beberapa poin penting diatur dalam Permendikbud ini, di antaranya berupa imbauan kepada sekolah untuk memasukkan larangan terkait rokok dalam aturan tata terib sekolah, melakukan penolakan terhadap penawaran iklan, promosi, pemberian sponsor, atau kerja sama yang dilakukan oleh perusahaan rokok, memberlakukan larangan pemasangan papan iklan, reklame, penyebaran pamflet, dan bentuk iklan lain dari perusahaan atau yayasan rokok di lingkungan sekolah serta melarang penjualan rokok di kantin, warung atau koperasi serta tempat penjualan lain di sekolah. Sekolah juga diimbau untuk memasang tanda kawasan tanpa rokok di Lingkungan Sekolah.

Kebijakan ini diharapkan dapat

Perbaikan Tata Kelola Perbukuan


Buku yang nantinya digunakan oleh Satuan Pendidikan wajib memenuhi nilai/norma positif yang berlaku di masyarakat, antara lain tidak mengandung unsur pornografi, paham ekstrimisme, radikalisme, kekerasan, SARA, bias gender, serta penyimpangan nilai lainnya.

Demikian mendorong terwujudnya buku pelajaran yang berkualitas, Kemendikbud berharap masyarakat khususnya orang tua turut aktif dalam memperhatikan buku-buku pelajaran yang digunakan oleh anak, keluarga atau sanak-saudaranya di sekolah. Setiap orang juga diharapkan dapat melaporkan dan memberikan kritik, komentar, serta masukan terhadap buku yang digunakan dengan mengirimkan langsung kepada penulis dan penerbit atau kepada Kemendikbud melalui laman http://buku.kemdikbud.go.id atau melalui email buku@kemdikbud.go.id. Sudah saatnya masyarakat bersikap kritis dan solutif demi kepentingan bersama. Anak-anak kita berhak mendapatkan sumber bacaan yang sehat, berkualitas serta bermanfaat bagi masa depannya.

Pengenalan Lingkungan Sekolah

Dari tahun ke tahun, masa orientasi peserta didik baru kerap diwarnai aksi kekerasan, baik verbal maupun fisik. Tak sedikit sekolah yang masih melaksanakan cara serupa dalam masa orientasinya. Padahal, tak sedikit kasus siswa yang sakit bahkan meninggal dunia akibat orientasi sekolah. Kemendikbud menyadari betul, persoalan kekerasan saat orientasi bukanlah persoalan yang sepele, apalagi jika kegiatan tersebut sampai menelan korban.

Merespon hal tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membuat terobosan dengan menghapus Permendikbud Nomor 55 Tahun 2014 tentang Masa Orientasi Siswa yang dinilai belum dapat mencegah terjadinya...
pengenalan lingkungan sekolah secara optimal, dan mengantinya dengan kebijakan baru yang tertuang dalam Permendikbud No.18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah. Permendikbud ini menata dan memberikan alternatif baru dalam proses pengenalan lingkungan sekolah yang lebih baik, lebih terarah, dan sesuai dengan kebutuhan para peserta didik.

Kemendikbud mewajibkan Pengenalan Lingkungan Sekolah diisi dengan kegiatan yang bermanfaat, bersifat edukatif, kreatif, dan menyenangkan. Sekolah juga diminta untuk membuat evaluasi atas pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah yang wajib disampaikan kepada orang tua/wali baik secara tertulis maupun melalui pertemuan paling lama tujuh hari kerja setelah pengenalan lingkungan sekolah berakhir.

Pengenalan lingkungan sekolah wajib memperhatikan beberapa hal, di antaranya perencanaan maupun penyelenggaraan kegiatan hanya menjadi hak guru dan tidak diperbolehkan untuk melibatkan siswa senior. Pengenalan Lingkungan Sekolah sebaiknya dilakukan di lingkungan sekolah (kecuali sekolah tidak memiliki fasilitas yang memadai) serta bersifat edukatif. Sekolah juga dilarang membuat kegiatan yang bersifat perpeloncoan atau tindak kekerasan lainnya. Selain itu, siswa wajib menggunakan seragam dan atribut resmi sekolah dan pihak sekolah tidak diperkenankan memberikan tugas kepada siswa baru berupa kegiatan maupun penggunaan atribut yang tidak relevan dengan aktivitas pembelajaran siswa. Namun, demi pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah yang lebih edukatif dan berkualitas, sekolah dapat melibatkan tenaga kependidikan yang relevan dengan materi kegiatan pengenalan lingkungan sekolah tanpa melakukan pungutan biaya dalam bentuk apapun.

Aturan ini diharapkan dapat lebih efektif dalam mencegah kekerasan dan penyalahgunaan wewenang yang terjadi pada saat orientasi peserta didik baru. Demi medukung hal tersebut, Mendikbud berharap siswa, orangtua/wali, dan masyarakat dapat bersikap lebih peduli dan was terhadap penyelenggaraan kegiatan di sekolah serta melaporkan dugaan pelanggaran atas Peraturan Menteri ini kepada Dinas Pendidikan setempat atau Kementerian melalui laman http://sekolahaman.kemdikbud.go.id, telepon ke 02157903020, 021-5703303, faksimile ke 021-5733125, email ke laporankekerasan@kemdikbud.go.id atau layanan pesan singkat (SMS) ke 0811976929.

Layanan Pendidikan Kepercayaan

Indonesia termasuk negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar didunia. Namun, hal tersebut tidak menjadikan Indonesia bersikap eksklusif dalam membuat kebijakan yang berlaku. Mengingat beragamnya suku bangsa maupun adat istiadat di Indonesia, maka bisa dipastikan bahwa sebagian masyarakatnya menganut keyakinan dan kepercayaan yang berbeda pula.


Pendidikan Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Melalui penyempurnaan dan penyusunan regulasi dari waktu ke waktu, sistem pendidikan Indonesia diharapkan dapat menyentuh setiap anak Indonesia di mana pun mereka berada.
Unit Layanan Terpadu: Melayani Sepenuh Hati

Kemendikbud memahami jika saat mengunjungi Unit Layanan Terpadu (ULT) seperti menjadi pilihan yang kurang menyenangkan bagi para pelaku pendidikan.

Mereka membayangkan jauhnya perjalanan yang harus ditempuh (untuk yang di luar kota, bahkan di luar pulau), lalu mengantre di ruangan yang panas selama berjam-jam, dan belum tentu urusannya akan selesai pada hari itu juga.

Kegalauan itu bertambah dengan adanya kekhawatiran kerumitan birokrasi serta banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi. Namun sejak 1 April 2015, ULT dibawah koordinasi Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM) berbenah diri dan berusaha tampil dengan wajah baru. Pelayanan ULT kini menjadi wajah utama kepedulian Kemendikbud terhadap kebutuhan para pelaku pendidikan.


Saat ini ULT menyediakan 15 jenis layanan, yakni: (1) Layanan aneka tunjangan guru Dikdas, (2) Layanan aneka tunjangan guru Dikmen, (3) Layanan Dapodik Dikdasmen, (4) Layanan Dapodik PAUD Dikmas, (5) Layanan Nomor Unik Peserta Didik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), (6) Layanan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), (7) Layanan Izin Mengajar Tenaga Kerja Asing (IMTA), (8) Layanan penyertaan ijazah peserta didik asing, (9) Layanan Beasiswa Unggulan, (10) Layanan informasi PAUD Dikmas,

Berdasarkan data jumlah pengunjung ULT, yang paling banyak mengajukan permohonan permohonan dan pengaduan adalah terkait dengan layanan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), Data Pokok Pendidikan (Dapidok), Tunjangan Profesi Guru (TPG), inpassing, dan permasalahan guru lainnya, Kartu Indonesia Pintar (KIP), kecurangan dalam ujian, kekerasan di sekolah, dan pungutan liar (dapat dilihat pada grafik).

Melihat harapan masyarakat yang sangat tinggi terhadap Kemendikbud untuk bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi, BKLM secara terus menerus mengimbau unit-unit kerja di lingkungan Kemendikbud untuk dapat segera menanggapi keluhan masyarakat yang disampaikan melalui ULT.

Saat Ujian Nasional (UN), ULT Kemendikbud juga aktif mengelola pengaduan kecurangan pelaksanaan UN. ULT bahkan membuka posko khusus bekerja sama dengan unit kerja di lingkungan Kemendikbud, seperti Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Inspektorat Jenderal (Itjen), Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), dan Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik). Tujuan kerja sama tersebut adalah untuk memastikan pengaduan dari seluruh daerah di Indonesia dapat diakomodir dan diselesaikan dengan baik.

Dalam skala nasional, ULT juga memproses dan menyelesaikan laporan dan pengaduan dari masyarakat yang disampaikan melalui portal Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat.
DUA PULUH BESAR KATEGORI GABUNGAN
(Telepon, SMS, Email, HDI-ULT)
Januari s.d. Agustus 2016


Bagaimana seluruh laporan yang masuk dapat ditindaklanjuti ULT? Seluruh laporan yang masuk akan diproses oleh personel ULT yang berasal dari perwakilan...
Dalam melayani pelaku pendidikan yang mengurus berbagai keperluan, petugas ULT memberikan pelayanan dengan ramah, cepat, sepenuh hati, dan tidak dipungut biaya.
Daftar Akronim

<table>
<thead>
<tr>
<th>Akronim</th>
<th>Arti</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ACDP</td>
<td>Analitical and Capacity Development Partnership</td>
</tr>
<tr>
<td>ADEM</td>
<td>Afirmasi Pendidikan Menengah</td>
</tr>
<tr>
<td>AFI</td>
<td>Apresiasi Film Indonesia</td>
</tr>
<tr>
<td>APBN</td>
<td>Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara</td>
</tr>
<tr>
<td>APBNP</td>
<td>Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan</td>
</tr>
<tr>
<td>ASN</td>
<td>Aparatur Sipil Negara</td>
</tr>
<tr>
<td>BBM</td>
<td>Belajar Bersama Maestro</td>
</tr>
<tr>
<td>BPI</td>
<td>Badan Perfilman Indonesia</td>
</tr>
<tr>
<td>BPKP</td>
<td>Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan</td>
</tr>
<tr>
<td>BPNB</td>
<td>Balai Pelestarian Nilai Budaya</td>
</tr>
<tr>
<td>Dapodik</td>
<td>Data Pokok Pendidikan</td>
</tr>
<tr>
<td>Dikdasmen</td>
<td>Pendidikan dasar dan menengah</td>
</tr>
<tr>
<td>Dirjen</td>
<td>Direktur Jenderal</td>
</tr>
<tr>
<td>Ditjen</td>
<td>Direktorat Jenderal</td>
</tr>
<tr>
<td>FFI</td>
<td>Festival Film Indonesia</td>
</tr>
<tr>
<td>FKBM</td>
<td>Fasilitas Komunitas Budaya di Masyarakat</td>
</tr>
<tr>
<td>FLS2N</td>
<td>Festival dan Loma Seni Siswa Nasional</td>
</tr>
<tr>
<td>GGD</td>
<td>Guru Garis Depan</td>
</tr>
<tr>
<td>GLS</td>
<td>Gerakan Literasi Sekolah</td>
</tr>
<tr>
<td>GNI</td>
<td>Galeri Nasional Indonesia</td>
</tr>
<tr>
<td>GRNM</td>
<td>Gerakan Nasional Revolusi Mental</td>
</tr>
<tr>
<td>GSMS</td>
<td>Gerakan Seniman Masuk Sekolah</td>
</tr>
<tr>
<td>GTK</td>
<td>Guru dan Tenaga Kependidikan</td>
</tr>
<tr>
<td>Hardiknas</td>
<td>Hari Pendidikan Nasional</td>
</tr>
<tr>
<td>IIUN</td>
<td>Indeks Integritas Ujian Nasional</td>
</tr>
<tr>
<td>INAP</td>
<td>Indonesia National Assessment Program</td>
</tr>
<tr>
<td>Irjen</td>
<td>Inspektur Jenderal</td>
</tr>
<tr>
<td>Itjen</td>
<td>Inspektorat Jenderal</td>
</tr>
<tr>
<td>KBBI</td>
<td>Kamus Besar Bahasa Indonesia</td>
</tr>
<tr>
<td>KCM</td>
<td>Kriteria Capaian Minimal</td>
</tr>
<tr>
<td>Kemendikbud</td>
<td>Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</td>
</tr>
<tr>
<td>KIP</td>
<td>Kartu Indonesia Pintar</td>
</tr>
<tr>
<td>KKP</td>
<td>Kawah Kepemimpinan Pelajar</td>
</tr>
<tr>
<td>KPK</td>
<td>Komisi Pemberantasan Korupsi</td>
</tr>
<tr>
<td>LAPOR</td>
<td>Layanan Aspirasi dan Pengadaan Online Rakyat</td>
</tr>
<tr>
<td>Laseda</td>
<td>Lawatan Sejarah Daerah</td>
</tr>
<tr>
<td>LKAS</td>
<td>Lomba Kreasi Audiovisual Sejarah</td>
</tr>
<tr>
<td>LKPP</td>
<td>Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</td>
</tr>
<tr>
<td>LSF</td>
<td>Lembaga Sensor Film</td>
</tr>
<tr>
<td>MA</td>
<td>Madrasah Aliyah</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Daftar Akronim

**Mendikbud** : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
**MOPD** : Masa Orientasi Peserta Didik
**MOS** : Masa Orientasi Siswa
**NGTK** : Neraca Guru dan Tenaga Pendidikan
**NPD** : Neraca Pendidikan Daerah
**O2SN** : Olimpiade Olahraga Siswa Nasional
**OASE KK** : Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja
**OSN** : Olimpiade Sains Nasional
**PAUD** : Pendidikan Anak Usia Dini
**PBP** : Penumbuhan Budi Pekerti
**Permendikbud** : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
**PIP** : Program Indonesia Pintar
**PISA** : *Program for International Assessment*
**PKB** : Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan
**PLS** : Pengenalan Lingkungan Sekolah
**PMK** : Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
**RDA** : Revitalisasi Desa Adat
**RKB** : Ruang Kelas Baru
**RNPK** : Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan
**SBSNP** : Sekolah Berbasis Standar Nasional Pendidikan
**SDGs** : *Sustainable Development Goals*
**Sekjen** : Sekretariat Jenderal
**Sesjen** : Sekretaris Jenderal
**SGD** : Sekolah Garis Depan
**SIMKEU** : Sistem Informasi dan Manajemen Keuangan
**SIMPEG** : Sistem Informasi dan Manajemen Kepegawaian
**SIMPROKA** : Sistem Pemantauan dan Pengendalian Luaran Program dan Kegiatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
**SM3T** : Sarjana Mengajar di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal
**TBM** : Taman Bacaan Masyarakat
**TNP2K** : Tim Nasional Percepatan dan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)
**UBK** : Ujian Berbasis Komputer
**UBKP** : Ujian Berbasis Kertas dan Pensil
**UKG** : Ujian Kompetensi Guru
**ULT** : Unit Layanan Terpadu
**UN** : Ujian Nasional
**UNESCO** : *The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*
**USB** : Unit Sekolah Baru
**WBK** : Wilayah Bebas Korupsi
**WF** : *World Culture Forum*
**WTP** : Wajar Tanpa Pengecualian
<table>
<thead>
<tr>
<th>Halaman</th>
<th>Nama</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Cover</td>
<td>Dokumentasi Kemendikbud</td>
</tr>
<tr>
<td>v</td>
<td>Azis Purwanto</td>
</tr>
<tr>
<td>x - 1</td>
<td>Azis Purwanto</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Azis Purwanto</td>
</tr>
<tr>
<td>4 - 5</td>
<td>Dokumentasi Kemendikbud</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Azis Purwanto</td>
</tr>
<tr>
<td>10 - 12</td>
<td>Dokumentasi Kemendikbud</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Mohammad Adhila Nagaputra / Pemenang Lomba Foto dalam Rangka Hardiknas 2016</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>Dokumentasi Kemendikbud</td>
</tr>
<tr>
<td>20 - 25</td>
<td>Azis Purwanto</td>
</tr>
<tr>
<td>24 - 27</td>
<td>Dokumentasi Kemendikbud</td>
</tr>
<tr>
<td>32 - 33</td>
<td>Ismail Zakaria / Pemenang Lomba Foto dalam Rangka Hardiknas 2016</td>
</tr>
<tr>
<td>35 - 39</td>
<td>Dokumentasi Kemendikbud</td>
</tr>
<tr>
<td>40 - 41</td>
<td>Adinda Candra Dewi Louserina / Pemenang Lomba Foto dalam Rangka Hardiknas 2016</td>
</tr>
<tr>
<td>42</td>
<td>Azis Purwanto</td>
</tr>
<tr>
<td>43</td>
<td>Dokumentasi Kemendikbud</td>
</tr>
<tr>
<td>44 - 49</td>
<td>Azis Purwanto</td>
</tr>
<tr>
<td>50 - 52</td>
<td>Dokumentasi Kemendikbud</td>
</tr>
<tr>
<td>53</td>
<td>Azis Purwanto</td>
</tr>
<tr>
<td>54 - 65</td>
<td>Dokumentasi Kemendikbud</td>
</tr>
<tr>
<td>Halaman</td>
<td>Nama</td>
</tr>
<tr>
<td>-------------</td>
<td>----------------------------------------------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>70 - 73</td>
<td>Azis Purwanto</td>
</tr>
<tr>
<td>75</td>
<td>Dokumentasi Kemendikbud</td>
</tr>
<tr>
<td>77</td>
<td>Azis Purwanto</td>
</tr>
<tr>
<td>78</td>
<td>Azis Purwanto</td>
</tr>
<tr>
<td>79 – 109</td>
<td>Dokumentasi Kemendikbud</td>
</tr>
<tr>
<td>112 – 113</td>
<td>Fiqman Sunandar / Pemenang Lomba Foto dalam Rangka Hardiknas 2016</td>
</tr>
<tr>
<td>114</td>
<td>Azis Purwanto</td>
</tr>
<tr>
<td>115 – 117</td>
<td>Dokumentasi Kemendikbud</td>
</tr>
<tr>
<td>120 – 121</td>
<td>Azis Purwanto</td>
</tr>
<tr>
<td>123 – 150</td>
<td>Dokumentasi Kemendikbud</td>
</tr>
<tr>
<td>151</td>
<td>Azis Purwanto</td>
</tr>
<tr>
<td>155</td>
<td>Azis Purwanto</td>
</tr>
<tr>
<td>160</td>
<td>Dokumentasi Kemendikbud</td>
</tr>
<tr>
<td>165</td>
<td>Dokumentasi Kemendikbud</td>
</tr>
<tr>
<td>166 – 169</td>
<td>Azis Purwanto</td>
</tr>
<tr>
<td>170</td>
<td>Dokumentasi Kemendikbud</td>
</tr>
<tr>
<td>172</td>
<td>Dokumentasi Kemendikbud</td>
</tr>
<tr>
<td>178 – 179</td>
<td>Dokumentasi Kemendikbud</td>
</tr>
<tr>
<td>181</td>
<td>Dokumentasi Kemendikbud</td>
</tr>
<tr>
<td>187</td>
<td>Ade Chandra</td>
</tr>
<tr>
<td>188 - 189</td>
<td>Azis Purwanto</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Terima Kasih

Tentu saja, laporan ini tidak mungkin terwujud tanpa bantuan banyak pihak.

Untuk itu, kami sangat berterima kasih kepada semua unit utama dalam lingkungan Kemendikbud. Mereka adalah:
- Sekretariat Jenderal
- Inspektorat Jenderal
- Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
- Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
- Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
- Direktorat Jenderal Kebudayaan
- Badan Penelitian dan Pengembangan
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Berkat kerja sama yang baik, kami bisa menulis laporan ini. Juga kepada para staf ahli, staf khusus, tenaga ahli Mendikbud dan Kepala Biro Perencanaan dan Kerja sama Luar Negeri (BPKLN), serta semua pihak yang telah bersedia meluangkan waktu untuk kami.

Terima kasih.

Apa yang dituliskan adalah sari dari pekerjaan berat dan besar yang dilakukan banyak pihak di kementerian ini. Tulisan ini hanya mencoba menangkap sekelumit dari kerja keras tersebut. Sebuah kilasan.

Selama lebih kurang 960 jam pengerjaan, melewati tumpukan data yang harus selalu dicek keakuratannya, berlomba dengan “garis mati” (deadline) yang enggan diajak kompromi, buku ini akhirnya rampung dan siap dibaca setiap orang.

Dukungan sangat besar diberikan oleh masing-masing unit utama untuk penyediaan data, informasi awal, dan foto-foto terkait topik penulisan. Maafkanlah, jika waktu yang sempit membuka celah kemungkinan munculnya ketidakakuratan, bahkan bahasa tulis yang mungkin terkesan tidak pas.

Namun demikian, lewat kerja keras semua pihak, sekitar 300 foto berhasil dikumpulkan dan dikurasi secara hati-hati, satu per satu. Tulisan-tulisan juga diulas berkali-kali oleh banyak pihak untuk memastikan kesesuaian dengan tema besar buku kilasan ini, yakni Percepatan dan Keberlanjutan.

Sampai jumpa di Kilasan Kinerja Kemendikbud tahun depan.